

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

NOVEMBER 2025





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

November 2025

TRIWULANAN
Juli - September 2025
(Terbit Desember 2025)
Triwulan III 2025

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

November 2025

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau. Penerbitan laporan ini bertujuan sebagai: 1) Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, dan 2) Informasi kepada *stakeholders* di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam – Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode November 2025 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan stakeholder eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dan Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Keuangan atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, November 2025
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

Rony Widijarto P.
Direktur

Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	65



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	3
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB	5
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor	5
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	6
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	7
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi	7
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	8
BOKS 1	9
Laporan <i>Liaison</i> Triwulan III 2025 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	
BOKS 2	13
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kepulauan Riau	

Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	15
2.1 REALISASI PENDAPATAN	17
2.2 REALISASI BELANJA	18
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	20
BOKS 3	23
KEPRI ECONOMIC FORUM 2025 : Wujudkan Ekonomi Inklusi Melalui Hilirisasi Ekonomi Biru	

Bab III	
Perkembangan Inflasi	25
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	28
3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN	29
3.2.1 Inflasi Kota Batam	29
3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang	29
3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun	29
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	30
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	31

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	33
4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI	35
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	35
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	36
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	36
4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	38
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	38
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	38
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	38
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	40



Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	41
5.1.1	Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	43
5.1.2	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	43
5.1.3	Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	44
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	44
5.2.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	44
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	44
5.2.3	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	45
5.2.4	Perkembangan QRIS	45
5.2.5	Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	46
5.2.6	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	47
5.2.7	Bantuan Sosial Nontunai	47
5.3	TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	48
5.3.1	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	48
5.3.2	Perkembangan Transaksi PJP LR	48
5.3.3	Pelindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau	49
	BOKS 4	51

Akselerasi Akseptasi Digital Masyarakat Melalui Kegiatan Berlayar Belakang Padang 2025

Bab VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan 53

6.1	KETENAGAKERJAAN	55
6.1.1	Ketenagakerjaan	55
6.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	56
6.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	56
6.2.2	Kemiskinan	57
6.2.3	<i>Gini Ratio</i> (GR)	57
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	58

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah 59

7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 2025 DAN 2026	61
7.2	PROSPEK INFLASI 2025 DAN 2026	62
7.3	REKOMENDASI	63

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel B1.1	<i>Likert Scale</i> Tahun TW I 2023 s.d TW III 2025 di Kepri	9
Tabel B2.1	Skenario simulasi CGE	13
Tabel B2.2	Dampak simulasi terhadap pertumbuhan ekonomi	14
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2025	18
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2025	19
Tabel 2.3	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	21
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri	22
Tabel 3.1	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)	27
Tabel 3.2	Penyumbang Inflasi Bulanan Provinsi Kepri September 2025	27
Tabel 3.3	Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri September 2025	27
Tabel 3.4	Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri September 2025	27
Tabel 3.5	Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri September 2025	28
Tabel 3.6	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	28
Tabel 3.7	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	30
Tabel 4.1	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	35
Tabel 4.2	Penyaluran Kredit (Spasial)	38
Tabel 4.3	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	40
Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	55
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	55
Tabel 6.3	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	55
Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	56
Tabel 6.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	56
Tabel 6.6	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	57
Tabel 6.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	58
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	58
Tabel 7.1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025	62
Tabel 7.2	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2026	62
Tabel 7.3	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025	63
Tabel 7.4	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2026	63

Daftar Gambar

Gambar B3.1	Diseminasi Laporan Perekonomian oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri	23
Gambar B3.2	Sambutan Plh. Sekda Provinsi Kepri	23
Gambar B3.3	<i>Opening Ceremony</i> KEF	24
Gambar B3.4	<i>Talkshow Blue Economy</i>	24
Gambar B4.1	<i>Opening Ceremony</i> Berlayar Belakang Padang 2025	51
Gambar B4.2	Semarak Berlayar 2025	51
Gambar B4.3	<i>Sunset run</i> Berlayar 2025	52

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	4
Grafik 1.5	Konsumsi Listrik Rumah Tangga	4
Grafik 1.6	Realisasi Belanja APBD	4
Grafik 1.7	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri	5
Grafik 1.8	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5
Grafik 1.9	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	5
Grafik 1.10	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	5
Grafik 1.11	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	5
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal	6
Grafik 1.13	<i>Index of Industrial Production (IIP)</i> Singapura untuk Computer, Electronic, & Optical Products	6
Grafik 1.16	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	6
Grafik 1.17	Perkembangan Ekspor Non Migas	7
Grafik 1.18	Perkembangan Impor Bahan Baku	7
Grafik 1.19	Kredit Sektor Konstruksi	8
Grafik 1.20	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8
Grafik 1.21	Kredit Sektor Perdagangan	8
Grafik 1.22	SBT Perdagangan	8
Grafik 1.23	Perkembangan Ekspor Migas	8
Grafik B1.1	Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik	10
Grafik B1.2	LS Kapasitas Utilisasi & Investasi	10
Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan III 2025	17
Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan III 2025	17
Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	18
Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan I 2025	20
Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan I 2025	20
Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	20
Grafik 3.1	Inflasi Triwulan III 2025 Regional Sumatera (% yoy)	28
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan III 2025 (% yoy)	28
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)	29
Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	36
Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	36
Grafik 4.3	Perkembangan DPK Perbankan	36
Grafik 4.4	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	36
Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	36
Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	36
Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	37
Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	37
Grafik 4.9	Kredit Sektor Industri Pengolahan	37
Grafik 4.10	Kredit Konstruksi	37
Grafik 4.11	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	38
Grafik 4.12	Perkembangan Kredit Korporasi	38
Grafik 4.13	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	38
Grafik 4.14	Survei Ekspektasi Konsumen	39
Grafik 4.15	Survei Indeks Penghasilan Konsumen	39
Grafik 4.16	Kredit Rumah Tangga	39
Grafik 4.17	Kredit Konsumsi	39
Grafik 4.18	DPK Perseorangan	39
Grafik 4.19	Pangsa DPK Perseorangan	39
Grafik 4.20	Perkembangan Kredit UMKM	40
Grafik 5.1	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Kepri	43
Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	43
Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	44
Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	44
Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	44

Daftar Grafik

Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	45
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	45
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	45
Grafik 5.10	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kab/ Kota di Provinsi Kepri triwulan III 2025	45
Grafik 5.11	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha triwulan III 2025	46
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	46
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	46
Grafik 5.14	Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.15	Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan III 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.16	Penyaluran Program Sembako Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri	47
Grafik 5.17	Perkembangan Transaksi KUPVA	48
Grafik 5.18	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	48
Grafik 5.19	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	48
Grafik 5.20	Jumlah Pengaduan Pelindungan Konsumen hingga Triwulan III 2025	49
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	56
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	56
Grafik 6.3	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Kepri	58
Grafik 6.4	<i>Gini Ratio</i> Provinsi di Wilayah Sumatera	58
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	58
Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	61
Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	61
Grafik 7.3	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Penjualan Ekspor	62
Grafik 7.4	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Investasi	62

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh 7,48% (yoy), lebih tinggi triwulan sebelumnya yakni 7,14% (yoy).

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,48% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,14% (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,90% (yoy), dan tertinggi ketiga secara Nasional. Adapun perekonomian Indonesia secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,04% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh PMTB, Net Ekspor, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi LU, pertumbuhan ekonomi didukung oleh LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai triwulan III 2025 tercatat melandai dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan III 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan III 2024, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.

Tekanan Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 sebesar 2,70%, lebih rendah dibanding triwulan I 2025.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan III 2025 sebesar 2,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,32% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Dengan demikian, inflasi pada Triwulan III 2025 berada dalam target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan III 2025 terjaga dan tumbuh positif dibanding triwulan sebelumnya

Intermediasi perbankan pada triwulan III 2025 tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit, DPK, dan aset yang meningkat dan disertai dengan risiko kredit yang membaik.

Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan III 2025. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani secara masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

Perekonomian global diprakirakan melambat meskipun tidak sedalam yang diprakirakan sebelumnya. Dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat terhadap ekonomi global masih moderat, didukung dengan adanya fenomena *front-loading* khususnya pada semester I 2025 serta negosiasi tarif yang dilakukan sejumlah negara. Sementara itu, perekonomian Indonesia juga diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi didukung oleh stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang lebih longgar. Sejalan dengan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh komponen investasi dan net ekspor.

Inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Faktor yang mendukung stabilitas inflasi ini mencakup normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tumbuh positif dan terakselerasi pada triwulan III 2025. Selain itu, transaksi non tunai juga tercatat mengalami peningkatan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Perekonomian global diprakirakan melambat. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Tekanan inflasi pada tahun 2025 tetap terjaga yang didukung oleh normalisasi harga pangan, perbaikan rantai pasokan, dan sinergi TPID dan GNPIP.

BAB I

Perkembangan Ekonomi Prov. Kepulauan Riau

Pertumbuhan Ekonomi



7,48%

Tw III 2025

7,14%

Tw II 2025

Konsumsi RT



4,12%

Tw III 2025

3,90%

Tw II 2025

Investasi



9,05%

Tw III 2025

8,70%

Tw II 2025

Net Ekspor



16,45%

Tw III 2025

21,36%

Tw II 2025

Konsumsi Pemerintah



-1,76%

Tw III 2025

-15,32%

Tw II 2025

Industri Pengolahan



6,82%

Tw III 2025

6,96%

Tw II 2025

Perdagangan



5,54%

Tw III 2025

6,96%

Tw II 2025

Pertambangan



19,83%

Tw III 2025

24,21%

Tw II 2025

Konstruksi



5,71%

Tw III 2025

7,75%

Tw II 2025

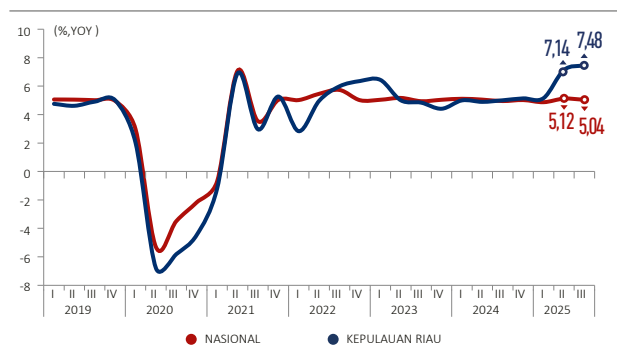
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,48% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,14% (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,90% (yoy), dan tertinggi ketiga secara Nasional. Adapun perekonomian Indonesia secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,04% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Ekspor, serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.

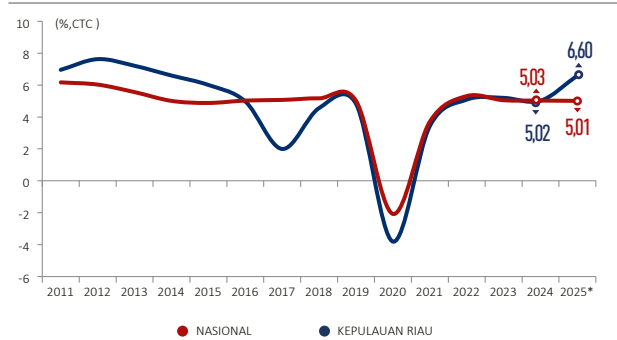


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp55.675,76 miliar atau tumbuh 7,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,14% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU utama yakni Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen PMTB, Net Ekspor, dan Konsumsi Rumah Tangga.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan III 2025 lebih tinggi dari wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yoy) maupun capaian Nasional yang tumbuh sebesar 5,04% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di wilayah Sumatera dicapai oleh Kepri, Sumatera Selatan, dan Lampung masing-masing sebesar 7,48% (yoy), 5,20% (yoy), dan 5,04% (yoy). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan III 2025 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,07% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,58%), Riau (22,95%), Sumatera Selatan (13,85%) dan Lampung (10,13%).



Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)
Sumber : BPS (data diolah)



Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)
Sumber : BPS (data diolah) *kumulatif s.d Tw III

1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 45,35%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,95% dari total PDRB. Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh masih berlanjutnya upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan masih mengalami pertumbuhan yang positif sejalan dengan periode tahun ajaran baru dan aktivitas pariwisata di triwulan III.

Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 9,33%, sejalan dengan nominal ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah memiliki pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 4,03%, didukung oleh belanjutnya pengeluaran belanja pemerintah untuk program-program strategis.

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (% , yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 (% , qta)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (% , qta)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2025 (% , etc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2025 (% , etc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,82	4,46	3,02	1,71	4,70	4,62	4,90
2	Sumatera Utara	4,69	4,55	2,97	2,11	4,68	4,63	23,58
3	Sumatera Barat	3,94	3,36	1,52	-0,10	4,24	3,94	6,60
4	Riau	4,59	4,98	1,52	3,54	4,62	4,74	22,95
5	Jambi	4,99	4,77	5,60	2,17	4,78	4,78	6,68
6	Sumatera Selatan	5,42	5,20	4,65	2,25	5,32	5,28	13,85
7	Bengkulu	4,99	4,56	6,95	-2,97	4,92	4,80	2,07
8	Lampung	5,09	5,04	9,33	0,69	5,27	5,19	10,13
9	Kep. Bangka Belitung	4,09	3,21	5,55	-1,70	4,34	3,95	2,17
10	Kepulauan Riau	7,14	7,48	2,51	0,85	6,15	6,60	7,07
SUMATERA		4,96	4,90	3,70	1,81	4,90	4,90	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

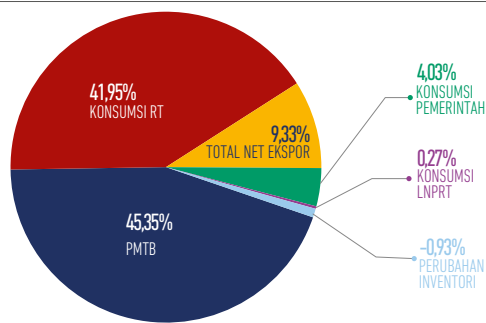
Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2023					2024					2025			ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	
1. Konsumsi RT	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,85	5,16	5,10	2,97	4,51	3,15	3,90	4,12	▲
2. Konsumsi LNPRT	0,65	5,40	5,48	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	2,03	9,02	-0,99	9,71	5,68	▼
3. Konsumsi Pemerintah	5,29	10,35	3,91	8,58	7,46	28,99	7,95	5,39	-7,08	4,25	4,17	-15,32	-1,76	▲
4. PMTB (Investasi)	7,03	7,72	10,84	9,15	8,72	8,45	8,04	3,22	5,63	6,26	3,27	8,70	9,05	▲
5. Perubahan Inventori	212,70	718,19	42,78	61,52	0,12	213,45	198,09	273,92	45,09	35,95	5,87	6,09	55,46	▼
6. Total Net Ekspor	4,81	8,80	-3,49	-19,01	-1,82	2,02	-20,48	17,47	30,17	4,68	14,47	21,36	16,45	▼
a. Total Ekspor	3,15	-6,72	-2,88	-3,35	-2,53	-3,04	3,27	0,25	14,85	3,77	22,80	27,02	16,53	▼
b. Total Impor	2,96	-8,33	-2,82	-1,85	-2,61	-3,63	6,19	-1,26	13,63	3,68	23,83	27,54	16,54	▼
PERTUMBUHAN PDRB	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	5,16	7,14	7,48	▲

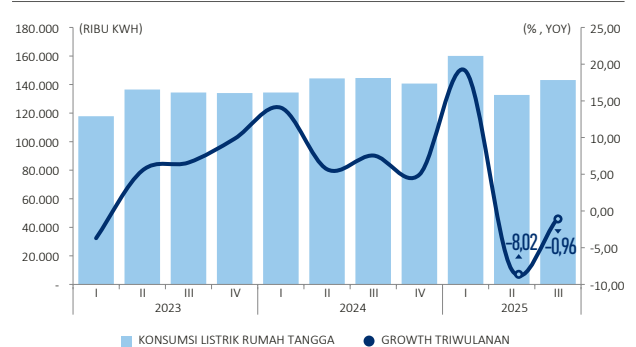
▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran

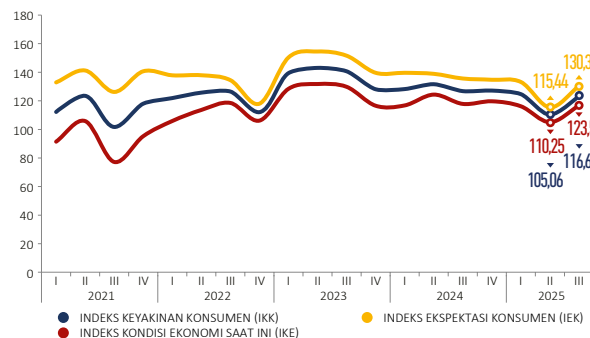


Sumber: PLN Persero (data diolah)

Grafik 1.5 Konsumsi Listrik Rumah Tangga

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,90% (yoy). Akselerasi konsumsi rumah tangga tercermin dari meningkatnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dari 110,25 pada triwulan II menjadi 123,50 di triwulan III. Hal ini menunjukkan optimisme masyarakat yang meningkat terhadap kondisi perekonomian saat ini. Selain itu, peningkatan konsumsi RT juga terindikasi dari membaiknya konsumsi listrik RT, dari sebelumnya terkontraksi 8,02% (yoy) menjadi terkontraksi 0,96% (yoy). Lebih lanjut, akselerasi konsumsi RT pada triwulan III juga didukung oleh momen libur tahun ajaran baru dan aktivitas pariwisata yang mendorong belanja masyarakat.



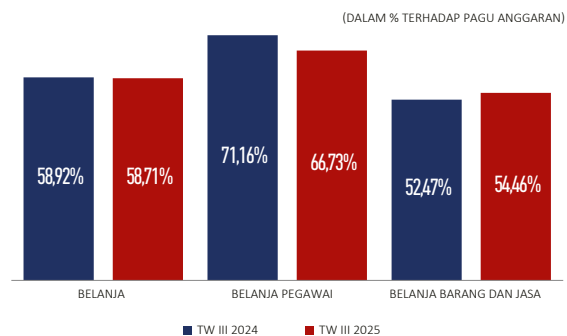
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

1.1.2 Konsumsi Pemerintah

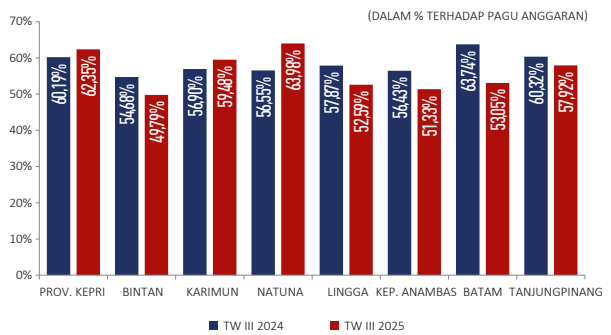
Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan III 2025 mengalami kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2025, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 1,76% (yoy), lebih dangkal dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 15,32% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan penurunan total realisasi belanja APBD Pemda seluruh Kepri, yang hingga triwulan III 2025 mencapai 58,71% dari pagu anggaran, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 58,92%.

Secara spasial, sebagian Pemda di wilayah Kepri mencatat penurunan realisasi belanja pada triwulan III 2025 dibandingkan



Sumber: BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBD



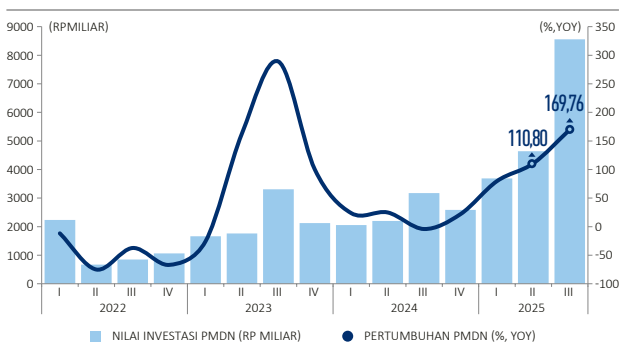
Sumber : BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.7 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri

dengan triwulan III 2024. Penurunan realisasi terjadi di Kabupaten Bintan yang menurun dari 54,68% menjadi 49,79%, Kabupaten Lingga dari 57,87% menjadi 52,59%, Kabupaten Kepulauan Anambas dari 56,43% menjadi 51,33%, Kota Batam dari 63,74% menjadi 53,05%, serta Kota Tanjungpinang dari 60,32% menjadi 57,92%. Di sisi lain, terjadi peningkatan realisasi belanja oleh pemerintah Provinsi Kepri dari 60,19% menjadi 62,35%, Kabupaten Karimun dari 56,90% menjadi 59,48%, dan Kabupaten Natuna dari 56,55% menjadi 63,98%. Adapun realisasi belanja tertinggi di triwulan III 2025 dicatat oleh Kabupaten Natuna.

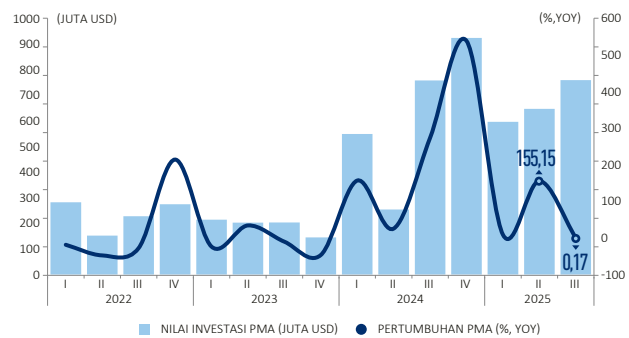
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 9,05% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,70% (yoy). Akselerasi tersebut terkonfirmasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kepri yang tumbuh tinggi sebesar 169,76% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 110,80% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh melambatnya Penanaman Modal Asing (PMA) yang tumbuh sebesar 0,17% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 155,15% (yoy). Masih terus tumbuhnya PMDN dan PMA menunjukkan bahwa Kepri masih menjadi salah satu wilayah tujuan investasi unggulan di Indonesia.



Sumber : BKPM (data diolah)

Grafik 1.8 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

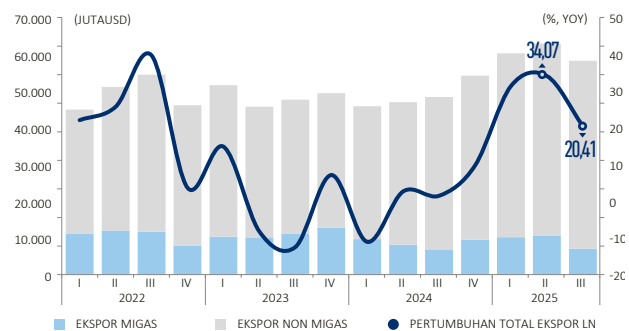


Sumber : BKPM (data diolah)

Grafik 1.9 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)

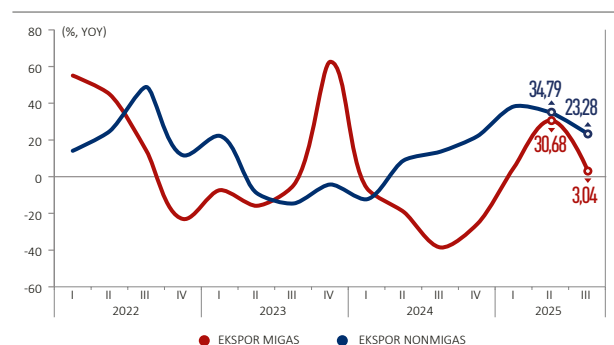
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor

PDRB net ekspor Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 16,45% (yoy), terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,36% (yoy). Pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Ekspor tumbuh sebesar 16,53% (yoy), atau terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 27,02% (yoy). Sementara itu, impor juga tumbuh sebesar 16,54% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 27,54% (yoy). Ekspor yang terdeselerasi sejalan dengan nilai total ekspor ke luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 20,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 34,07% (yoy).



Sumber : BPS (data diolah)

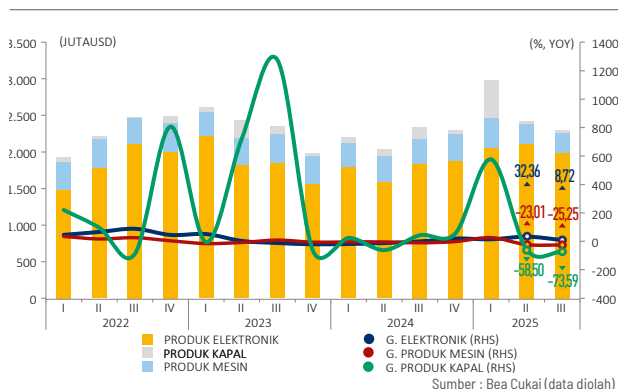
Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri



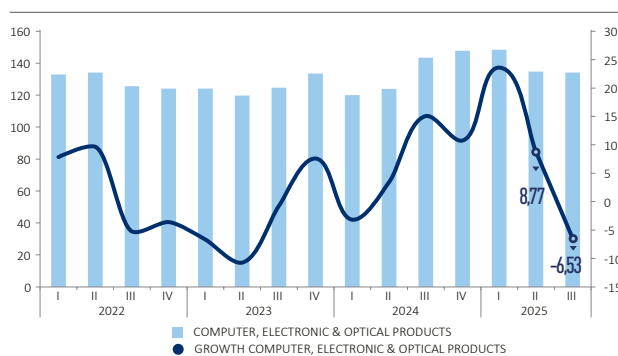
Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.11 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang terdeselerasi sejalan dengan melambatnya ekspor migas dan normalisasi ekspor produk elektronik. Nominal ekspor migas pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh sebesar 3,04% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 30,68% (yoy). Adapun pertumbuhan nominal ekspor produk elektronik juga mengalami penurunan, dari 32,36% (yoy) menjadi 8,72% (yoy), sejalan dengan normalisasi pasca fenomena *frontloading* di triwulan sebelumnya akibat dinamika tarif resiprok. Lebih lanjut, kinerja ekspor produk mesin dan produk kapal juga mengalami perlambatan. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan III 2025 berkontraksi sebesar 25,25% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 23,01% (yoy). Sementara itu, nominal ekspor produk kapal juga berkontraksi sebesar 73,59% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 58,50% (yoy).



Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik, Produk Mesin, dan Produk Kapal
Sumber : Bea Cukai (data diolah)



Grafik 1.13 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Computer, Electronic, & Optical Products
Sumber : Singapore Department of Statistics (data diolah)

Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor secara total yang melambat, PDRB impor juga tercatat mengalami deselerasi. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 16,54% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar

27,54% (yoy). Selanjutnya, total nilai impor luar negeri tumbuh sebesar 22,71% (yoy) pada triwulan III 2025, tercatat lebih rendah dari sebelumnya yang tumbuh 79,47% (yoy). Melambatnya impor luar negeri terutama disebabkan oleh penurunan impor barang modal dan bahan baku. Nilai impor barang modal dari luar negeri pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 59,20% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh tinggi sebesar 94,29% (yoy). Adapun impor bahan baku tumbuh sebesar 30,00% (yoy), juga melambat dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 35,03% (yoy). Di sisi lain, impor barang konsumsi tumbuh sebesar 10,09% (yoy), terakselerasi setelah triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 19,22% (yoy).

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja sektor industri dan pertambangan yang tetap baik pada triwulan III 2025 mampu mendorong kinerja PDRB secara keseluruhan. Kinerja positif ekonomi Kepri tetap ditopang terutama oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, serta LU Konstruksi.

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa 40,54%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 19,70%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 11,06% dan 9,40%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian juga tumbuh positif sejalan dengan beroperasinya sejumlah proyek migas baru di Kepri. Adapun kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat.



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.16 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

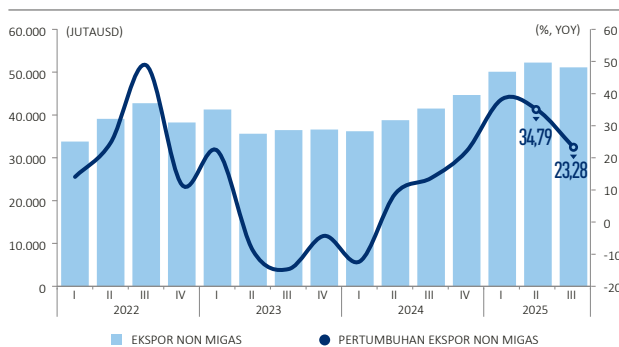
PDRB Sisi Lapangan Usaha	2023					2024					2025			ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	-2,32	-5,92	6,96	1,53	5,05	3,31	-3,76	-2,08	0,57	-2,75	13,40	19,80	▲
Pertambangan dan Penggalian	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,69	-25,84	-5,01	7,43	-7,83	0,99	24,21	19,83	▼
Industri Pengolahan	7,71	-0,27	0,62	1,83	2,46	3,86	13,35	7,76	6,64	7,77	7,30	6,96	6,82	▼
Pengadaan Listrik, Gas	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	9,01	7,20	2,70	9,71	15,63	▲
Pengadaan Air	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	-1,65	1,98	7,33	16,89	14,56	▼
Konstruksi	6,74	10,31	13,74	10,94	10,49	13,89	7,58	2,06	1,02	5,75	3,84	7,75	5,71	▼
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,49	2,28	10,03	6,03	5,87	4,79	2,24	4,84	10,66	5,59	10,29	6,96	5,54	▼
Transportasi dan Pergudangan	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	5,94	2,51	3,57	6,27	12,94	▲
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	8,31	4,21	2,47	-0,63	5,35	▲
Informasi dan Komunikasi	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	-8,54	-0,06	-5,98	-8,96	-4,52	▲
Jasa Keuangan	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,24	10,22	9,83	1,70	7,41	5,05	0,15	-0,65	▼
Real Estate	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	6,58	5,59	-0,13	11,38	6,23	▼
Jasa Perusahaan	35,59	28,90	11,80	2,81	18,32	-4,29	-1,39	6,90	18,80	5,05	26,89	25,03	12,58	▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	32,83	3,93	17,86	8,10	-15,16	-0,15	▲
Jasa Pendidikan	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	18,16	3,94	9,01	6,07	6,68	▲
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	13,87	19,60	9,04	-0,07	4,74	▲
Jasa lainnya	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	26,89	15,95	16,41	-3,27	-5,98	▼
PERTUMBUHAN PDRB	6,44	5,01	4,84	4,41	5,16	5,00	4,90	5,01	5,14	5,02	5,16	7,14	7,48	▲

▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)

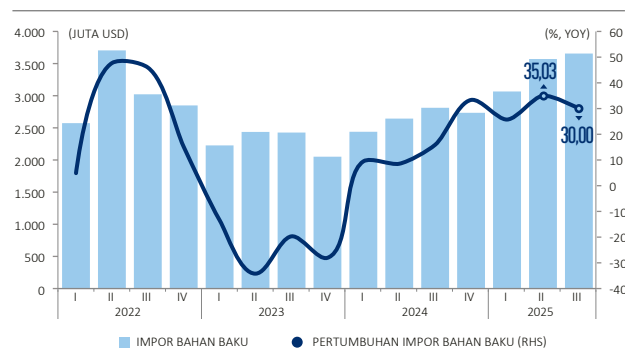
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 6,82% (yoy), terdeselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,96% (yoy) dan memberikan andil 2,80% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang melandai tercermin dari melambatnya ekspor nonmigas, dari 34,79% (yoy) pada triwulan II 2025 menjadi 23,28% (yoy) di triwulan III 2025. Selain itu, perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan juga terlihat dari impor bahan baku yang tumbuh sebesar 30,00% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 35,03% (yoy), namun masih terjaga di level yang tinggi.



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 1.17 Perkembangan Ekspor Non Migas

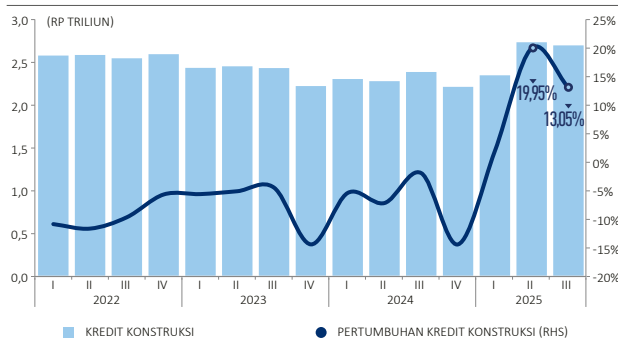


Bea Cukai (data diolah)

Grafik 1.18 Perkembangan Impor Bahan Baku

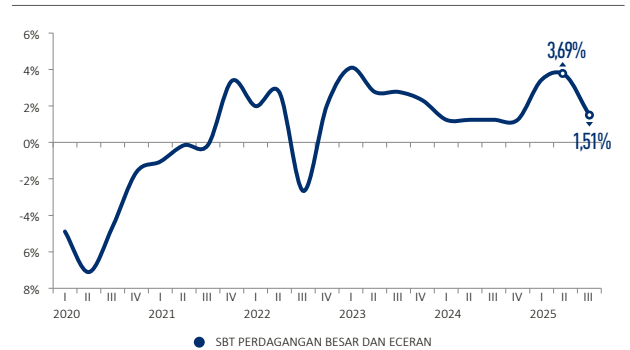
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan III 2025 terdeselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,71% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,75% (yoy). Melambatnya kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari pertumbuhan kredit pada sektor tersebut di Provinsi Kepri yang tumbuh sebesar 13,05% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,95% (yoy). Kinerja LU Konstruksi juga didukung oleh pembangunan sejumlah ruas jalan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang masih terus berlanjut. Deselerasi LU Konstruksi juga tercermin dari penjualan semen yang tumbuh 0,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 45,53% (yoy).



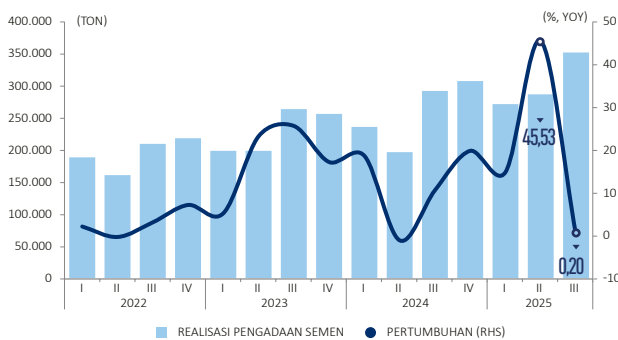
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.19 Kredit Sektor Konstruksi



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 1.22 SBT Perdagangan



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia (data diolah)

Grafik 1.20 Perkembangan Pengadaan/ Penjualan Semen

1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Pada triwulan III 2025 kinerja LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh sebesar 19,83% (yoy), atau mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 24,21% (yoy). LU Pertambangan yang tumbuh melambat ditunjukkan oleh ekspor migas yang juga tumbuh melambat sebesar 3,04% (yoy), terutama akibat ekspor hasil minyak yang turun dari sebelumnya tumbuh 150,69% (yoy) menjadi 37,23% (yoy). Di sisi lain, ekspor gas alam dan minyak mentah mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya, yang didukung oleh sejumlah proyek migas yang baru *onstream* di wilayah Natuna, antara lain lapangan migas Forel dan Terubuk.

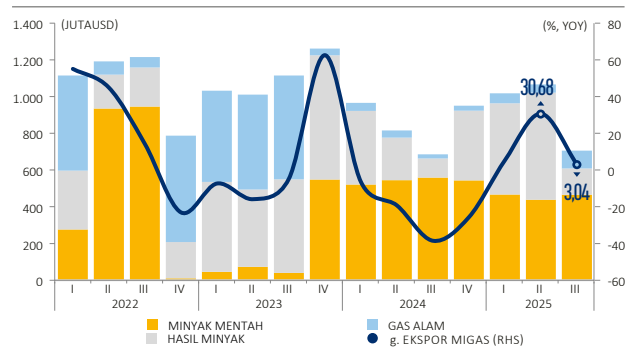
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,54% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,96% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit sektor perdagangan yang melambat dari 6,89% (yoy) menjadi 5,72% (yoy). Lebih lanjut, melambatnya LU perdagangan juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menghasilkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sektor perdagangan sebesar 1,51%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,69%. Meskipun demikian, LU perdagangan masih dapat tumbuh positif ditopang oleh momen libur tahun ajaran baru serta berlanjutnya aktivitas pariwisata di Kepri.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.21 Kredit Sektor Perdagangan



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor Migas

BOKS 1

Laporan *Liaison* Triwulan III 2025

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

Untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan wawancara kegiatan dunia usaha atau *liaison* kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi di Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus *liaison* pada triwulan III tahun 2025 terdiri dari 12 kontak perusahaan. Adapun sebaran kontak yaitu pada industri pengolahan (41,7%), penyediaan akomodasi dan makan minum (8,3%), jasa lainnya (8,3%), transportasi dan pergudangan (8,3%), pengadaan listrik dan gas (8,3%), pertanian, kehutanan, dan perikanan (8,3%), pertambangan dan penggalian (8,3%), dan *real estate* (8,3%). Ruang lingkup analisa laporan *liaison* mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan margin, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi bisnis di masa yang akan datang dengan ringkasan nilai *likert* sebagaimana terlihat pada Tabel B1.1.

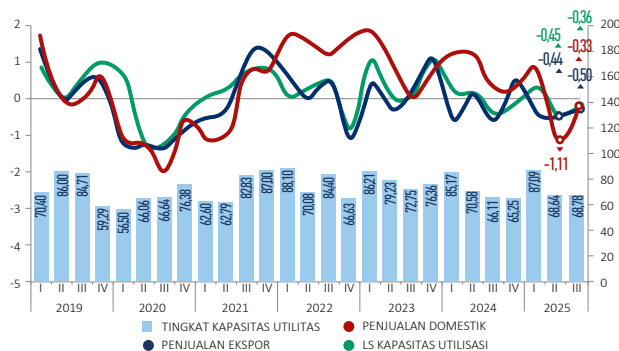
Berdasarkan hasil *liaison*, produksi dan penjualan domestik Kepri pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dipengaruhi oleh meningkatnya *demand* dalam negeri. Peningkatan yang terjadi khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh membaiknya kondisi operasional perusahaan pasca pembaharuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Maret 2025 lalu. Pada sektor *real estate*, peningkatan ditopang oleh meningkatnya permintaan tipe rumah menengah kebawah. Pada sektor pengadaan listrik dan gas, peningkatan penjualan didorong oleh kenaikan konsumsi LPG (subsidi maupun non-subsidi) serta pergeseran preferensi konsumsi BBM masyarakat dari pertalite ke pertamax. Sementara itu, kenaikan pada sektor jasa lainnya didorong oleh industri kreatif di bidang animasi yang mulai memperoleh proyek dari dalam negeri.

Tabel B1.1 Likert Scale Tahun TW I 2023 s.d TW III 2025 di Kepri

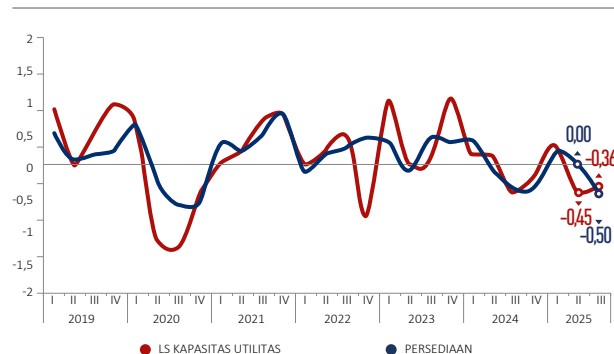
Indikator	2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
KONDISI SAAT INI											
Penjualan Domestik	1,78	1,00	0,00	0,80	1,22	1,10	0,20	0,29	0,78	-1,11	-0,33
Penjualan Ekspor	0,38	-0,30	0,20	1,00	-0,57	0,11	-0,60	0,45	-0,40	-0,50	-0,44
LS Kapasitas Utilisasi	1,00	0,00	0,08	1,00	0,17	0,08	-0,45	-0,17	0,27	-0,45	-0,36
Persediaan	0,33	-0,08	0,42	0,33	0,33	-0,09	-0,33	-0,40	0,18	0,00	-0,50
Investasi	1,00	1,00	1,08	0,17	0,75	0,67	0,58	0,67	0,82	0,73	0,58
Biaya Bahan Baku	0,67	-0,15	0,70	0,88	0,92	0,18	0,46	0,38	0,36	0,18	0,33
Biaya Energi	0,50	0,38	0,00	1,00	0,08	0,08	0,15	0,09	0,27	0,45	0,58
Biaya Tenaga Kerja	1,08	1,23	2,00	1,25	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00	1,50
Harga Jual	0,67	0,62	0,83	0,25	0,33	0,33	0,31	0,50	1,00	0,27	0,33
Margin Per Unit Output	0,50	0,54	0,17	0,08	0,00	0,50	-0,58	-0,08	0,27	-0,18	0,17
Jumlah Tenaga Kerja	0,83	0,23	0,17	0,58	0,17	0,00	0,23	0,33	-0,09	-0,18	-0,58
PERKIRAAN KE DEPAN											
Perkiraan Penjualan ke Depan	0,67	0,54	0,75	0,25	0,08	1,00	1,08	0,92	0,36	0,55	0,17
Perkiraan Tingkat Upah	1,00	0,92	2,00	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Perkiraan Harga Jual	0,58	0,15	0,42	0,58	0,42	0,58	0,50	0,18	0,45	0,00	0,25
Perkiraan Jumlah Tenaga Kerja	0,92	0,38	0,42	0,00	0,33	0,42	0,46	0,33	0,36	0,27	0,25
Perkiraan Investasi	0,50	0,69	0,25	0,67	0,58	0,58	0,82	0,83	0,82	0,64	0,75
Tingkat Kapasitas Utilisasi	86,21	79,23	72,75	76,36	85,17	70,58	66,11	65,25	87,09	68,64	68,78

Sejalan dengan permintaan domestik, permintaan ekspor turut mengalami peningkatan. Kinerja ekspor yang terakselerasi ini terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor industri pengolahan yang disebabkan oleh adanya kenaikan *demand* dari perusahaan induk dan peluncuran model produk baru pada industri elektronik yang berdampak pada peningkatan penjualan ekspor. Sektor pertambangan dan penggalian mencatat kenaikan ekspor sejalan dengan membaiknya kondisi operasional pasca penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Maret 2025. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan permintaan yang didorong oleh momentum Hari Kemerdekaan Singapura dan Malaysia serta liburan sekolah yang jatuh pada bulan Agustus sehingga berdampak pada tingkat hunian hotel hingga mencapai *full occupancy*.

Rata-rata tingkat kapasitas utilisasi dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat sebesar 68,78%, meningkat dari periode sebelumnya sebesar 68,64% tercermin dari *likert scale* dengan kapasitas utilisasi yang mengalami perbaikan menjadi sebesar -0,36, lebih dangkal dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,45. Hal ini juga sejalan dengan penguatan kinerja penjualan domestik dan ekspor pada triwulan III 2025 tercermin dari *likert scale* yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 1). Peningkatan kapasitas utilisasi terjadi pada beberapa perusahaan khususnya di sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta *real estate*. Meningkatnya tingkat kapasitas utilisasi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah produksi pada industri pengolahan dan *real estate*. Sementara itu, di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan peningkatan kapasitas utilisasi didorong oleh strategi perusahaan yang menutup satu lini produksi dan memaksimalkan produktivitas lini produksi yang tersisa. Tingkat kapasitas utilisasi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas operasi. Terlihat pada Grafik 2, peningkatan kapasitas utilisasi pada triwulan III 2025 juga berpengaruh kepada penurunan persediaan yang tercermin dari *likert scale* persediaan sebesar -0,50 pada triwulan III 2025, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang berada di level 0,00%. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan kapasitas utilisasi perusahaan, yang mengindikasikan tingginya volume produksi, berimplikasi pada berkurangnya tingkat persediaan.



Grafik B1.1 Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik



Grafik B1.2 LS Kapasitas Utilisasi & Investasi

Tingkat persediaan mengalami penurunan tercermin dari *likert scale* sebesar -0,50, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 yang sebesar 0,00. Level persediaan yang menurun tersebut terjadi seiring dengan penguatan kinerja penjualan domestik dan ekspor serta peningkatan kebutuhan bahan baku untuk pengerjaan proyek khususnya pada sektor *real estate*. Sementara itu, pada industri pengolahan terjadi peningkatan persediaan seiring dengan bertambahnya order dari perusahaan induk, sehingga produksi meningkat dan berimplikasi pada kenaikan persediaan.

Secara umum, investasi pada periode ini turut mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya yang tercermin dari *likert scale* investasi 0,58 pada triwulan III 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 0,73. Hal ini terkonfirmasi dari pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang turut menurun dari 8,70% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 7,88% (yoy) pada triwulan ini. Penurunan investasi terutama dipengaruhi oleh masih terbatasnya skala realisasi di sejumlah sektor, khususnya industri pengolahan, *real estate*, pertanian, serta jasa lainnya, yang umumnya hanya melakukan pemeliharaan (*maintenance*) tanpa ekspansi signifikan. Sementara itu, realisasi investasi yang relatif besar masih terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas, meskipun belum mampu mengimbangi lemahnya investasi pada sektor lainnya. Secara agregat, kondisi ini mengindikasikan bahwa dunia usaha masih cenderung berhati-hati dalam menambah kapasitas produksi, sejalan dengan aktivitas usaha yang termoderasi.

Harga jual pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari *likert scale* sebesar 0,33, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,27. Peningkatan harga jual/tarif terjadi pada sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan *real estate*. Peningkatan harga jual tersebut terjadi karena mempertimbangkan kondisi pasar, biaya bahan baku, biaya operasional, dan kenaikan biaya listrik yang terus meningkat dari triwulan sebelumnya. Seiring dengan peningkatan harga jual, margin perusahaan turut mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari *likert scale* margin pada triwulan



III 2025 yang terakselerasi sebesar 0,17, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,18. Mayoritas perusahaan kontak *liaison* pada triwulan ini melakukan penetapan harga jual dengan menerapkan sistem *cost plus margin*, yang berarti *margin* yang diperoleh dihitung berdasarkan biaya produksi yang timbul. Kenaikan *margin* dari sisi nominal didorong oleh peningkatan harga jual, sementara dari sisi presentase, *margin* tetap dijaga pada tingkat yang relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

Seiring dengan kondisi kinerja penjualan, jumlah tenaga kerja **mengalami penurunan** pada triwulan III 2025 khususnya pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, *real estate*, dan jasa lainnya yang tercermin dari nilai *likert scale* sebesar -0,58, **lebih rendah** dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,18. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya permintaan di industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, dan perikanan, *real estate*, dan jasa lainnya yang berdampak pada berkurangnya pesanan dan produksi di berbagai perusahaan. Akibatnya, beberapa perusahaan di Kepri melakukan langkah-langkah efisiensi, baik melalui otomasi, peningkatan produktivitas, maupun pergeseran pola rekrutmen menjadi kontrak atau *outsourc*e. Selain itu, kenaikan tingkat upah yang cukup signifikan sekitar 6,5% pada tahun 2025 juga turut berkontribusi dalam penurunan jumlah tenaga kerja di triwulan ini karena beberapa perusahaan merasa nominal tersebut cukup tinggi.



BOKS 2

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Upaya Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi regional dan wilayah Sumatera. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura serta selat Malaka menempatkan Kepri sebagai titik strategis dalam arus perdagangan global. Pada triwulan III tahun 2025 perekonomian Kepri tumbuh sebesar 7,48% (yoy), sehingga tercatat menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera dan tertinggi ketiga secara Nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, serta perdagangan dengan nilai *share* masing-masing sebesar 40,54%, 19,70%, 11,06%, dan 9,40%. Secara historis menunjukkan bahwa struktur PDRB Kepri sangat khas dan berorientasi pada sektor manufaktur (industri pengolahan)

Status Kawasan *Free Trade Zone* di Batam, Bintan, dan Karimun menjadikan Provinsi Kepri dengan struktur ekonomi sangat terbuka dan terintegrasi global. Namun karakternya juga membuat Kepri rentan terhadap siklus eksternal diantaranya permasalahan permintaan global, perubahan kebijakan dagang negara mitra, atau gangguan rantai pasok. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan akademisi melakukan penelitian dengan menempatkan model *Computable General Equilibrium* (CGE) sebagai alat analitis yang mampu melacak interaksi antar sektor – antar wilayah – antar pelaku secara simultan. Aplikasi CGE multi-regional seperti TERM/IndoTERM relevan bagi Indonesia karena dapat menangkap informasi perdagangan antar wilayah, perbedaan produktivitas, serta biaya transport yang membentuk disparitas spasial dan propagasi kebijakan.

STRATEGI SIMULASI

Berdasarkan kerangka konseptual *Multi-pronged growth strategy*, diidentifikasi empat jalur pertumbuhan potensial yang akan disimulasikan, yakni: (1) akselerasi sektor industri peralatan elektronik sebagai *benchmark*; (2) pengembangan jasa keuangan, termasuk pengembangan *International Financial Center*; (3) transformasi ekonomi digital melalui sektor teknologi informasi dan telekomunikasi; dan (4) hilirisasi perikanan dan pengolahan makanan.

Empat jalur dimaksud disimulasikan dengan skenario shock berupa tambahan investasi, peningkatan permintaan domestik, dan peningkatan permintaan ekspor sehingga terdapat 9 model yang dijalankan dengan rincian sebagai berikut:

HASIL SIMULASI

Nilai investasi yang mampu meningkatkan tambahan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 0,5 poin persentase per tahun (relatif terhadap *baseline*) pada sektor industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik (SIM-C1), ternyata menghasilkan tambahan pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil apabila dialihkan ke sektor lain tanpa disertai kebijakan tambahan.

Pada sektor jasa keuangan (SIM-B1), tambahan pertumbuhan hanya mencapai 0,43 poin persentase diatas *baseline*; pada sektor jasa teknologi informasi dan komunikasi (SIM-C1) sebesar 0,38 poin persentase lebih tinggi dari *baseline*; dan pada sektor perikanan sebesar 0,18 poin persentase lebih tinggi dari *baseline* apabila difokuskan hanya pada sisi hilir (SIM-D1), atau 0,32 poin persentase jika investasi dibagi antara sisi hulu dan hilir (SIM-D2).

Tabel B2.1 Skenario simulasi CGE

No	Simulasi	Shock	Besaran
1	Sim A - Elektronik	Tambahan investasi	14,55% (yoy)
2	Sim B1 - Jasa Keuangan	Tambahan investasi	39,97% (yoy)
3	Sim B2 - Jasa Keuangan	Tambahan investasi	39,97% (yoy)
		Peningkatan permintaan domestik	19,50% (yoy)
4	Sim B3 - Jasa Keuangan	Tambahan investasi	39,97% (yoy)
		Peningkatan permintaan ekspor	71,00% (yoy)
5	Sim C1 - Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tambahan investasi jasa teknologi informasi	33,93% (yoy)
		Tambahan investasi jasa telekomunikasi	36,22% (yoy)
		Tambahan investasi jasa teknologi informasi	33,93% (yoy)
		Tambahan investasi jasa telekomunikasi	36,22% (yoy)
6	Sim C2 - Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan permintaan ekspor jasa teknologi informasi	40,50% (yoy)
		Peningkatan permintaan ekspor jasa telekomunikasi	40,50% (yoy)
7	Sim D1 - Perikanan dan Hilirisasi Industri Pengolahan Makanan Laut	Tambahan investasi perikanan	45,95% (yoy)
8	Sim D2 - Perikanan dan Hilirisasi Industri Pengolahan Makanan Laut	Tambahan investasi perikanan	34,12% (yoy)
		Tambahan investasi pengolahan makanan	22,99% (yoy)
9	Sim D3 - Perikanan dan Hilirisasi Industri Pengolahan Makanan Laut	Tambahan investasi perikanan	34,12% (yoy)
		Tambahan investasi pengolahan makanan	22,99% (yoy)
		Peningkatan ekspor pengolahan makanan	36,00% (yoy)

BAB II

Perkembangan Keuangan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw III
2025

64,08%
Rp9,32 T



Tw III
2024

68,19%
Rp10,31 T

Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw III
2025

58,71%
Rp8,67 T



Tw III
2024

58,92%
Rp9,46 T

Realisasi Belanja APBN



Tw III
2025

61,67%
Rp10,18 T



Tw III
2024

63,70%
Rp11,87 T

Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw III
2025

29,45%
Rp324,43 M



Tw III
2024

49,35%
Rp911,78 M



Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan III 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan III 2024, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.

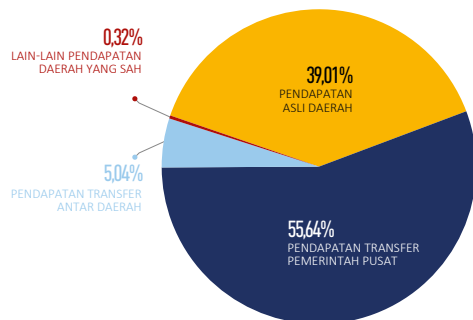


Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2025 tercatat sebesar 64,08%, sementara realisasi belanja mencapai 58,71% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 68,19%, sedangkan realisasi belanja lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 58,92%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah. Sementara, pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan dibandingkan triwulan III tahun lalu. Di sisi lain, penurunan realisasi belanja disebabkan oleh penurunan pada pos Belanja Operasi, Belanja tidak terduga, dan Belanja Transfer.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

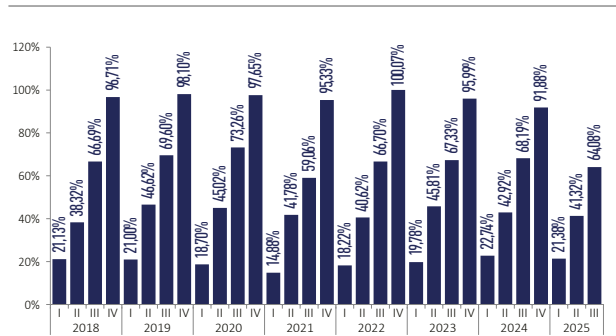
Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Kepri pada triwulan III 2025 mencapai 64,08% dari total anggaran atau sebesar Rp9,32 triliun. Persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 68,19% dari total anggaran atau sebesar Rp10,31 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan realisasi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian, penurunan realisasi anggaran yang lebih dalam tertahan dengan peningkatan persentase pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan III 2025 mencapai Rp5,19 triliun atau sebesar 62,26% dari pagu anggaran dan memiliki pangsa anggaran pendapatan dengan porsi terbesar yakni sebesar 55,46% dari pagu anggaran. Capaian tersebut secara persentase lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 69,31% dari pagu. Penurunan tersebut terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Realisasi Dana Perimbangan sampai triwulan III 2025 mencapai 61,57% dari pagu anggaran, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 68,73%. Hal ini didorong oleh realisasi pendapatan pada pos tersebut



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan III 2025



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan III 2025

lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 seiring dengan penurunan pagu pendapatan dari transfer pemerintah pusat ke daerah. Dana Desa tercatat realisasi sebesar 85,39% pada triwulan III 2025, lebih rendah dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya yang dapat mencapai 89,73%. Dengan demikian, dari sisi nominal realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp6,41 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp5,19 triliun pada triwulan III 2025.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan III 2025 tercatat sebesar 65,86%, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang tercatat terealisasi 68,46% dari pagu anggaran. Secara nominal realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,64 triliun, menjadisebesar Rp3,37 triliun pada triwulan III 2025. Peningkatan persentase realisasi terutama disebabkan oleh peningkatan dari pos anggaran Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Retribusi Daerah meningkat mencapai 61,76% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 55,04%. Selain itu, realisasi pos Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan naik dari 49,59% pada triwulan III 2024 menjadi 96,07% pada triwulan III 2025. Lebih lanjut, realisasi pada pos Lain-Lain PAD yang Sah meningkat menjadi 106,10% dari pagu anggaran sebesar Rp261,45 miliar pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang terealisasi 47,76% dari pagu anggaran sebesar Rp652,11 miliar.

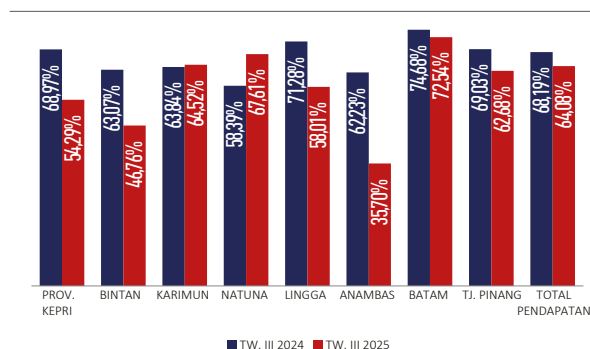
Peningkatan capaian PAD yang lebih tinggi tertahan akibat penurunan realisasi pos Pajak Daerah yang tercatat 63,91%, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya tercatat 74,06%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pada pos Pajak Daerah di triwulan III 2025 meningkat menjadi sebesar Rp2,91 triliun dari pagu anggaran Rp4,56 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp2,74 triliun dari pagu anggaran Rp3,70 triliun. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan ekspektasi pendapatan daerah, bukan penurunan kinerja di tengah kebijakan realokasi anggaran yang terjadi di semester I 2025.

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2025

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	Porsi (%)
Pendapatan Asli Daerah	5.520,49	37,95%	3.635,74	65,86%	39,01%
Pajak Daerah	4.557,62	31,33%	2.912,94	63,91%	
Retribusi Daerah	665,85	4,58%	411,25	61,76%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	35,56	0,24%	34,16	96,07%	
Lain-lain PAD yang Sah	261,45	1,80%	277,39	106,10%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.329,86	57,27%	5.186,14	62,26%	55,64%
Dana Perimbangan	7.994,15	54,96%	4.921,91	61,57%	
Dana Insentif Fiskal	117,72	0,81%	78,08	0,00%	
Dana Desa	218,00	1,50%	186,15	85,39%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	653,58	4,49%	469,71	71,87%	5,04%
Pendapatan Bagi Hasil	644,68	4,43%	469,71	72,86%	
Bantuan Keuangan	8,90	0,06%	0,00	0,00%	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	41,78	0,29%	29,38	70,31%	0,32%
Hibah	1,32	0,01%	1,35	0,00%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	40,46	0,28%	28,03	69,27%	
TOTAL PENDAPATAN	14.545,71	100,00%	9.320,97	64,08%	

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)
* Pada tahun 2023, merupakan Dana Insentif Daerah yang pada tahun 2024 berganti menjadi Dana Insentif Fiskal
**Bantuan Keuangan pada tahun 2024 tidak dianggarkan

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan III 2025 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp3,12 triliun atau 72,54% dari total anggaran. Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 35,40% dari total realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepri sehingga persentase realisasi Kota Batam mempengaruhi persentase realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Natuna yang tercatat mencapai sebesar Rp684 miliar atau 67,61% dari pagu anggaran. Selanjutnya, capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Karimun yang tercatat sebesar Rp811 miliar atau 64,52% dari pagu anggaran tahun ini. Total Realisasi pendapatan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Riau mencapai 64,08% dari pagu anggaran.



Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda di wilayah Kepri sampai dengan triwulan III 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan III 2025 mencapai 58,71% dari pagu anggaran atau sebesar Rp8,66 triliun. Pencapaian realisasi belanja yang menurun secara persentase terutama terjadi pada pos Belanja Operasi, pos Belanja Tidak Terduga, dan pos Belanja Transfer secara berturut tercatat 62,32%, 8,23%, dan 72,65% pada triwulan III 2024 menjadi 61,77%, 4,58%, dan 68,49% triwulan III 2025. Sementara itu, realisasi pada pos Belanja Modal tercatat mengalami peningkatan masing-masing dari 34,35% pada triwulan III 2024 menjadi 36,64% triwulan III 2025. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Operasi dengan porsi 82,25%, diikuti Belanja Transfer sebesar 9,67%, Belanja Modal sebesar 8,02%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,05%. Secara nominal, total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp14,77 triliun, lebih rendah dibandingkan total keseluruhan pagu anggaran belanja pada tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp16,06 triliun. Hal ini sejalan dengan semangat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana arahan Presiden RI.

Realisasi Belanja Operasi tercapai sebesar 61,77% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp7,13 triliun. Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah baik secara nominal maupun presentase dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mampu mencapai 62,32% atau Rp7,67 triliun. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Operasi didominasi pos Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang

terbesar dengan porsi 51,38% dari pagu anggaran pos Belanja Operasi, terealisasi mencapai 66,73% atau sebesar Rp4,32 triliun. Realisasi pada pos Belanja Pegawai secara nominal meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp4,16 triliun. Penurunan realisasi pos Belanja Operasi tertahan oleh peningkatan realisasi pos Belanja Barang dan Jasa yang tercatat sebesar 54,46% dari pagu anggaran lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 52,47%. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pada pos Belanja Barang dan Jasa di triwulan III 2025 mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya pagu pada pos Belanja Barang dan Jasa yakni tercatat sebesar Rp2,45 triliun lebih rendah dari triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp2,85 triliun. Hal ini mengindikasikan penggunaan biaya untuk belanja barang dan jasa lebih efisien, sejalan dengan arahan presiden untuk realokasi belanja daerah.

Persentase realisasi Belanja Modal pada triwulan III 2025 tercatat 36,64% dari pagu anggaran, tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2024. Secara umum, persentase realisasi pos Belanja Modal mengalami peningkatan. Meskipun demikian, secara nominal pagu pada pos Belanja Modal mengalami penurunan menjadi Rp1,90 triliun pada tahun 2025, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat Rp2,36 triliun. Pangsa Pos Belanja Modal sebesar 8,27% terhadap

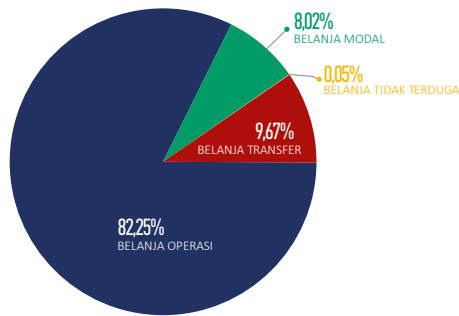
seluruh pos anggaran belanja, atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 8,58%. Realisasi pos Belanja Modal pada triwulan III 2025 secara nominal tercatat melandai yakni sebesar Rp695,19 miliar lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp811,91 miliar. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

Pagu pos Belanja Transfer pada triwulan III 2025 tercatat Rp1,23 triliun lebih rendah dibandingkan pagu pada triwulan III 2024 yang tercatat Rp1,34 triliun. Realisasi Belanja Transfer pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp838,63 miliar atau 68,49% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp972,14 miliar atau 72,65% dari pagu anggaran. Hal ini didorong dengan realisasi pada pos Belanja Bantuan Keuangan yang tercatat 60,72% dari pagu anggaran lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 69,76%. Penurunan realisasi pada pos Belanja Transfer tertahan oleh realisasi pada pos Belanja Bagi Hasil yang tercatat 74,83%, lebih tinggi dari realisasi pada triwulan III tahun 2024 yang tercatat 74,10%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan pengetatan atau efisiensi anggaran pada pos yang sifatnya transfer ke pihak lain sebagai respon dari kebijakan pemerintah pusat dalam realokasi anggaran sehingga terjadi pergeseran prioritas belanja untuk lebih fokus ke program strategis.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2025

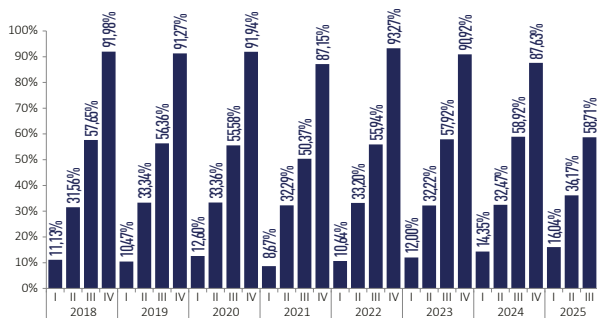
Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	11.543,33	78,17%	7.130,55	61,77%	82,25%
Belanja Pegawai	6.471,74	43,83%	4.318,74	66,73%	49,82%
Belanja Barang dan Jasa	4.501,17	30,48%	2.451,41	54,46%	28,28%
Belanja Bunga	1,11	0,01%	0,00	0,00%	
Belanja Subsidi	13,01	0,09%	1,48	11,41%	
Belanja Hibah	533,81	3,62%	348,93	65,37%	
Belanja Bantuan Sosial	22,48	0,15%	9,99	44,44%	
Belanja Modal	1.897,39	12,85%	695,19	36,64%	8,02%
Belanja Modal Tanah	4,72	0,03%	2,75	58,21%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	505,89	3,43%	206,03	40,73%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	594,27	4,02%	142,28	23,94%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	726,67	4,92%	302,65	41,65%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61,20	0,41%	39,60	64,71%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4,63	0,03%	1,87	40,36%	
Belanja Tidak Terduga	101,35	0,69%	4,58	4,52%	0,05%
Belanja Transfer	1.224,50	8,29%	838,63	68,49%	9,67%
Belanja Bagi Hasil	673,94	4,56%	504,33	74,83%	
Belanja Bantuan Keuangan	550,56	3,73%	334,30	60,72%	
TOTAL BELANJA	14.766,57	100,00%	8.668,95	58,71%	
SURPLUS/DEFISIT	-220,86		652,03		
Pembiayaan Neto	232,99		304,23	35,59%	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	240,49		304,23	34,22%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7,50		0,00	24,06%	
SILPA TAHUN BERKENAAN	12,13		956,26		

Sumber: BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

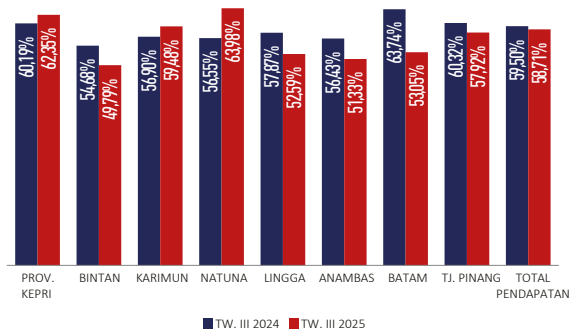
Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan I 2025



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan I 2025

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi total realisasi belanja pada triwulan III 2025 pemerintah daerah se-Provinsi Kepri mencapai 58,17% dari pagu anggaran. Secara persentase, pencapaian realisasi Belanja pemerintah daerah se-Provinsi Kepri tertinggi dicapai oleh Kabupaten Natuna, diikuti persentase realisasi belanja Provinsi Kepri dan persentase realisasi belanja Kabupaten Karimun. Capaian realisasi abupaten Natuna yang tercatat 63,98% dari total anggaran atau sebesar Rp698,66 miliar. Adapun secara nominal, capaian realiasi belanja Pemerintah Provinsi Kepri dengan jumlah belanja sebesar Rp2,36 triliun atau 62,35% dari total anggaran. Capaian realiasi belanja Kabupaten Karimun tercatat 59,48% dari total anggaran atau sebesar Rp777,46 miliar.



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

Secara keseluruhan pada 2025, target pendapatan APBN di Kepri meningkat, namun target belanja APBN tercatat menurun dibandingkan tahun 2024 sejalan dengan kebijakan realokasi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Pada tahun 2025, target Pendapatan APBN mengalami peningkatan tercatat sebesar Rp18,05 triliun dari Rp14,92 triliun pada tahun 2024. Sementara, target Belanja APBN mengalami penurunan menjadi sebesar Rp16,50 triliun dari Rp18,64 triliun pada tahun 2024. Peningkatan target anggaran Pendapatan terutama terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dengan target menjadi Rp15,38 triliun. Sementara, penurunan anggaran Belanja terutama terjadi pada pos anggaran Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp8,46 triliun pada triwulan III 2025 dari Rp10,45 triliun pada triwulan III 2024.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan III 2025 tercatat 54,24% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 67,33% dari pagu anggaran. Persentase realisasi yang menurun ini terjadi pada pos Penerimaan Perpajakan dan pos PNBPN sejalan dengan target pendapatan yang meningkat. Persentase realisasi pada pos Penerimaan Perpajakan tercatat 50,94% dari pagu lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang mencapai 61,98% dari pagu. Begitupula pada pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang persentase realisasinya tercatat 73,20% pada triwulan III 2025 lebih rendah dari 91,50% pada triwulan III 2024. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pendapatan APBN tercatat sebesar Rp7,84 triliun meningkat dari triwulan III 2024 yang tercatat sebesar Rp6,95 triliun sejalan dengan peningkatan target pendapatan APBN. Hal ini menunjukkan optimisme pemerintah daerah terhadap ekspansi ekonomi yang diharapkan terdapat peningkatan nominal realisasi yang menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat.

Dengan target penerimaan pajak yang meningkat pada tahun 2025, secara umum pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 3,50% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan realisasi pada pos Pajak Lainnya yang tercatat Rp935,06 miliar, Pajak Perdagangan Internasional yang tercatat Rp634,86 miliar, Cukai yang tercatat Rp47,99 miliar, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat Rp6,06 miliar, tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Di sisi lain, persentase realisasi pendapatan APBN pada pos PNBPN triwulan III 2025 tercatat mengalami kontraksi 20,92% (yoy), atau sebesar Rp1,96 triliun. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2024 yang tercatat 91,50% dari target atau sebesar Rp2,48 triliun. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Pendapatan BLU yang terkontraksi, tercatat Rp1,34 triliun pada triwulan III 2025, lebih rendah dari triwulan III 2024 yang tercatat Rp1,91 triliun, sejalan dengan penurunan target dari pos Pendapatan BLU. Sementara, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi pada PNBPN Lainnya yang tercatat Rp616,90 miliar atau 118,04% dari target, tumbuh 9,45% (yoy).

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

Uraian		2024 (Miliar Rp)			2025 (Miliar Rp)			Pertumbuhan %
		Pagu	Realisasi Triwulan III 2024	% Realisasi	Target	Realisasi Triwulan III 2025	% Realisasi	
A. Pendapatan Negara		14.923,24	10.048,29	67,33%	18.057,69	9.794,85	54,24%	-2,52%
I	Penerimaan Perpajakan	12.216,15	7.571,34	61,98%	15.381,79	7.836,12	50,94%	3,50%
1	Pajak Dalam Negeri	11.656,95	7.249,99	62,19%	14.945,52	7.201,26	48,18%	-0,67%
a.	Pajak Penghasilan	10.301,22	6.461,67	62,73%	10.927,67	5.677,85	51,96%	-12,13%
b.	Pajak Pertambahan Nilai	1.205,55	689,04	57,16%	3.960,47	534,31	13,49%	-22,46%
c.	Pajak Bumi dan Bangunan	29,39	5,31	18,07%	13,41	6,06	45,17%	14,05%
d.	Cukai	37,40	26,77	71,59%	33,30	47,99	144,10%	79,25%
e.	Pajak Lainnya	83,39	67,19	80,58%	10,66	935,06	8769,99%	1291,60%
2	Pajak Perdagangan Internasional	559,20	321,35	57,47%	436,28	634,86	145,52%	97,56%
II	PNBP	2.707,09	2.476,95	91,50%	2.675,90	1.958,72	73,20%	-20,92%
1	Pendapatan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Pendapatan BLU	2.311,07	1.913,32	82,79%	2.153,28	1.341,83	62,32%	-29,87%
4	PNBP Lainnya	396,02	563,63	142,33%	522,61	616,90	118,04%	9,45%
III	Hibah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B. Belanja Negara		18.635,93	11.871,84	63,70%	16.507,73	10.179,88	61,67%	-14,25%
I.	Belanja Pemerintah Pusat	10.454,64	5.730,98	54,82%	8.462,38	4.149,70	49,04%	-27,59%
1	Belanja Pegawai	2.263,90	1.697,37	74,98%	2.362,38	1.774,22	75,10%	4,53%
2	Belanja Barang	4.780,26	2.642,85	55,29%	4.270,00	1.966,58	46,06%	-25,59%
3	Belanja Modal	3.147,76	1.385,20	44,01%	1.572,00	400,09	25,45%	-71,12%
4	Belanja Bansos	7,82	5,56	71,10%	11,15	8,81	79,03%	58,48%
5	Belanja Lainnya	254,91	0,00	0,00%	246,86	0,00	0,00%	0,00%
II.	Transfer ke Daerah (TKD)	8.181,29	6.140,86	75,06%	8.045,35	6.030,18	74,95%	-1,80%
1	DAU	1.149,18	737,65	64,19%	1.172,77	803,19	68,49%	8,88%
2	Dana Bagi Hasil	4.817,40	3.888,52	80,72%	4.840,15	3.840,50	79,35%	-1,23%
3	DAK Fisik	648,36	289,39	44,63%	274,91	85,31	31,03%	-70,52%
4	DAK Non Fisik	1.245,31	949,48	76,24%	1.427,90	1.022,51	71,61%	7,69%
5	Dana Insentif Fiskal	227,05	213,46	94,01%	218,00	200,58	92,01%	-6,04%
6	Dana Desa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Transfer Hibah	93,99	62,35	66,34%	111,62	78,08	69,95%	25,23%
C. SURPLUS/(DEFISIT)		-3.712,69	-1.823,55	49,12%	1.549,96	-385,03	-24,84%	-78,89%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan III 2025 mencapai 61,67% dari pagu atau sebesar Rp10,17 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang mencapai 63,70% dari pagu atau sebesar Rp11,87 triliun. Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan III 2025 terkontraksi 14,25% (yoy) yang disebabkan oleh efisiensi belanja pada satuan kerja. Penurunan realisasi terjadi pada pos Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing hanya mencapai 49,04% dari target dan 74,95% dari target, lebih rendah dari triwulan III 2024 yang masing-masing tercapai 54,82% dan 75,06% dari target. Untuk komponen Belanja Pemerintah Pusat penurunan terutama terjadi pada Belanja Modal yang terkontraksi 71,12% (yoy), disusul Belanja Barang yang terkontraksi 25,59% (yoy). Di

samping itu, pada komponen Transfer ke Daerah (TKD) pada triwulan III 2025, terkontraksi sebesar 1,80% (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada DAK Fisik yang terkontraksi 70,52% (yoy), Dana Desa yang terkontraksi 6,04% (yoy), dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terkontraksi sebesar 1,23% (yoy). Sampai dengan triwulan III 2025, penurunan realisasi Belanja TKD tidak sedalam triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh relaksasi kebijakan efisiensi TKD dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran mendukung program strategis daerah dan nasional. Pada triwulan III 2025, Neraca APBN menunjukkan defisit sebesar Rp385,03 miliar.

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 29,45% atau Rp324,43 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 49,35% atau sebesar Rp911,78 miliar. Belanja untuk proyek infrastruktur terutama untuk proyek program konektivitas laut mencapai 59,33% dari pagu anggaran atau sebesar Rp123,97 miliar. Pengembangan konektivitas laut tersebut meningkat sejalan dengan lanjutan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan pelabuhan, pengembangan pelabuhan bongkar muat Batu Ampar, pembangunan pelabuhan kapal ikan, dan peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercapai 32,83%. Sementara itu, pengembangan konektivitas udara terealisasi 13,47% dari total anggaran atau sebesar Rp8,63 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang terealisasi 75,27% dari pagu. Hal ini sejalan dengan proyek pengembangan pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo armada udara di Kota Batam yang sedang berlangsung dan pembangunan fasilitas jalan di area Bandara Hang Nadim.

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	Triwulan III 2024			Triwulan III 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	64,06	48,22	75,27%	64,06	8,63	13,47%
2	Konektivitas Laut	412,68	135,50	32,83%	208,96	123,97	59,33%
3	Konektivitas Darat	1.149,88	644,03	56,01%	623,44	112,33	18,02%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	221,08	84,03	38,01%	205,13	79,51	38,76%
Total		1.847,70	911,78	49,35%	1.101,59	324,43	29,45%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

BOKS 3

KEPRI ECONOMIC FORUM 2025: WUJUDKAN EKONOMI INKLUSI MELALUI HILIRISASI EKONOMI BIRU

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau Triwulan III pada Selasa, 4 November 2025 di Kota Batam. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan diseminasi dikemas dalam forum diskusi ekonomi yakni *Kepri Economic Forum (KEF)* yang mengusung tema “*Unlocking Kepri’s Inclusive Growth Potential through Blue Economy*”. Kegiatan KEF turut dihadiri langsung oleh berbagai instansi vertikal dan pemangku kebijakan daerah, menjadikannya sebagai sarana untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan *stakeholders* dalam mengimplementasikan kebijakan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED).



Gambar B3.1 Diseminasi Laporan Perekonomian oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri



Gambar B3.2 Sambutan Plh. Sekda Provinsi Kepri

Momentum KEF sekaligus menyambut optimisme kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang terakselerasi sebesar 7,48% (yoy) pada triwulan III 2025, mencatatkan kinerja tertinggi dalam satu dekade terakhir. Capaian ini juga menempatkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan kinerja ekonomi terbaik di wilayah Sumatera, dengan ditopang oleh lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan perdagangan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB), net ekspor dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi inflasi, tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau berhasil terjaga di angka 3,01% (yoy), masih dalam sasaran koridor $2,5 \pm 1\%$. Catatan positif perekonomian Kepri dapat terwujud karena adanya sinergi Bank Indonesia dengan lembaga terkait, salah satunya melalui TP2ED.

Di tengah optimisme perekonomian Kepri, KEF turut menghadirkan ruang diskusi untuk peluang pengembangan ekonomi biru melalui rangkaian kegiatan *talkshow*. Wilayah Kepri dengan cakupan laut seluas 96% berpotensi dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi maritim. Sektor perikanan Kepri yang mampu memproduksi 379 ribu ton menjadi angin segar dalam pengembangan sektor perikanan, khususnya dalam mewujudkan inklusivitas ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Searah dengan potensi pengembangan ekonomi biru di Kepri, dalam rangkaian kegiatan *talkshow* KEF menghadirkan akademisi dan narasumber ahli di bidang perekonomian antara lain Guru Besar FEB Universitas Padjajaran, Prof. Arief Anshory Yusuf S.E., M.Sc., Ph.D, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan, Catur Surwanto, *Chief Economist* Bank Permata, Josua Pardede, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira S.STP., M.Si. Dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari instansi pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, hingga pelajar, kegiatan KEF membuka kesempatan bagi lintas instansi untuk bersinergi dalam mewujudkan Kepri sebagai “Permata Biru di Gerbang Utara Nusantara”. Dengan keterlibatan seluruh pihak, potensi ekonomi biru dapat dikembangkan dalam mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepri.



Gambar B3.3 Opening Ceremony KEF



Gambar B3.4 Talkshow Blue Economy

BAB III

Inflasi

Provinsi Kepri (yoy)



Tw III
2025

2,70%



Tw II
2025

1,32%

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw III
2025

1,82%



Tw II
2025

0,07%

Kota Batam (yoy)



Tw III
2025

2,82%



Tw II
2025

1,68%

Kab. Karimun (yoy)



Tw III
2025

2,91%



Tw II
2025

-0,15%



Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan III 2025 sebesar 2,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,32% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran,. Dengan demikian, inflasi pada Triwulan III 2025 berada dalam target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



Inflasi Provinsi Kepri Triwulan III 2025 tercatat 2,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,32% (yoy).

Inflasi Provinsi Kepri tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya disebabkan oleh peningkatan harga yang terjadi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil 1,42% (yoy); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memberikan andil 0,78% (yoy); Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran yang memberikan andil 0,25% (yoy), Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang memberikan andil 0,17% (yoy), dan kelompok pendidikan yang memberikan andil 0,09% (yoy). Secara spasial, 2 kota dan 1 kabupaten IHK di Kepri mengalami peningkatan inflasi. Di Kota Batam inflasi tercatat lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni dari 1,68% (yoy) menjadi 2,82% (yoy). Di Kota Tanjungpinang inflasi tercatat 1,82% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,07% (yoy). Selain itu, IHK di Kabupaten Karimun juga mengalami peningkatan tercatat inflasi 2,91% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,15% (yoy). Pada saat yang sama, inflasi Nasional mengalami peningkatan dari 1,87% (yoy) menjadi sebesar 2,65% (yoy) pada Triwulan III 2025.

Secara bulanan, IHK Provinsi Kepri pada triwulan III tercatat mengalami inflasi sebesar 0,64% (mtm), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm). Inflasi bulanan yang terjadi pada triwulan III 2025 utamanya disebabkan oleh inflasi yang terjadi di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,74% (mtm) dengan andil sebesar 0,51% (mtm). Inflasi kelompok ini didorong oleh peningkatan harga cabai merah, kangkung, bayam, daging ayam ras, dan sawi hijau. Peningkatan harga cabai merah disebabkan oleh terbatasnya pasokan akibat serangan hama di sebagian sentra produksi sehingga hasil panen kurang optimal. Kenaikan harga sayuran seperti kangkung, bayam, dan sawi hijau didorong oleh pasokan yang terbatas di tengah mulai memasuki musim hujan yang menyebabkan kelembapan udara lebih tinggi dan mengakibatkan sayuran mudah busuk. Selain itu, kenaikan harga daging ayam sejalan dengan biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan harga pakan yang meningkat. Penyebab inflasi juga berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat inflasi sebesar 2,02% (mtm) dengan andil sebesar 0,14% (mtm), sejalan dengan peningkatan harga emas perhiasan seiring dengan trend harga emas global yang meningkat di tengah dinamika ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan penetapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Kelompok Pendidikan juga menjadi salah satu penyumbang inflasi yang tercatat 1,15% (mtm) dengan andil sebesar 0,08% (mtm), sejalan dengan peningkatan biaya perguruan tinggi memasuki tahun ajaran baru.

Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)

Kelompok	2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Inflasi Nasional	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	1,57	1,03	1,87	2,65
Inflasi Kepri	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70
Inflasi Tanjungpinang	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	1,53	0,07	0,07	1,82
Inflasi Batam	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	2,24	2,53	1,68	2,82
Inflasi Karimun					2,57	2,79	2,04	1,57	0,15	-0,15	2,91

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Bulanan Provinsi Kepri September 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% mtm)
1	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,27
2	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	0,13
3	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,09
4	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,09
5	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,08
6	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
7	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,03
8	Jeruk	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,02
9	Cabai Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,02
10	Kol Putih/Kubis	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,01

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Bulanan Provinsi Kepri September 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Angkutan Udara	Transportasi	-0,14
2	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,07
3	Bawang Putih	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,02
4	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
5	Buncis	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
6	Tomat	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
7	Udang Basah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
8	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
9	Daun Seledri	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
10	Sawi Putih/Pecay/Pitsai	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.4 Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi Kepri September 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% yoy)
1	Emas Perhiasan	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	0,70
2	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,32
3	Sigaret Kretek Mesin (Skm)	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,12
4	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,12
5	Minyak Goreng	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,09
6	Akademi/Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,08
7	Nasi Dengan Lauk	Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	0,07
8	Santan Segar	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,07
9	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06
10	Daging Sapi	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.5 Penyumbang Deflasi Tahunan Provinsi Kepri September 2025

No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Angkutan Udara	Transportasi	-0,22
2	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,03
3	Bawang Putih	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,03
4	Bensin	Transportasi	-0,03
5	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,02
6	Susu Bubuk Untuk Balita	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
7	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
8	Baju Kaos Tanpa Kerah/ T-Shirt Pria	Pakaian Dan Alas Kaki	-0,01
9	Ikan Bawal	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
10	Sabun Cair/Cuci Piring	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

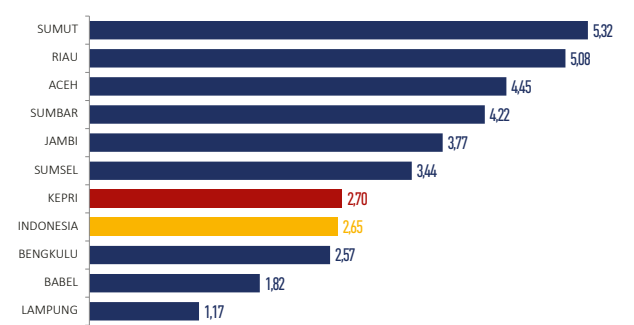
Inflasi Provinsi Kepri pada Triwulan III 2025 tercatat 2,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,32% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan Inflasi Nasional sebesar 2,65% (yoy) dan tetap terkendali dan berada di sekitar kisaran sasaran inflasi tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 2,5±1% (yoy).

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, peningkatan tekanan inflasi Provinsi Kepri pada Triwulan III 2025 disebabkan oleh peningkatan andil inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan andil inflasi sebesar 1,42% (yoy) yang sebelumnya tercatat menyumbangkan andil deflasi sebesar 0,14% (yoy) berbalik arah dari triwulan sebelumnya. Kelompok Perawatan dan Jasa Pribadi Lainnya juga mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,78% (yoy). Secara tahunan, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran juga mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,25% (yoy). Sedangkan pada Kelompok Pendidikan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,09% (yoy) lebih tinggi dan berbeda arah dari triwulan II 2025, yang tercatat deflasi sebesar 0,13% (yoy).

Tabel 3.6 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% yoy)

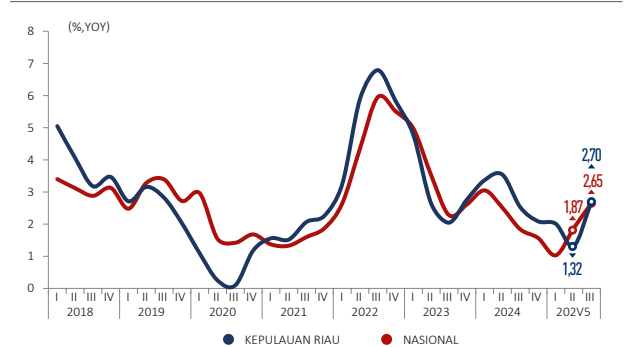
No	Kelompok	2024								2025					
		I		II		III		IV		I		II		III	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46	0,72	2,46	0,69	2,31	-0,14	-0,48	1,42	4,86
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51	0,10	2,11	0,06	1,19	0,02	0,41	0,05	1,12
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42	0,42	2,65	0,25	1,61	0,45	2,84	0,17	1,04
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10	-0,01	-0,22	-0,01	-0,25	0,00	-0,03	-0,01	-0,18
5	Kesehatan	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62	0,10	4,24	0,01	0,52	0,03	1,07	0,04	1,66
6	Transportasi	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39	0,30	2,13	0,24	1,71	0,17	1,25	-0,09	-0,66
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04	-0,01	-0,10	-0,01	-0,10	-0,01	-0,12	-0,01	-0,09
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14	0,01	0,38	0,01	0,73	0,01	0,54	0,01	0,53
9	Pendidikan	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92	-0,13	-1,84	-0,13	-1,87	-0,13	-1,84	0,09	1,40
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51	0,13	1,42	0,29	3,07	0,23	2,45	0,25	2,57
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50	0,46	7,53	0,61	10,03	0,69	11,06	0,78	12,40
Umum		3,37		3,54		2,53		2,09		2,01		1,32		2,70	

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber: BPS (data diolah)

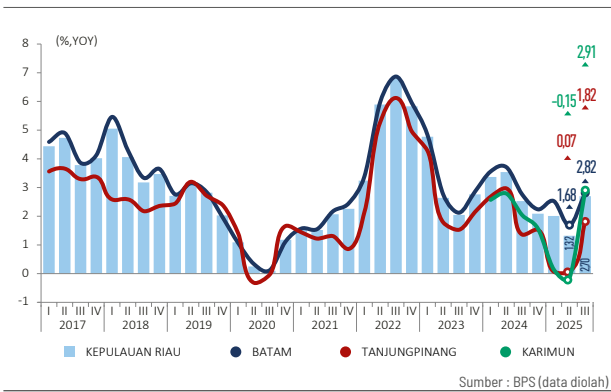
Grafik 3.1 Inflasi Triwulan III 2025 Regional Sumatera (% yoy)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan III 2025 (% yoy)

Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan minuman dan tembakau memberikan andil inflasi 1,42% (yoy) disebabkan oleh peningkatan harga komoditas cabai merah sebesar 0,32%, (yoy), minyak goreng 0,09% (yoy), santan segar 0,07% (yoy), kangkung 0,06% (yoy), dan daging sapi 0,06% (yoy). Selain itu, inflasi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya didorong oleh peningkatan harga perhiasan sejalan dengan harga emas global yang memiliki tren meningkat akibat semakin tingginya risiko ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di tengah penetapan tarif resiproskal Amerika Serikat.



Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA/KABUPATEN

Secara spasial, ketiga Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun pada Triwulan III 2025 tercatat mengalami inflasi. Kota Batam mencatatkan peningkatan angka inflasi dari yang sebelumnya 1,68% (yoy) menjadi 2,82% (yoy). Begitu pula di Kabupaten Karimun yang tercatat mengalami inflasi 2,91% (yoy) lebih tinggi dan berbeda arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,15% (yoy). Tekanan Inflasi juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang tercatat sebesar 1,82% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 0,07% (yoy). Dengan demikian, inflasi di Provinsi Kepri tercatat sebesar 2,70% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,32% (yoy).

3.2.1 Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada Triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 2,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,68% (yoy). Tekanan Inflasi kota Batam secara tahunan ini disebabkan oleh andil inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat memiliki andil 1,41% (yoy) atau meningkat dari -0,04% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Inflasi pada Triwulan III 2025 didorong oleh peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga terjadi secara bulanan. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami inflasi, tercatat 13,62% (yoy) dengan andil 0,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat inflasi 12,32% (yoy) dengan andil 0,74% (yoy).

Secara bulanan, Kota Batam tercatat inflasi sebesar 0,62% (mtm), terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Pendidikan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada September 2025 tercatat mengalami inflasi 1,78% (mtm) dengan memberikan andil 0,51% (mtm). Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan harga komoditas yang dominan antara lain cabai merah yang memberikan andil sebesar 0,25% (mtm); kangkung sebesar 0,10% (mtm); bayam sebesar 0,10% (mtm); daging ayam ras sebesar 0,06% (mtm); dan jeruk sebesar 0,03% (mtm). Tekanan inflasi meningkat pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang turut mengalami

inflasi sebesar 2,20% (mtm) dengan andil 0,15% (mtm) sejalan dengan kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil 0,04% (mtm) seiring dengan keberlanjutan dinamika ketidakpastian global. Selain itu, tekanan inflasi meningkat Kelompok Pendidikan yang tercatat inflasi 1,14% (mtm) dengan andil 0,08% (mtm) sejalan dengan periode pendaftaran ulang dan tahun ajaran baru pada September 2025. Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan dengan penurunan harga pada Kelompok Transportasi yang tercatat deflasi 1,19% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,16% (mtm) seiring dengan telah memasuki fase *low season*.

3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada Triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 1,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,07% (yoy). Tekanan inflasi yang meningkat didorong oleh inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat 4,18% (yoy) dengan andil 1,17% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kenaikan harga komoditas pokok seperti cabai merah, santan segar, Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng, ikan tongkol/ambu-ambu, ikan asin teri, dan ikan selar/tude.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami peningkatan inflasi menjadi 10,53% (yoy) dengan andil 0,66% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 9,18% (yoy) dengan andil 0,56% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan keberlanjutan ketidakpastian kondisi geopolitik. Kelompok Transportasi juga tercatat inflasi 1,50% (yoy) dengan andil inflasi 0,22% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang tercatat inflasi 1,82% (yoy) dengan andil inflasi 0,26% (yoy). Inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga mobil dengan andil 0,08% (yoy). Lebih lanjut, Kelompok Pendidikan juga tercatat inflasi sebesar 2,91% (yoy) dengan andil 0,13% (yoy), terutama disebabkan oleh kenaikan biaya Akademi/Perguruan Tinggi pada tahun ajaran baru 2025-2026.

3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada Triwulan III 2025 mengalami inflasi sebesar 2,91% (yoy), lebih tinggi dan berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,15% (yoy). Tekanan inflasi yang meningkat tersebut disebabkan oleh peningkatan andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat mengalami peningkatan andil dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,55% (yoy) menjadi inflasi 1,87% (yoy) seiring dengan peningkatan harga komoditas pangan, seperti cabai merah 0,53% (yoy), ikan kembung 0,21% (yoy), kangkung 0,11% (yoy), Sigaret Kretek Mesin (SKM) 0,09% (yoy), ikan mata besar 0,09% (yoy), dan kol putih/kubis 0,08% (yoy). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga mengalami peningkatan inflasi menjadi 5,87% (yoy) dengan andil 0,46% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 4,29% (yoy) dengan andil 0,34% (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan tren peningkatan harga emas global di tengah tensi perang dagang yang masih berlanjut.

Tabel 3.7 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	II-2024			III-2024			IV-2024			I-2025			II-2025			III-2025		
Kelompok Komoditas	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,88	1,79	1,86	0,97	0,77	1,59	0,64	1,01	1,09	0,77	0,47	0,31	-0,04	-0,33	-0,53	1,41	1,17	1,87
Pakaian dan Alas Kaki	0,20	-0,18	0,23	0,16	-0,16	0,12	0,15	-0,25	0,10	0,12	-0,39	0,07	0,09	-0,49	0,07	0,13	-0,47	0,15
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,18	-0,01	0,01	0,51	-0,01	-0,14	0,55	0,01	-0,12	0,55	-0,90	-0,73	0,56	0,09	-0,11	0,19	0,09	0,03
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,02	0,03	-0,04	0,00	0,04	-0,02	0,00	0,04	-0,12	-0,01	0,00	-0,05	0,01	-0,03	-0,08	0,00	-0,03	-0,07
Kesehatan	0,07	0,14	0,15	0,07	0,15	0,19	0,09	0,16	0,18	0,01	0,04	0,02	0,02	0,05	0,01	0,05	0,05	0,01
Transportasi	0,65	0,36	0,01	0,57	0,16	0,04	0,33	0,15	0,19	0,22	0,38	0,21	0,16	0,26	-0,11	-0,17	0,22	0,17
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,03	0,00	-0,01	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,01	0,00	0,03	-0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02
Pendidikan	0,19	0,15	0,00	-0,11	-0,14	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	-0,11	-0,11	-0,34	-0,11	-0,09	-0,34	0,09	0,13	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,13	0,39	0,31	0,11	0,16	0,41	0,11	0,12	0,42	0,31	0,12	0,33	0,24	0,04	0,42	0,27	0,02	0,28
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,43	0,31	0,25	0,49	0,37	0,19	0,50	0,38	0,19	0,66	0,46	0,35	0,74	0,56	0,34	0,84	0,66	0,46
Umum	3,71	2,97	2,79	2,76	1,36	2,04	2,24	1,53	1,57	2,53	0,07	0,15	1,68	0,07	-0,15	2,82	1,82	2,91

Sumber: BPS (data diolah)

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat inflasi sebesar 3,99% (yoy) dengan andil 0,28% (yoy), terutama disebabkan oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dengan andil inflasi 0,18% (yoy), dan sate, ayam goreng, ketupat/lontong sayur, dan bakso siap santap yang masing-masing tercatat inflasi dengan andil 0,02% (yoy). Lebih lanjut, Kelompok Transportasi juga tercatat inflasi 1,41% (yoy) dengan andil 0,17% (yoy), lebih tinggi dan berbeda arah dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,93% (yoy) dengan andil 0,11% (yoy). Tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi meningkat terutama disebabkan oleh kenaikan harga jasa angkutan penumpang yang dominan berasal dari komoditas tarif angkutan laut yang tercatat andil 0,12% (yoy).

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Kepri pada Triwulan III 2025 diperkirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2025 yakni 2,5±1%, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada Triwulan III 2025 diperkirakan berada di titik tengah sasaran inflasi nasional seiring dengan normalisasi harga angkutan udara memasuki *low season* mobilisasi masyarakat pasca tingginya permintaan pada arus balik HBKN Idul Fitri, arus perjalanan pada HBKN Idul Adha dan momen libur *long weekend* di triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi juga diperkirakan lebih tertahan akibat periode panen di sejumlah daerah sentra pemasok komoditas utama di Kepri sehingga pasokan bahan pangan strategis diperkirakan terjaga. Di sisi lain, perlu diwaspadai risiko tekanan inflasi pada peningkatan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global di tengah tensi perang dagang yang masih berlanjut.

Berdasarkan realisasi inflasi hingga bulan Oktober 2025, Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,64% (mtm). Sementara itu, capaian inflasi secara tahunan tercatat sebesar 3,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2,70% (yoy). Inflasi pada Oktober 2025 terutama disebabkan oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi 3,88% (mtm) dengan andil sebesar 0,27% (mtm) sejalan dengan peningkatan harga emas global yang masih memiliki tren meningkat di tengah ketegangan geopolitik, kompetisi perdagangan, dan ketidakpastian global yang masih berlanjut. Lebih lanjut, Kelompok Transportasi mengalami inflasi 0,55% (mtm) dengan andil 0,07% (mtm) sejalan dengan meningkatnya permintaan angkutan udara pasca periode *low season* di bulan September. Selain itu, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran turut mengalami inflasi 0,30% (mtm) dengan andil sebesar 0,03% (mtm) didorong oleh kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, udang basah, dan ikan selar yang turut mendorong naik harga makanan olahan restoran. Di sisi lain, inflasi bulanan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami deflasi 0,18% (mtm) dengan memberikan andil deflasi 0,04% (mtm) didominasi komoditas kangkung, bayam, cabai rawit, buncis, dan daging ayam ras. Penurunan harga komoditas pangan didorong oleh pasokan yang terjaga di Provinsi Kepri.

Tekanan inflasi pada keseluruhan tahun diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan sebelumnya. Sejumlah risiko inflasi hingga akhir tahun 2025 yang dapat meningkatkan tekanan inflasi antara lain: (i) Tensi perang dagang akibat tarif resiproskal; (ii) Transmisi harga impor ke harga jual domestik sejalan dengan nilai

tukar yang terdepresiasi; dan (iii) Dampak lanjutan kenaikan tarif listrik di Kota Batam. Di sisi lain, faktor yang dapat menahan peningkatan inflasi antara lain: (i) Tekanan inflasi kelompok *administered price* yang diperkirakan terkendali sejalan dengan harga tiket angkutan udara yang berada dalam batas normal seiring dengan normalisasi mobilitas; (ii) Ekspektasi inflasi tetap terkendali didukung oleh konsistensi bauran kebijakan; (iii) Berlanjutnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) pengendalian inflasi daerah tahun 2025, berbagai upaya dilakukan termasuk melalui strategi implementasi kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III 2025 antara lain:

A. Keterjangkauan Harga

1. Sinergi penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah sebanyak 12 kali di Provinsi Kepri hingga September 2025.
2. Sinergi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah sebanyak 37 kali di berbagai wilayah Provinsi Kepri.
3. Sidak pasar rutin untuk stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
4. Pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan dalam rangka HBKN Idul Adha.
5. Koordinasi penyelenggaraan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah/Sembako Bersubsidi.
6. Pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kepulauan Anambas, Tanjungpinang, dan Bintan.

B. Ketersediaan Pasokan

1. Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) eksisting baik antar maupun intra provinsi. Terdapat penambahan 9 KAD baru dengan skema Business-to-Business untuk komoditas bawang merah, beras, dan cabai
2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan *Capacity Building* KAD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Lampung, dan Maluku Utara.
3. Penguatan peran Asosiasi Distributor TPID Batam dalam penyediaan pasokan.
4. Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pendukung produktivitas pangan untuk ketahanan pangan di daerah, termasuk Penyaluran PI-KEKDA Traktor Roda 4 di Kabupaten Natuna.

C. Kelancaran Distribusi

1. Penyaluran SPHP secara rutin di berbagai Kabupaten/Kota oleh BULOG.
2. Bazar Murah Rutin Kedai Pangan TPID Kab. Karimun.
3. Pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan dalam rangka Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah di Kepulauan Anambas, Tanjungpinang, dan Bintan.

D. Komunikasi Efektif

1. *High Level Meeting* TPID Kota Tanjungpinang.
2. Rapat Koordinasi *Dashboard* Pengendalian Inflasi Kabupaten Karimun.
3. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
4. *High Level Meeting* TPID dan TP2DD, serta *High Level Meeting* Forkopimda Se-Provinsi Kepri.
5. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025.
6. *Launching* Kedai Pangan TPID Kabupaten Karimun.
7. *Capacity Building* TPID Se-Provinsi Kepri, termasuk *Capacity Building* dengan TPID Jawa Tengah.
8. Bincang Media dalam rangka pengendalian ekspektasi inflasi di masyarakat.
9. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Ramadhan dan Idulfitri 2025 Kota Batam.
10. *High Level Meeting* TPID Kabupaten Karimun.
11. *High Level Meeting* TPID Kota Tanjungpinang.
12. Rapat Koordinasi Pasar Murah HBKN Idul Adha 2025.
13. Koordinasi pelaksanaan *Capacity Building* TPID dan KAD dengan daerah penghasil.
14. Penyediaan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali.
15. Telah dilaksanakan program komunikasi rutin dan insidental. Berbagai program tersebut diantaranya siaran pers inflasi, *talkshow* radio, sidak, iklan layanan masyarakat, serta sosialisasi kepada masyarakat.
16. Pelatihan hilirisasi olahan cabai kepada Klaster/UMKM Binaan Bank Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi untuk menghadapi tantangan inflasi ke depan, khususnya pada sektor pangan. Upaya pengendalian inflasi pangan tersebut ditempuh melalui implementasi 7 (tujuh) program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang mencakup peningkatan produktivitas, penguatan ketahanan komoditas pangan, optimalisasi kerja sama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar

mudah, digitalisasi data dan informasi, serta penguatan koordinasi dan komunikasi. Upaya ini diarahkan diantaranya melalui penguatan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas petani. Program tersebut mencakup pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya hidroponik, integrasi data pertanian untuk mendukung akurasi informasi produksi dan distribusi, serta penyelenggaraan kelas digital atau *smart agriculture* guna memperluas akses edukasi bagi petani terkait praktik budidaya pangan yang lebih produktif dan efisien.

Di sisi lain, penguatan pasokan dilakukan melalui pembentukan *command center* Kerja Sama Antar Daerah (KAD). *Command center* KAD berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi kebijakan dalam menjembatani kebutuhan antara daerah surplus dan defisit

pangan. Melalui penguatan *command center* tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antarwilayah akan dilakukan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih terukur, responsif, dan tepat sasaran.

Selain itu, strategi ini juga didukung dengan penguatan infrastruktur dan efisiensi rantai pasok, sehingga distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih lancar dan merata. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat regional maupun nasional dapat terjaga, sekaligus memperkuat daya saing perekonomian di tengah dinamika global dan domestik yang penuh tantangan.

BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Asset* (yoy)



Tw III
2025

12,87%
Rp117,07 T



Tw II
2025

11,06%
Rp111,55 T

Kredit* (yoy)



Tw III
2025

15,12%
Rp59,82 T



Tw II
2025

11,95%
Rp57,30 T

Kredit** (yoy)



Tw III
2025

20,61%
Rp89,65 T



Tw II
2025

16,59%
Rp85,91 T

Dana* (yoy)



Tw III
2025

14,06%
Rp101,67 T



Tw II
2025

10,25%
Rp95,75 T

LDR*



Tw III
2025

88,18%



Tw II
2025

89,72%

NPL*



Tw III
2025

2,80%



Tw II
2025

2,90%

Kredit UMKM



Tw III
2025

12,96%
Rp16,15 T



Tw II
2025

17,23%
Rp16,07 T

* dari bank yang berlokasi di Kepri.

** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Intermediasi perbankan pada triwulan III 2025 tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit, DPK, dan aset yang meningkat dan disertai dengan risiko kredit yang membaik



Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2025 mengalami perbaikan, tercermin dari pertumbuhan kredit yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dan rasio NPL yang lebih rendah. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 15,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 11,95% (yoy). Sementara jumlah kredit yang disalurkan kepada proyek yang berlokasi di Kepri tumbuh sebesar 20,61% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,59% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 14,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,25% (yoy). Sementara, total Aset tercatat tumbuh sebesar 12,87% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,06% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga dan terus mengalami perbaikan. Berdasarkan proyek yang berlokasi di Kepri, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Kepri tercatat sebesar 88,18%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya sebesar 89,72%. Penyaluran kredit yang tumbuh positif turut didukung oleh kualitas kredit yang membaik dengan rasio *NPL gross* yang tercatat sebesar 2,80%, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,90%.

Kinerja penyaluran kredit UMKM tumbuh melambat dengan risiko kredit yang meningkat. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 12,96% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,23% (yoy). Moderasi yang terjadi pada penyaluran kredit UMKM di triwulan III 2025 didorong oleh melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, yang awalnya tumbuh negatif sebesar 69,21% (yoy), menjadi tumbuh 60,86% (yoy) pada triwulan III. Selain itu, perlambatan juga didorong oleh sektor Listrik, Gas, dan Air yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 79,27% (yoy) pada triwulan III, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 179,58% (yoy).

4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 20,61% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 16,59% (yoy). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyaluran kredit pada LU Industri Pengolahan dan LU *Real Estate*, Sewaan, dan Jasa PT yang meningkat yang meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan laju penyaluran kredit disebabkan oleh terakselerasinya kredit modal kerja.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 12,87% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,06% (yoy). Di samping itu, DPK tumbuh sebesar 14,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,25% (yoy). Akselerasi tersebut terutama terjadi pada giro dan tabungan, sedangkan deposito tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih instrumen yang lebih likuid dibanding yang bertenor panjang seperti deposito. Pada triwulan III 2025, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, yang tercermin dari tingkat kredit bermasalah (rasio *NPL gross*) yang tercatat sebesar 2,80% pada triwulan III, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,90% dan masih di bawah *threshold* 5%.

4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

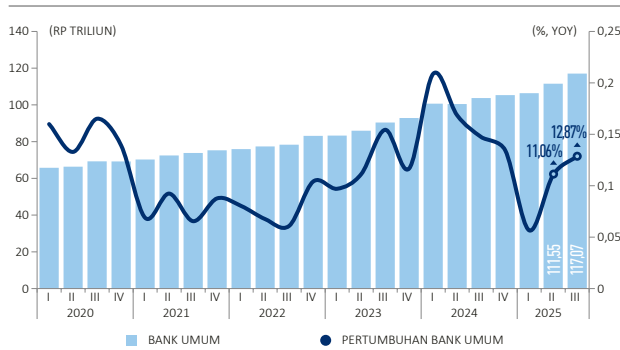
Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 berjumlah Rp117,07 triliun atau tumbuh 12,87% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 11,06% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok Bank Persero dan Bank Swasta yang tumbuh masing-masing sebesar 11,64% (yoy) dan 15,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,01% (yoy) dan 12,79% (yoy). Di sisi lain, aset dari kelompok BPD mengalami deselerasi dengan tumbuh sebesar 4,44% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,55% (yoy). Bank Asing dan Campuran mengalami kontraksi hingga 100% (yoy), seiring dengan tidak adanya lagi aset dari kelompok bank tersebut di Kepri sejak November 2024. Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 47,96%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (46,46%), dan BPD (5,58%).

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

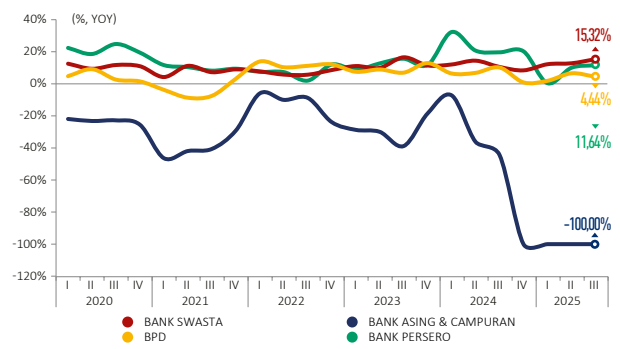
	2024 (Rp Triliun)				2025 (Rp Triliun)			Pertumbuhan (%, YoY)		
	I	II	III	IV	I	II	III	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025
Total Aset*	100,68	100,45	103,72	105,34	106,38	111,55	117,07	5,66%	11,06%	12,87%
Total Dana*	82,20	86,84	89,14	91,07	91,15	95,75	101,67	10,89%	10,25%	14,06%
Total Kredit*	48,61	51,19	51,96	53,11	55,38	57,30	59,82	13,94%	11,95%	15,12%
Total Kredit**	71,72	73,69	74,34	79,32	84,56	85,91	89,65	17,91%	16,59%	20,61%
NPL*	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	2,80%	-	-	-
LDR*	87,25%	84,85%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%	88,18%	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia

*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



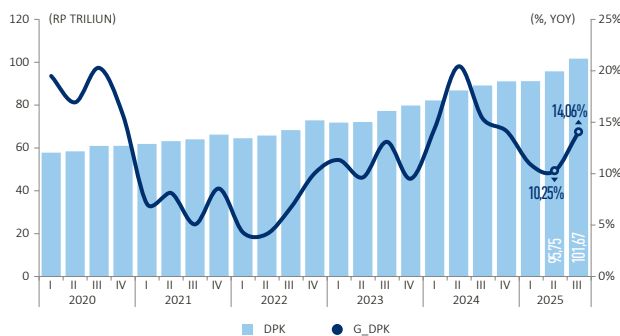
Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



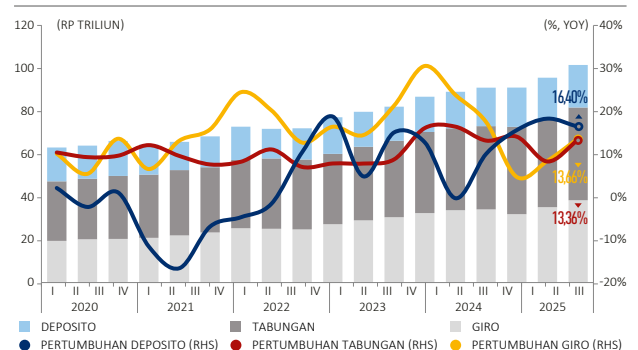
Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

Pada triwulan III 2025, total DPK di Kepri berjumlah Rp101,67 triliun atau tumbuh 14,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,25% (yoy). Peningkatan tersebut bersumber dari giro dan tabungan yang tumbuh terakselerasi sebesar 13,66% (yoy) dan 13,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II yang tumbuh sebesar 8,47% (yoy) dan 8,29% (yoy). Sementara deposito termoderasi dengan tumbuh sebesar 16,40% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,32% (yoy). Struktur DPK pada triwulan III 2025 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,62%, diikuti giro 37,87% dan deposito 19,51%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan besar dan jangka panjang (giro dan deposito) mengindikasikan mulai tingginya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.



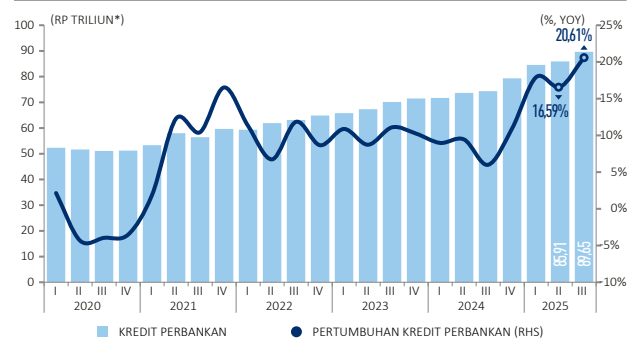
Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan



Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan

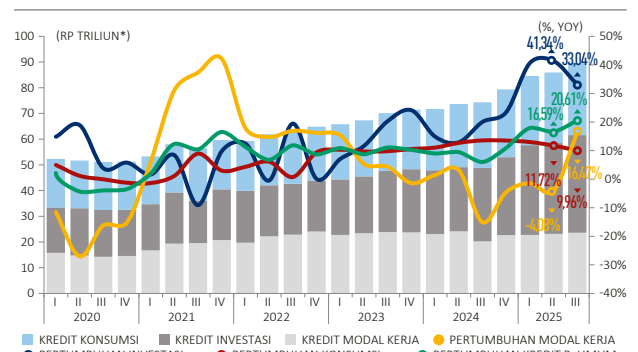
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 sebesar Rp89,65 triliun atau tumbuh 20,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 16,59% (yoy). Peningkatan terutama bersumber dari kredit modal kerja yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 16,47% (yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi 4,08% (yoy) di triwulan II 2025. Di sisi lain, kredit investasi dan konsumsi mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 33,04% (yoy) dan 9,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 41,34% (yoy) dan 11,72% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan III 2025 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 42,39%, diikuti oleh kredit konsumsi 31,30% dan kredit modal kerja sebesar 26,31%.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

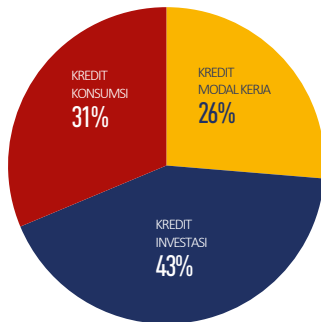
Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

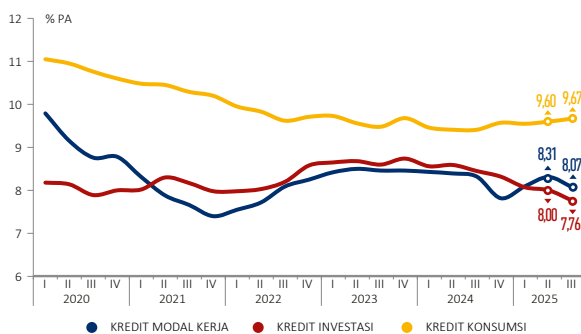
Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada triwulan III 2025, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,44%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,59%. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang tercatat masing-masing sebesar 8,07% dan 7,76%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 8,31% dan 8,00%. Di sisi lain, suku bunga pada kredit konsumsi mengalami peningkatan menjadi 9,67%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 9,60% pada triwulan II. Di samping itu, perkembangan suku bunga simpanan (DPK) cenderung menurun. Rata-rata suku bunga giro pada triwulan berjalan sebesar 1,92%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,09%, sejalan dengan suku bunga deposito yang tercatat 4,24%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 4,66%. Di sisi lain suku bunga pada tabungan mengalami peningkatan menjadi 0,71%, setelah sebelumnya tercatat sebesar 0,65% pada triwulan II 2025.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

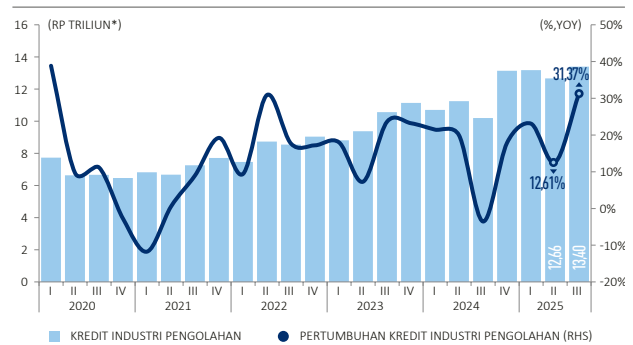


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit

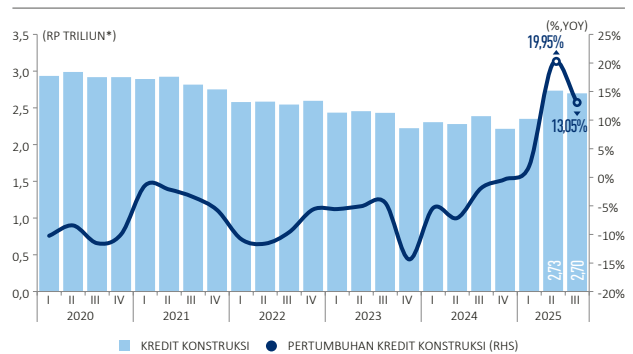
Secara sektoral, peningkatan penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari kredit LU Industri Pengolahan yang tumbuh 31,37% (yoy), mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,61% (yoy). LU Real Estate, Sewa dan Jasa PT juga mengalami akselerasi dari yang sebelumnya tumbuh 35,33% (yoy) pada triwulan II menjadi 55,84% (yoy) di triwulan III. LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi juga terakselerasi di triwulan III dengan

tumbuh sebesar 31,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II yang tumbuh 21,69% (yoy).



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.9 Kredit Sektor Industri Pengolahan



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.10 Kredit Konstruksi

Peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kredit di beberapa sektor di antaranya LU Pertambangan dan Penggalian yang terkonsentrasi sebesar 26,95% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,21% (yoy). Selain itu, LU Konstruksi juga mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 13,05% (yoy) pada triwulan III, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 19,95% (yoy). LU Listrik, Gas, dan Air juga melambat dari yang sebelumnya tumbuh 69,05% (yoy) di triwulan II, menjadi tumbuh sebesar 62,03% (yoy) di triwulan III 2025.

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan III 2025 sebesar Rp69,08 triliun dengan pangsa 77,05% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 9,09% dari total kredit atau sebesar Rp8,15 triliun, diikuti Kabupaten Bintan dengan pangsa 5,42% dari total kredit atau sebesar Rp4,86 triliun dan Kabupaten Karimun dengan pangsa 5,10% dari total kredit atau sebesar Rp4,57 triliun.

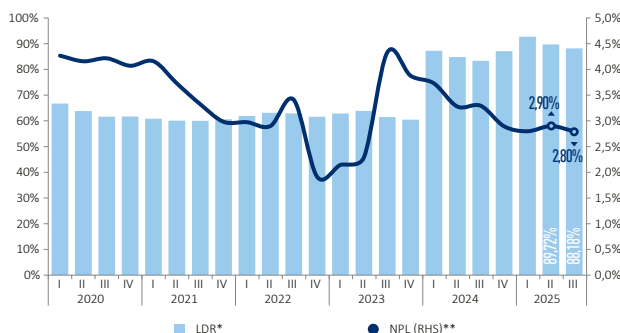
Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

Kabupaten/Kota	Triwulan III 2025	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Kota Batam	69,08	77,05%
Kota Tanjungpinang	8,15	9,09%
Kab. Karimun	4,57	5,10%
Kab. Lingga	0,77	0,86%
Kab. Natuna	1,87	2,08%
Kab. Bintan	4,86	5,42%
Kab. Kep. Anambas	0,36	0,40%
Total	89,65	100,00%

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan III 2025 mengalami penurunan menjadi 88,18%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 89,72%. Penurunan LDR ini diikuti dengan membaiknya kualitas kredit atau NPL yang mencatatkan angka 2,80%, lebih baik dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,90%. Angka NPL ini masih mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian kredit nasabah di Kepri masih dalam batasan risiko aman yaitu masih di bawah *threshold* 5%.



*) berdasarkan lokasi ***) berdasarkan lokasi bank proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

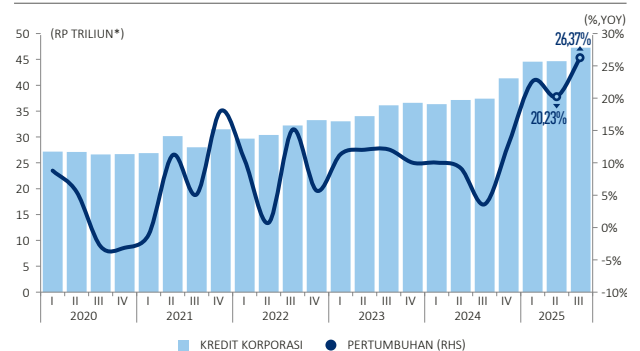
Pembiayaan pada sektor korporasi mengalami akselerasi pada triwulan III. Sementara pembiayaan rumah tangga dan UMKM mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya.

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami akselerasi pada triwulan III 2025. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp47,28 triliun atau tumbuh 26,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,23% (yoy). Sejalan dengan penguatan kredit, risiko kredit korporasi juga mengalami

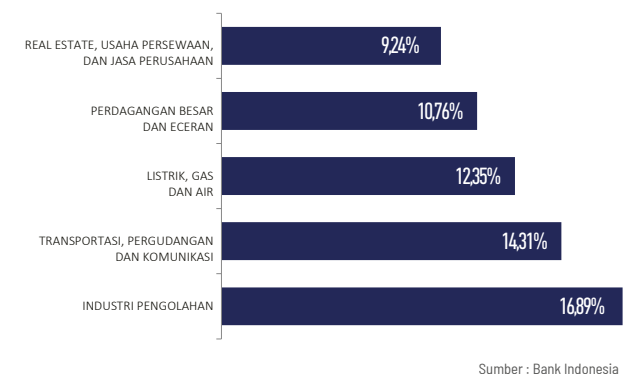
perbaikan ditandai dengan NPL kredit korporasi yang menurun menjadi 2,80%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 2,90%.

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 16,89% dari total kredit. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (14,31%), LU Listrik, Gas, dan Air (12,31%) LU Perdagangan Besar dan Eceran (10,76%), serta LU *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (9,24%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan III 2025 masih < 6%.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi



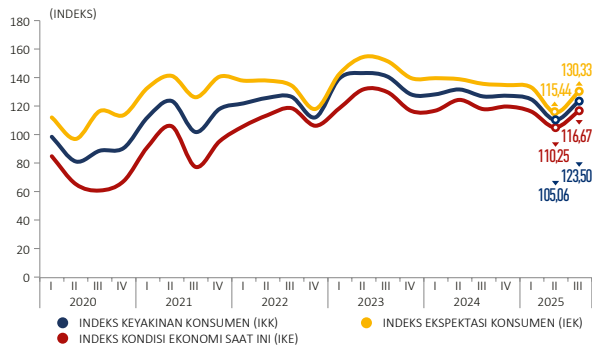
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

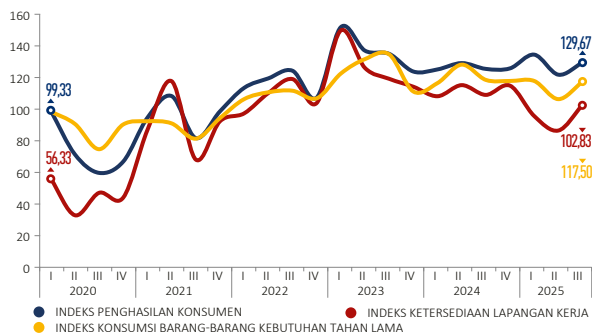
Ketahanan sektor rumah tangga mengalami penurunan sejalan dengan termoderasinya penyaluran kredit rumah tangga. Meskipun demikian, hasil survei triwulanan menunjukkan peningkatan pada triwulan III. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) menunjukkan penurunan dari yang sebelumnya tercatat sebesar 110,25; 105,06; dan 115,44 menjadi 123,50; 116,67; dan 130,33 pada triwulan III 2025.

Lebih lanjut, Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami peningkatan pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 129,67 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 122,00. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan keyakinan dan optimisme konsumen dengan tingkat keyakinan masih terjaga optimis (>100).



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.14 Survei Ekspektasi Konsumen

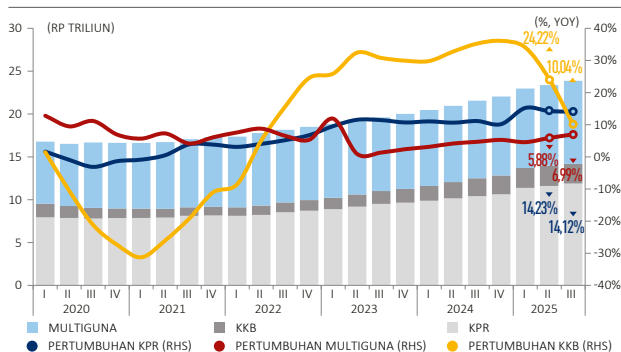


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.15 Survei Indeks Penghasilan Konsumen

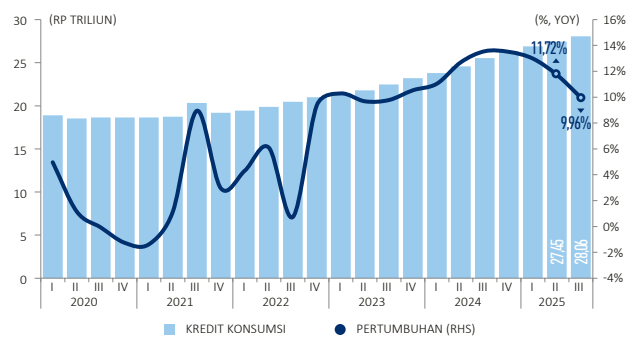
Di tengah tingkat keyakinan konsumen yang terakselerasi, penyaluran kredit rumah tangga mengalami moderasi. Kredit Rumah Tangga tumbuh sebesar 10,00% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,76% (yoy). Penurunan didorong oleh KKB dan KPR triwulan III 2025 tumbuh masing-masing sebesar 10,04% (yoy) dan 12,13% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 24,22% (yoy) dan 14,23% (yoy). Sementara itu, Kredit Multiguna mengalami akselerasi dari yang sebelumnya tumbuh 5,88% (yoy) menjadi 6,99% (yoy) pada triwulan III 2025.

Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 3,14% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,71% (yoy). Akselerasi DPK perseorangan terjadi karena penguatan yang terjadi di tabungan, dan deposito yang masing-masing tumbuh sebesar 7,69% (yoy) dan -7,70% (yoy), lebih tinggi



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga

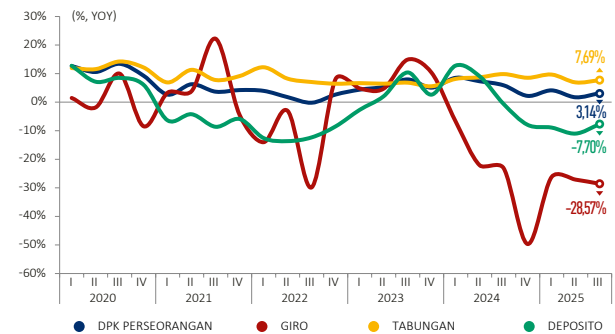


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.17 Kredit Konsumsi

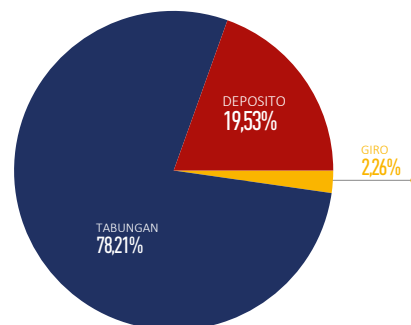
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing masing 6,91% (yoy), dan -11,00% (yoy) di triwulan II. Pertumbuhan DPK yang secara umum meningkat mengindikasikan kebutuhan likuiditas yang lebih kecil pada triwulan III 2025 dibanding triwulan sebelumnya sejalan dengan tidak adanya momentum HBKN sepanjang periode triwulan III. Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 78,21%, diikuti deposito 19,52% dan giro 2,26%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan III 2025 tercatat meningkat namun masih berada dibawah threshold 5%. NPL kredit rumah tangga tersebut meningkat menjadi 2,00% dari sebelumnya sebesar 1,97% pada triwulan II 2025. Peningkatan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori	2022				2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit Rumah Tangga	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%	1,69%	1,78%	1,66%	1,60%	1,67%	1,84%	1,97%	2,00%
Kredit Pemilikan Rumah	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%	2,11%	2,38%	2,41%	2,32%
Kredit Kendaraan Bermotor	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%	0,89%	0,90%	1,14%	1,10%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%	1,77%	2,20%	2,83%	3,35%
Kredit Multiguna	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%	1,41%	1,46%	1,56%	1,63%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%	1,40%	1,20%	1,37%	1,55%

Sumber: Bank Indonesia
(*) berdasarkan lokasi proyek

NPL terjadi pada kategori Kredit Peralatan Rumah Tangga dari 2,83% menjadi 3,35%, Kredit Multiguna dari 1,56% menjadi 1,63%, serta Kredit Lainnya dari 1,37% menjadi 1,55%. Sementara NPL kredit KPR dan KKB tercatat mengalami perbaikan dengan nilai 2,32% dan 1,10%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat 2,41% dan 1,14%.

4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

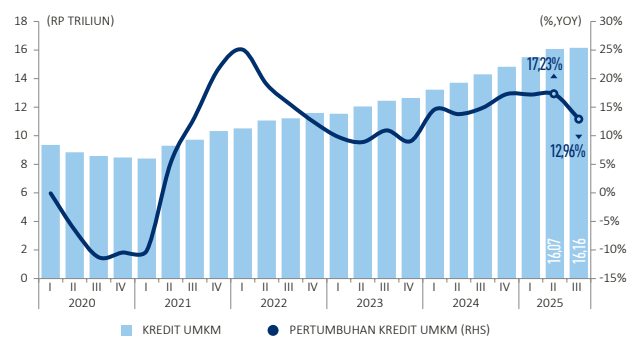
Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan III 2025 termoderasi dengan risiko kredit yang mengalami peningkatan. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 12,96% (yoy), mengalami deselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,23% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami peningkatan, tercermin dari rasio NPL kredit UMKM yang semula tercatat sebesar 3,27% menjadi 3,37%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 18,02%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 18,71%. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut stabil semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan LU, penyaluran kredit UMKM masih terkontraksi pada LU Listrik, Gas dan Air yaitu terkontraksi sebesar 79,27% (yoy), LU Konstruksi terkontraksi 2,11%, LU Perikanan terkontraksi 5,28%, LU Perantara Keuangan terkontraksi 2,72%, dan LU Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yang terkontraksi 26,19%.

Penyaluran kredit UMKM yang termoderasi didorong oleh termoderasinya kredit pada LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, LU Listrik, Gas, dan Air, LU Perdagangan Besar dan

Eceran, serta LU Konstruksi yang masing masing tumbuh 60,86% (yoy), -79,27% (yoy), 4,24% (yoy), dan -2,11% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 69,21% (yoy), 179,58% (yoy), 6,43% (yoy), dan 15,35% (yoy).

Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw III
2025

Rp 502 M



Tw II
2025

Rp 1,250 M

Outflow Uang Kartal



Tw III
2025

Rp 2,71 T



Tw II
2025

Rp 1,96 T

Net Flow Uang Kartal



Tw III
2025

Rp 2,21 M

Net Outflow



Tw II
2025

Rp 714 M

Net Outflow

Transaksi RTGS



Tw III
2025

Rp 56,85 T

8,83% (yoy)



Tw II
2025

Rp 49,87 T

13,54% (yoy)

Transaksi SKNBI



Tw III
2025

Rp 6,36 T

-5,83% (yoy)



Tw II
2025

Rp 5,63 T

-6,53% (yoy)

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan III 2025. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.



Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan III 2025 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp2,21 Triliun, tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat *net outflow* sebesar Rp714 Miliar. Lebih lanjut, pertumbuhan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) juga mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai semakin meningkat sejalan dengan kemudahan akses layanan pembayaran nontunai. Peningkatan aktivitas sistem pembayaran sejalan dengan pertumbuhan positif pada kinerja ekonomi Kepri yang tumbuh 7,48% (yoy) pada triwulan III 2025, terakselerasi dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,14% (yoy).

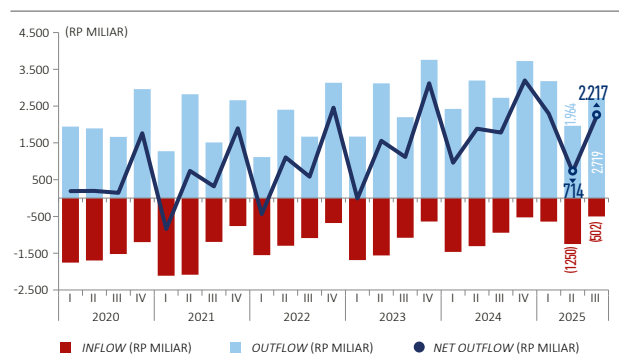
5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*¹/*Outflow*²)

Pada triwulan III 2025, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp2,21 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan jumlah uang yang beredar lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat *net outflow* sebesar Rp714 miliar. Pertumbuhan aliran uang tunai tersebut sejalan dengan kinerja ekonomi Kepri yang tetap tumbuh positif mendukung perputaran perekonomian di Kepri.

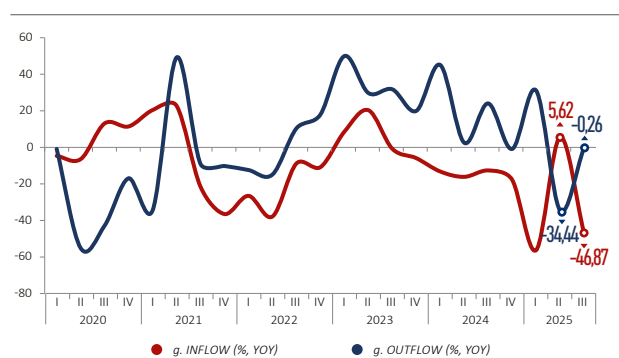
Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan III 2025 berjumlah Rp2,71 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 sebesar Rp1,96 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp502 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,25 triliun. Kondisi *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang masih kuat, meskipun masih tertahan oleh ketidakpastian global yang meningkat akibat perang dagang yang masih berlanjut. Faktor pendorong tetap kuatnya perekonomian di Kepri antara lain didorong oleh tetap kuatnya kinerja lapangan usaha utama di Provinsi Kepulauan Riau seperti Industri Pengolahan yang tumbuh 6,82% (yoy), pertambangan dan penggalan yang tumbuh 19,83% (yoy), konstruksi yang tumbuh 5,71% (yoy) serta perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 5,54% (yoy). Peningkatan ini juga didorong oleh kuatnya PMTB, konsumsi rumah tangga, serta konsumsi pemerintah.

Untuk memastikan ketersediaan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat mengoperasikan kas titipan di tiga lokasi, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Selain itu, kas keliling dilakukan di wilayah perkotaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil) untuk menjamin distribusi Rupiah yang layak edar. Pada 2025, Bank Indonesia juga mengadakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke beberapa pulau terpencil, termasuk Pulau Singkep, Pulau Tambelan, Pulau Subi Besar, Pulau Midai, dan Pulau Tarempa.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri



Sumber : Bank Indonesia

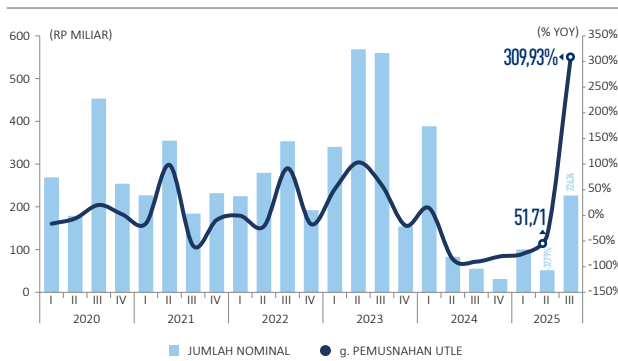
Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang yang diedarkan. Proses penyediaan uang kartal layak edar melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, kas keliling, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada triwulan III 2025 tercatat sebanyak Rp226 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp52 miliar. Pemusnahan uang kartal yang sudah tidak layak edar mencakup uang yang rusak parah atau telah mencapai akhir masa edarnya. Peningkatan pemusnahan uang kartal ini didorong oleh tingginya *outflow* di periode masuk sekolah/ perguruan tinggi yang jatuh pada triwulan III 2025. Bank Indonesia terus berupaya untuk menjaga kualitas peredaran uang sejalan dengan masifnya kampanye nasional CBP Rupiah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di Kepri. Selain itu, edukasi tentang uang Rupiah kini telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak tahun 2024.

1 *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank,
2 *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank

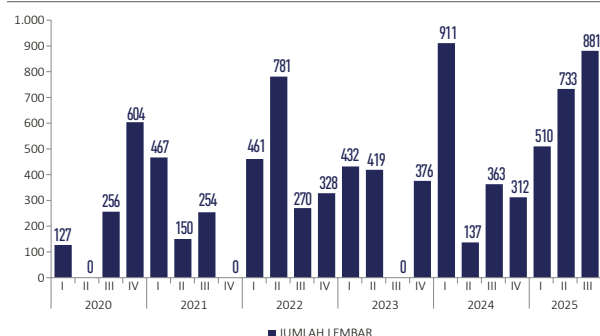


Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE

5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap Rupiah, sejumlah kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah serta dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan III 2025 terdapat 881 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 733 lembar uang palsu. Peningkatan temuan UPAL tersebut seiring dengan meningkatnya pelaporan temuan. Bank Indonesia secara konsisten akan terus mendorong edukasi CBP Rupiah atau diseminasi terkait ancaman hukuman bagi pelaku. Apabila masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi langsung ke Bank Indonesia terdekat mengenai keaslian uang tersebut dan dihibau untuk melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang kepada bank, atau kepolisian. Laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Jika uang tersebut dinyatakan tidak asli oleh Bank Indonesia, maka masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

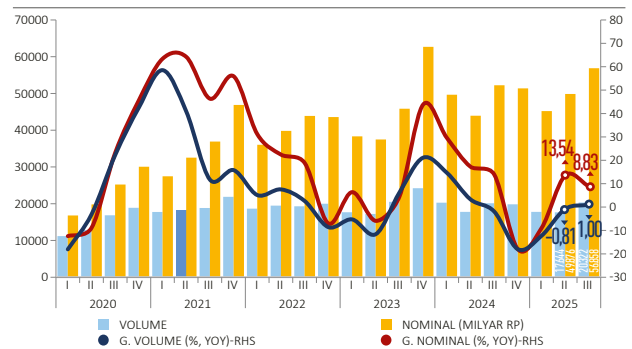


Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu

5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

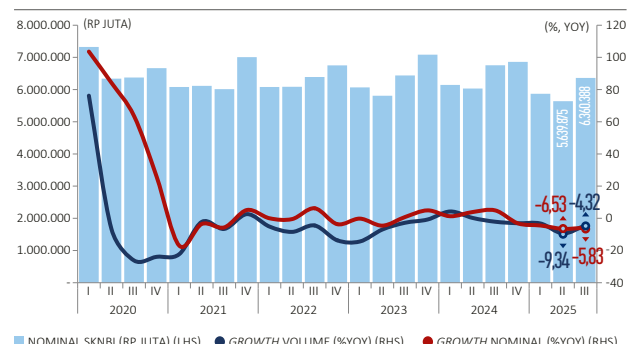
Nominal transaksi sistem Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (RTGS) tumbuh positif pada triwulan III 2025. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tercatat mencapai Rp56,85 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp49,87 triliun. Nominal transaksi RTGS pada triwulan III tumbuh sebesar 8,83% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,54% (yoy). Di sisi lain, volume transaksi pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 1,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang berkontraksi sebesar 0,81% (yoy). Tren peningkatan transaksi RTGS yang meningkat mengindikasikan tingginya konsumsi masyarakat pada triwulan berjalan.



Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp6,36 triliun, mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp5,64 triliun. Lebih lanjut, pertumbuhan nominal transaksi kliring selama triwulan III 2025 berkontraksi sebesar 5,83% (yoy), lebih dangkal dibandingkan triwulan II 2025 yang berkontraksi 6,53% (yoy). Sementara, pertumbuhan volume transaksi berkontraksi 4,32% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih baik dibandingkan triwulan II 2025 yang berkontraksi sebesar 9,34% (yoy). Kontraksi ini



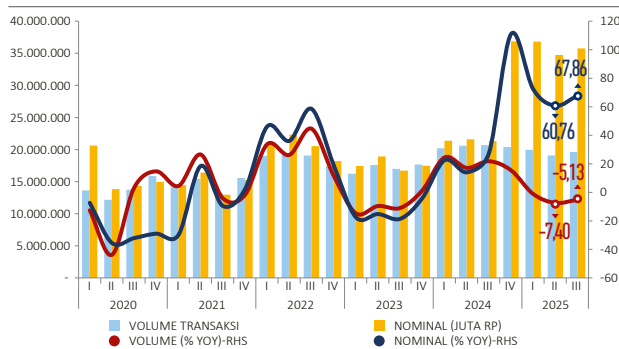
Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi cenderung menurun di tengah semakin beragamnya pilihan layanan jasa transfer untuk bertransaksi. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, sudah ada BI FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7 dan QRIS dengan lebih banyak kemudahan akses untuk berbagai transaksi.

5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

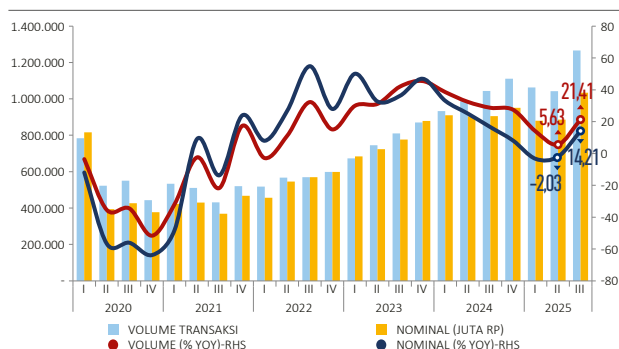
Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan III 2025 mengalami peningkatan dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi. Nilai transaksi kartu debit mengalami akselerasi atau tumbuh sebesar 67,86% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 60,76% (yoy). Sementara itu, volume transaksi juga mengalami peningkatan walaupun masih terkontraksi pada angka 5,13% (yoy), lebih dangkal dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7,40% (yoy)

Di sisi lain, volume transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan III 2025 juga mengalami akselerasi. Volume transaksi tumbuh sebesar 21,41% (yoy), mengalami akselerasi dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 5,63% (yoy). Nominal transaksi juga mengalami perbaikan dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 2,03% (yoy) pada triwulan II, menjadi tumbuh 14,21% (yoy) pada triwulan III. Pertumbuhan volume dan nominal penggunaan kartu kredit yang tinggi masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.



Sumber : Bank Indonesia

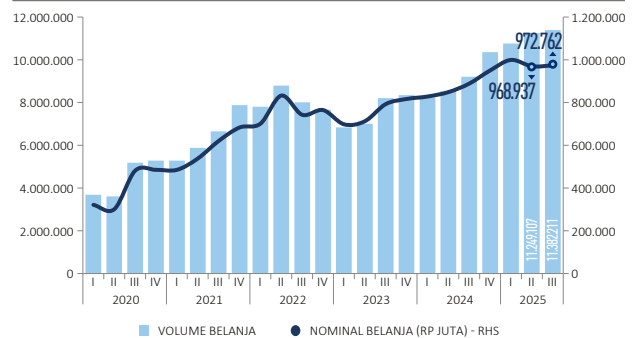
Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan III 2025 tercatat Rp972,76 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat sebesar Rp968,93 miliar. Hal ini sejalan dengan volume belanja yang mengalami peningkatan dari 11,24 juta transaksi menjadi 11,38 juta transaksi pada triwulan III 2025. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.

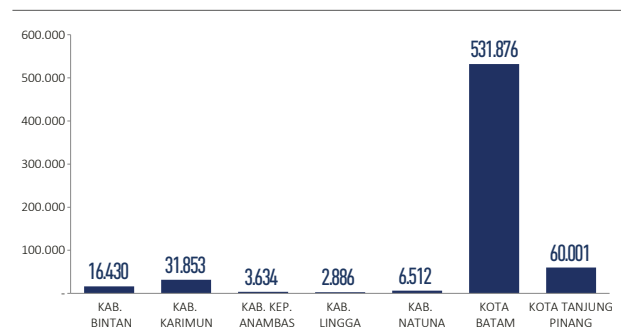


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

5.2.4 Perkembangan QRIS

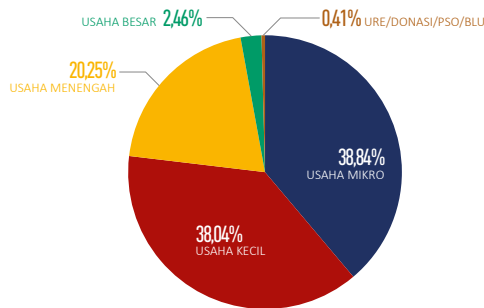
Implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung SP yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan III 2025 tercatat penambahan sebanyak 8.238 pengguna baru atau tumbuh sebesar 1,51% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tumbuh 1,23% (qtq), sehingga secara akumulasi total pengguna QRIS di Kepri hingga triwulan III telah mencapai 552.780 pengguna. Selain itu, dari sisi transaksi, sampai dengan triwulan III 2025 tercatat total transaksi sebanyak 35.647.178 transaksi, tumbuh sebesar 118,97% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 25,07% (qtq). Nominal total transaksi QRIS di Kepri hingga triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp3,60 triliun atau tumbuh sebesar 65,02% (qtq).



Sumber : Bank Indonesia

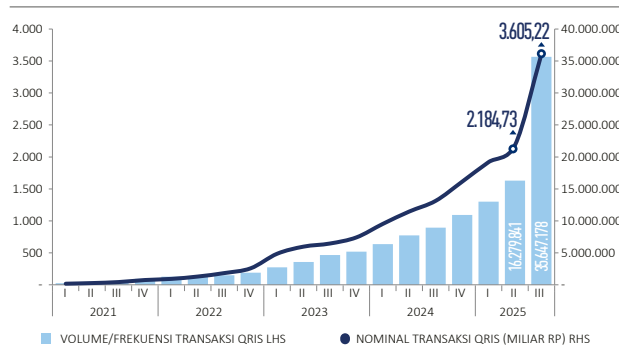
Grafik 5.10 Perkembangan Merchant QRIS Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri triwulan III 2025

Hingga triwulan III 2025, jumlah *merchant* QRIS tercatat sebesar 653.192 *merchant*, atau tumbuh 18,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,78% (yoy). Mayoritas *merchant* berlokasi di Kota Batam (81,43%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (9,19%) dan Kab. Karimun (4,88%). *Merchant* QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 38,84%, kategori Usaha Kecil dengan pangsa sebesar 38,04%, dan Usaha Menengah sebesar 20,25%. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 97,12% transaksi QRIS yang dilakukan oleh UMKM.



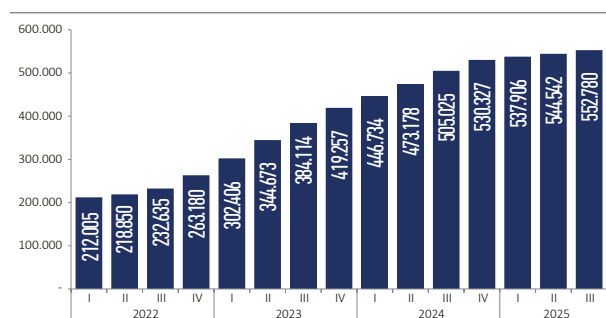
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11 Perkembangan *Merchant* QRIS Berdasarkan Kelompok Usaha triwulan III 2025



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Berdasarkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan pusat akulturasi dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, BI Kepri melakukan upaya strategi dalam peningkatan pengguna QRIS seperti sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding* QRIS. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan hingga triwulan III 2025 antara lain:

1. Sinergi dan Kolaborasi bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
2. Perluasan komunikasi QRIS Cross Border khususnya pada kawasan wisata dan transportasi internasional seperti Kapal Ferry.
3. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
4. *Reward* bagi *merchant* dan *user* bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
5. Edukasi/ sosialisasi/ *onboarding*/ hiburan/ perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:
 - a. QRIS Goes to School/Campus;
 - b. Kolaborasi pada kegiatan/event strategis di Kepri;
 - c. Sinergi event strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.
6. Perluasan QRIS yang disinergikan dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
7. *On boarding* pada sektor pariwisata seperti hotel, *travel agent*, dan objek wisata.
8. *Showcase* dan QRIS Experience dalam memperluas transaksi QRIS pada event strategis.

Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta akselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS. BI Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para *stakeholders* terkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi QRIS khususnya QRIS Antarnegara kepada penggiat wisata melalui asosiasi diantaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), dan Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI).

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS, khususnya QRIS *Cross-Border* mengingat letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Ke depannya Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan tempat keluar masuk turis mancanegara.

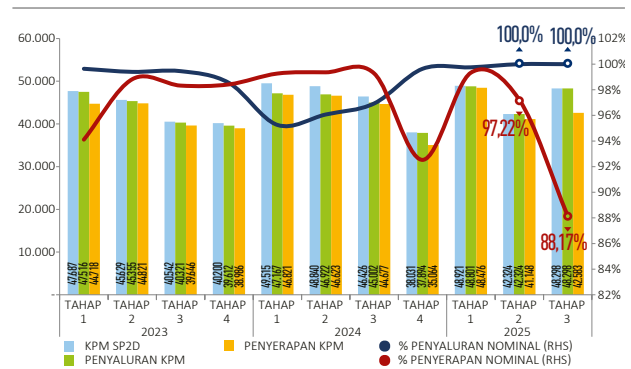
5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri memiliki beberapa strategi serta upaya untuk mendorong baik dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan *Teller* untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri hingga triwulan III 2025:

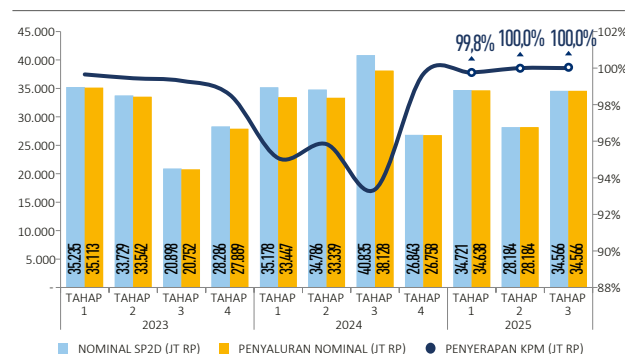
- Rapat koordinasi & *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.
- Memfasilitasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) & Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).
- Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
- Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
- Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu & strategi TP2DD.
- High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk ekskalasi isu strategis & mendorong *political will* kepala daerah.
- Benchmarking* dan Studi Banding dengan daerah lain.

5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

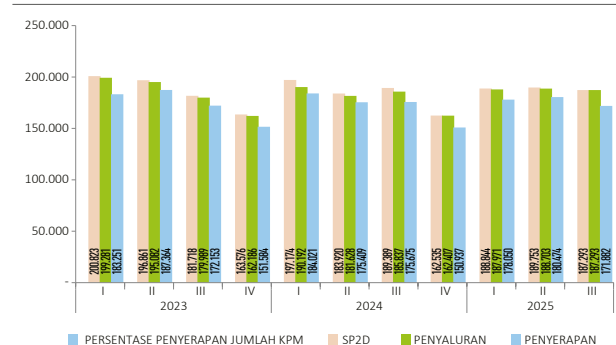
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra



Grafik 5.14 Penyaluran Program Keluarga Penerima Manfaat Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Grafik 5.15 Penyaluran Program Keluarga Harapan Triwulan III 2025 di Wilayah Provinsi Kepri



Sumber: Bank Indonesia, diolah (data per Agustus 2025)

Grafik 5.16 Penyaluran Program Sembako Triwulan II 2025 di Wilayah Provinsi Kepri

Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

Realisasi penyaluran bantuan PKH pada tahap 3 yang mencakup periode bulan Juli sampai dengan September 2025 atau sepanjang triwulan III 2025 secara nominal telah mencapai 100% sebesar Rp34,56 miliar untuk disalurkan kepada KPM sebanyak 48.298 KPM. Penyerapan bantuan PKH telah diserap oleh 42.583 KPM atau sebesar 88,17%. Penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM pada triwulan III 2025 adalah sebesar 187.293 penerima dengan persentase penyerapan terhadap penyaluran sebesar 91,77%.

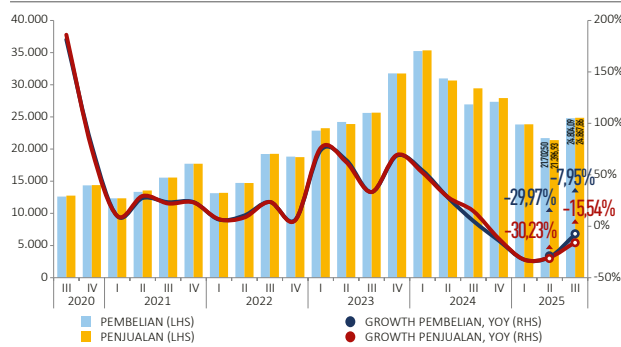
5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan *monitoring* perizinan dan pengawasan terhadap operasional 118 KUPVA BB dan 70 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2025.

5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

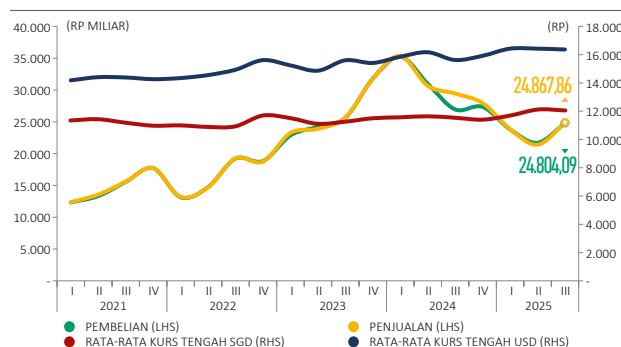
Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Kepri pada Triwulan III 2025 mengalami perubahan jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) jika dibandingkan dengan triwulan II 2025. Dimana jumlah Kantor Pusat (KP) yang awalnya 121 menjadi 118 kantor di triwulan III 2025. Sementara jumlah Kantor Cabang (KC) mengalami peningkatan dari yang awalnya berjumlah 68 kantor pada triwulan II menjadi 71 kantor pada triwulan III.

Pada triwulan III 2025, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh Dolar Singapura (SGD) sebesar 63,66% atau sejumlah Rp30,35 triliun, diikuti oleh Dolar Amerika Serikat (USD) sebesar 30,80% atau sejumlah Rp14,68triliun, Ringgit Malaysia (MYR) sebesar 5,22% atau sejumlah Rp2,48 triliun, Renminbi Tiongkok (CNY) sebesar 1,85% atau sejumlah Rp879,87 miliar, dan mata uang lainnya sebesar 1,49% atau sejumlah Rp710,29 miliar. Secara umum, total transaksi UKA pada Triwulan III 2025 setara dengan Rp49,67 triliun, mengalami akselerasi



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.17 Perkembangan Transaksi KUPVA



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

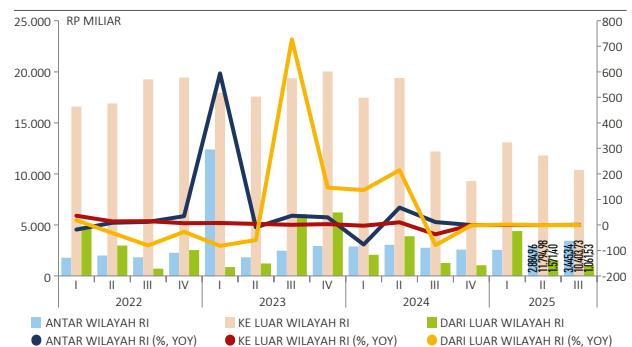
Grafik 5.18 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

sebesar 15,25% (qtq) atau meningkat setara dengan Rp6,57 triliun dibandingkan triwulan II 2025.

5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia atau transaksi *outgoing* sebesar 69,77%, diikuti transaksi antar wilayah Indonesia atau transaksi domestik dengan pangsa sebesar 23,11% dan transaksi dari luar wilayah Indonesia atau transaksi *incoming* sebesar 7,12%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pada triwulan III, PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana dari wilayah Indonesia ke luar negeri antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, terdapat 3 (tiga) izin kantor pusat KUPVA BB yang dicabut dan terdapat 1 (satu) izin kantor pusat baru Layanan Remitansi yang telah diberikan. Selain itu, terdapat 1 (satu) izin pembawa UKA baru yang telah diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa industri KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi masih memiliki ruang untuk pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah PJP LR di Provinsi Kepri pada triwulan III 2025 tidak mengalami perubahan dibanding triwulan sebelumnya, yaitu sejumlah 68 PJP LR. Dari frekuensi dan volume nominal transaksi, transaksi *outgoing* mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi *outgoing* terkontraksi 14,66% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan II 2025 yang terkontraksi 39,17% (yoy). Transaksi *incoming* juga mengalami akselerasi pada triwulan III dimana pada triwulan III mengalami kontraksi sebesar 16,13% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi dalam sebesar 59,61% (yoy). Transaksi domestik juga mengalami peningkatan, dimana pada triwulan III 2025 terjadi pertumbuhan sebesar 24,62% (yoy), lebih tinggi dari triwulan II 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 5,58% (yoy). Secara umum, pada triwulan III 2025 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri tercatat mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya terkontraksi sebesar 38,29% (yoy) menjadi terkontraksi -8,08% (yoy) atau dari sebesar Rp16,25 triliun pada triwulan II 2025 menjadi sebesar Rp14,91 triliun pada triwulan III.



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

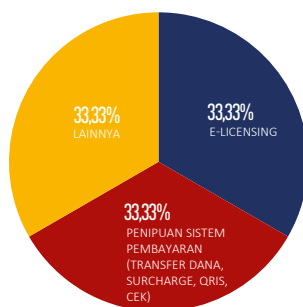
Grafik 5.19 Perkembangan Transaksi Pada PJP LR

5.3.3 Pelindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

KPwBI Provinsi Kepulauan Riau secara aktif melakukan fungsi edukasi Pelindungan Konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Sampai dengan triwulan III tahun 2025 KPwBI Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan edukasi pelindungan konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko penipuan di dunia digital. Sampai dengan November 2025, tercatat 33 kali kegiatan edukasi telah berhasil dilaksanakan, melibatkan 3.866 peserta dari berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini meliputi seminar, sosialisasi, dan kuis yang terfokus pada edukasi tentang hak dan kewajiban konsumen seperti pelindungan data pribadi, tips dan trik aman bertransaksi, dan langkah-langkah untuk menghindari modus penipuan digital. Selain itu, dilakukan pemanfaatan media sosial secara efektif untuk mensosialisasikan informasi penting terkait pelindungan konsumen. Selain itu, telah melakukan edukasi pelindungan konsumen pada kegiatan kunjungan sekolah dan sosialisasi dalam event Gebyar Melayu Pesisir dan Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR). Kegiatan edukasi tersebut berkolaborasi dengan UHUM dan FIKSP melalui sosialisasi luring serta bazaar, disamping itu juga dilaksanakan edukasi melalui stasiun radio berupa siaran langsung dan himbauan kepada masyarakat di Kota Batam.

Berdasarkan Indeks Keberdayaan Konsumen – Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2023 Provinsi Kepulauan Riau sebesar 66,62% yang berada pada level kritis (60-80%). Hal ini menjelaskan bahwa konsumen telah mampu dan berani menyampaikan pendapat/masalah ketika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi atau adanya beban berlebihan atas kewajibannya, serta mampu mengenali risiko dan menghindarinya.

Pada triwulan III 2025, KPwBI Kepri telah menerima 3 (tiga) pengaduan konsumen dan telah diselesaikan 100%, meliputi pengaduan konsumen OJK, penipuan sistem pembayaran, serta lainnya.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.20 Jumlah Pengaduan Pelindungan Konsumen hingga Triwulan III 2025



BOKS 4

AKSELERASI AKSEPTASI DIGITAL MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN BERLAYAR BELAKANG PADANG 2025

Dalam rangka perluasan akseptasi digital di wilayah Kepulauan Riau, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan "Bersama Rayakan Festival Digital Masyarakat Kepulauan Riau (BERLAYAR) 2025" di Kecamatan Belakang Padang pada tanggal 15 dan 16 November 2025. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara meliputi *opening ceremony*, pasar malam rakyat, *sunset run*, ruang edukasi, bazaar UMKM, peresmian pojok digital, serta berbagai kompetisi kreatif. Pelaksanaan Berlayar Belakang Padang 2025 juga turut didukung oleh kolaborasi berbagai pihak, termasuk perbankan, Bapenda, dan Satgas Halal Kota Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas adopsi QRIS, memperkuat ekosistem keuangan digital, serta turut meningkatkan nilai budaya dan pariwisata di Kecamatan Belakang Padang.

Kegiatan Berlayar Belakang Padang 2025 secara resmi dibuka oleh Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, didampingi oleh perwakilan pemerintah daerah, perbankan, dan



Gambar B4.3 Sunset run Berlayar 2025

stakeholder terkait lainnya sebagai wujud sinergi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Provinsi Kepri. *Opening Ceremony* juga turut menampilkan budaya melayu setempat seperti tarian tradisional dan silat melayu. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia Provinsi Kepri turut mendorong pelestarian budaya di Belakang Padang sekaligus memperkuat peran ekonomi lokal.

Sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia Provinsi Kepri terhadap pengembangan UMKM, seluruh tenant pada bazaar UMKM diisi oleh pelaku usaha lokal Belakang Padang dengan persyaratan telah menggunakan QRIS sebagai kanal transaksi. Upaya akuisisi pengguna QRIS turut menyasar pengendara pancung/perahu dan juga tukang becak yang menjadi moda transportasi utama di Belakang Padang. Proses akuisisi ini didukung oleh perbankan setempat, yaitu Bank Riau Kepri Syariah dan BRI sehingga berhasil menambah 45 merchant QRIS baru. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi awal terbentuknya ekosistem digital di Belakang Padang.

Selama tiga hari penyelenggaraan, Berlayar berhasil menarik lebih dari 6.000 pengunjung yang aktif berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan. Jumlah transaksi digital melalui QRIS yang mencapai lebih dari 4.000 transaksi, . Hal ini mencerminkan tingginya tingkat akseptasi masyarakat terhadap layanan pembayaran digital. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, UMKM, *stakeholder* lintas sektor, serta masyarakat umum mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi, mendorong lahirnya inovasi, dan meningkatkan daya saing Kepri di era ekonomi digital.



Gambar B4.1 Opening Ceremony Berlayar Belakang Padang 2025



Gambar B4.2 Semarak Berlayar 2025



BAB VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Agustus 2025 **1.124.530**
Orang



Agustus 2024 **1.120.660**
Orang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Agustus 2025 **68,23%**



Agustus 2024 **69,17%**

Tingkat Pengangguran Terbuka

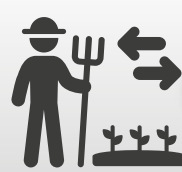


Agustus 2025 **6,45%**



Agustus 2024 **6,39%**

Nilai Tukar Petani



Tw III 2025 **103,33**



Tw II 2025 **103,03**

Tingkat Kemiskinan



Maret 2025 **4,44%**



Maret 2024 **5,37%**

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun 2025 **80,53**



Tahun 2024 **79,89**

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sejalan dengan tren akselerasi ekonomi yang terus berlanjut. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami penurunan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menurun pada hampir seluruh sub-sektor. Meskipun demikian, NTP masih terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani secara umum masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.



6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri yang dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)¹ mengalami peningkatan. TPT pada Agustus 2025 berada pada level 6,45%, meningkat dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat 6,39%. Kondisi tersebut utamanya terjadi di perdesaan yang mengalami peningkatan TPT dari 2,50% pada Agustus 2024 menjadi 6,70% pada Agustus 2025, sedangkan TPT perkotaan mengalami perbaikan dari 6,74% pada Agustus 2024 menjadi 3,56% pada Agustus 2025.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan mengalami penurunan untuk level pendidikan SMP ke bawah dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) secara umum mengalami penurunan masing-masing dari rata-rata sebesar 5,87% dan 5,32% pada Agustus 2024 menjadi 3,17% dan 4,69% pada Agustus

2025. Hal ini mencerminkan serapan tenaga kerja yang membaik untuk kelompok pendidikan tersebut. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK mengalami peningkatan angka TPT dari rata-rata sebesar 7,32% pada Agustus 2024 menjadi 8,95% pada Agustus 2025.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri masih didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 24,16% dari jumlah tenaga kerja pada Agustus 2025, menurun dibandingkan Agustus 2024 dengan pangsa 23,65%. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (16,58%), LU Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan (14,29%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,87%), dan LU Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (7,48%).

Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode									Perubahan 1 Tahun	
	Ags'17	Feb'18	Feb'19	Feb'20	Feb'21	Feb'22	Feb'23	Feb'24	Feb'25	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.065.553	1.039.132	1.133.776	1.207.014	1.259.712	1.093.686	1.120.660	1.124.530		3.870	0,35%
Bekerja	996.994	972.575	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	1.049.090	1.051.980		2.890	0,28%
Pengangguran	68.559	66.557	117.176	119.595	103.715	74.330	71.570	72.560		990	1,38%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,43%	6,41%	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%	6,39%	6,45%			0,94%
- Perdesaan	6,32%	3,47%	5,41%	4,43%	5,88%	7,00%	2,50%	6,70%			168,00%
- Perkotaan	6,45%	6,72%	10,89%	10,45%	8,52%	6,77%	6,74%	3,56%			-47,18%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,85%	68,15%	66,28%	68,27%	68,94%	68,68%	69,17%	68,23%			

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran							
		Aug'18	Aug'19	Aug'20	Aug'21	Aug'22	Aug'23	Aug'24	Aug'25*
1	≤SD	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%	5,44%	5,48%	3,17%
2	SMP	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%	5,87%	6,26%	
3	SMA	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%	7,85%	7,80%	8,95%
4	SMK	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%	9,99%	6,83%	
5	Diploma I/II/III	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%	2,93%	5,32%	4,69%
6	Universitas	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%	3,53%	4,36%*	

*Terdapat perubahan pola rilis di TPT Diploma dan Universitas. Rilis sebelumnya angkanya dipisah, namun per Feb 24 digabung

**Terdapat perubahan pola rilis berdasarkan pendidikan yang dibagi pada 3 kategori saja yaitu SMP ke Bawah, SMA/SMK, Perguruan Tinggi

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agt'18	Agt'19	Agt'20	Agt'21	Agt'22	Agt'23	Agt'24	Agt'25
1	Industri Pengolahan	23,37%	23,80%	22,76%	25,01%	25,77%	25,23%	23,65%	24,16%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	19,35%	17,30%	17,32%	17,67%	17,41%	16,45%	16,59%	16,58%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	5,95%	6,41%	6,18%	6,02%	5,15%	5,55%	5,76%	14,29%
4	Konstruksi	9,44%	7,92%	6,86%	6,64%	7,14%	7,74%	8,03%	7,37%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06%	7,71%	8,95%	9,00%	7,80%	8,36%	7,08%	7,48%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	8,22%	7,92%	7,54%	10,19%	9,01%	10,82%	10,87%
7	Transportasi dan Pergudangan	6,44%	6,39%	6,85%	6,05%	6,34%	6,22%	6,46%	6,34%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	1,35%	1,66%	1,26%	1,48%	2,07%	1,72%	1,36%	2,68%
9	Jasa Lainnya	7,13%	6,72%	6,57%	5,08%	6,43%	6,24%	5,26%	5,15%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	2,44%	2,54%	2,34%	1,83%	1,32%	2,11%	2,15%	1,92%

Sumber: BPS (data diolah)

¹ Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	
1	Berusaha Sendiri	19,83	19,29	21,80	20,90	19,80	20,17	17,42	16,50	-0,92
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	4,16	4,59	4,32	6,10	5,77	5,63	6,06	8,12	2,06
3	Berusaha dibantu buruh tetap	3,27	4,04	3,65	3,15	3,23	3,77	4,29	3,88	-0,41
4	Buruh/karyawan	64,95	66,39	60,94	64,79	60,45	62,56	64,16	61,87	-2,29
5	Pekerja Bebas	3,30	2,51	3,86	4,02	4,12	1,71	2,30	1,83	-0,47
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	4,50	3,19	5,42	5,90	6,63	6,17	5,77	7,78	2,01
TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BPS (diolah)

Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 61,87%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 16,50%. Pangsa kelompok berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, dan pekerja bebas mengalami penurunan masing-masing 0,92 persen poin, 0,41 persen poin, 2,29 persen poin dan 0,47 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga yang masing-masing meningkat sebesar 2,06 persen poin dan 2,01 persen poin pada bulan Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

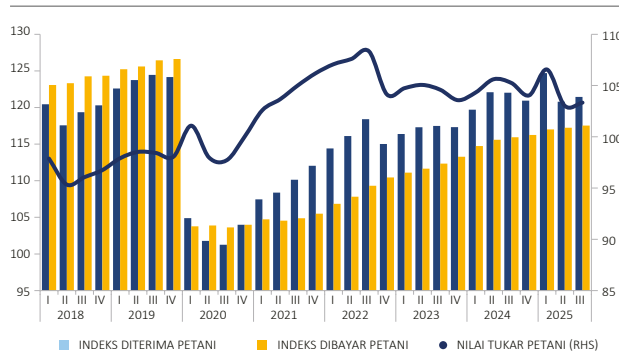
tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan III 2025 yang merupakan rata-rata bulan Juli-September 2025 mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya (rata - rata bulan April-Juni 2025). Rata-rata NTP pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 103,33, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 103,03. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya NTP pada sub-kelompok Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perikanan.

Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Perikanan sebesar 100,86, sementara NTP terendah tercatat pada sub-kelompok Tanaman Pangan sebesar 92,96. Sub kelompok Hortikultura mencatatkan kenaikan dari 99,53 pada triwulan II 2025 menjadi 102,48 pada triwulan III 2025. Di sisi lain, penurunan turut terjadi pada sub-kelompok Peternakan yang tercatat 99,87 pada triwulan II 2025 menjadi 99,47 pada triwulan III 2025.

6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

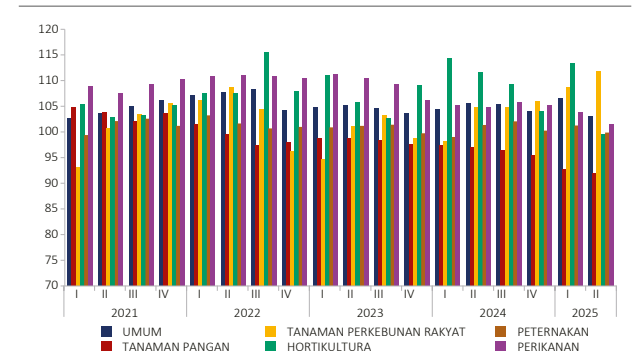
6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok															
	2022				2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Tanaman Pangan															
a. Indeks yang Diterima (It)	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92	112,18	109,48	108,71	110,36
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14	117,46	118,21	118,35	118,72
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40	95,51	92,62	91,86	92,96

Sub Kelompok / Kelompok															
	2022				2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
2. Hortikultura															
a. Indeks yang Diterima (It)	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97	121,16	132,47	116,58	120,35
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,09	108,34	109,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13	116,42	116,94	117,13	117,43
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34	104,07	113,29	99,53	102,48
3. Tanaman Perkebunan Rakyat															
a. Indeks yang Diterima (It)	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23	124,58	128,65	132,43	131,27
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24	117,53	118,39	118,57	118,90
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	104,67	106,00	108,66	111,69	110,40
4. Peternakan															
a. Indeks yang Diterima (It)	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10	114,56	116,77	115,48	115,38
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	80,59	114,27	115,34	115,63	116,00
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	102,06	100,26	101,25	99,87	99,47
5. Perikanan															
a. Indeks yang Diterima (It)	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10	121,23	120,67	117,72	117,68
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05	115,39	116,17	116,46	116,67
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,74	105,06	103,88	101,54	100,86
Umum															
a. Indeks yang Diterima (It)	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	117,31	119,70	122,08	122,03	120,94	124,69	120,79	121,45
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	113,27	114,73	115,59	115,94	116,25	117,01	117,24	117,53
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	103,57	104,33	105,61	105,25	104,04	106,57	103,03	103,33

6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2025 tercatat sebanyak 117.280 orang, menurun dibandingkan periode September 2024 yang tercatat sebesar 124.960 orang. Pada periode Maret 2025, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp807.602/bulan/kapita pada September 2024 menjadi Rp832.410/bulan/kapita pada Maret 2025. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode Maret 2025 tercatat sebesar 0,688%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode September 2024 yang sebesar 0,635%. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2025 juga mengalami peningkatan dari 0,143% pada September 2024 menjadi sebesar 0,179% pada Maret 2025.

6.2.3 Gini Ratio (GR)

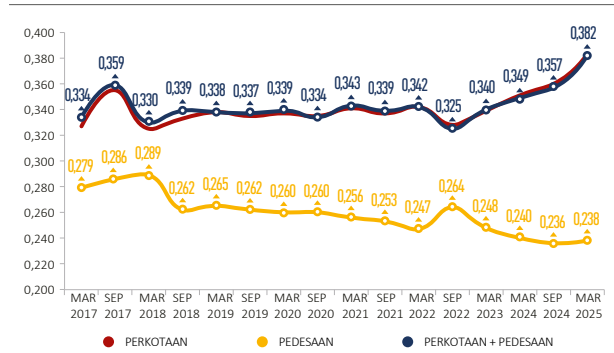
Gini Ratio² Provinsi Kepri pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,382, meningkat dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,357. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri pada periode September 2024 – Maret 2025. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,383, meningkat dari September 2024 tercatat sebesar 0,360. Sementara itu, Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,238, meningkat dari September 2024 yang tercatat sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks *Gini Ratio* di Provinsi Kepri adalah yang tertinggi, serta lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional (0,375).

Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

	2021		2022		2023	2024		2025
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar	Sept	Mar
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300	124.960	117.280
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37	4,78	4,44
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	787.211	807.602	832.410
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704	0,635	0,688
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146	0,143	0,179
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-7,11%	-12,31%	-15,20%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	7,77%	8,76%	5,74%

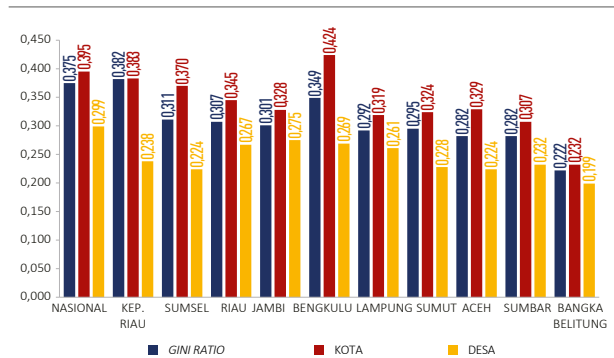
Sumber: BPS (data diolah)

2 *Gini Ratio* merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. *Gini Ratio* yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri

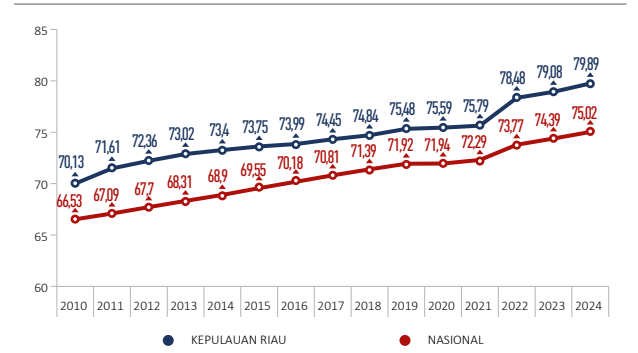


Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,53, meningkat 0,64 poin ibandingan tahun sebelumnya 79,89. Peningkatan IPM Kepri 2025 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,46, artinya bayi yang lahir pada tahun 2025



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,46 tahun, lebih lama 0,34 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2024. Angka UHH ini turut menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik.

Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,28 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,72 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.881.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.573.000,-.

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM. IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masing-masing 83,80 dan 82,02. Sementara itu 5 (lima) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12	75,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27	13,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50	10,72
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573	15.881
IPM		71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89	80,53

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49	76,08
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96	78,65
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60	78,94
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05	73,82
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47	74,07
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32	83,80
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58	82,02
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08	79,89	80,53

Sumber: BPS (data diolah)

BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian global diperkirakan melambat meskipun tidak sedalam yang diperkirakan sebelumnya. Dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat terhadap ekonomi global masih moderat, didukung dengan adanya fenomena *front-loading* khususnya pada semester I 2025 serta negosiasi tarif yang dilakukan sejumlah negara. Sejumlah negara di kawasan Asia dan Amerika Serikat (AS) diperkirakan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, ketegangan geopolitik yang masih berlangsung masih memberikan ketidakpastian terhadap perekonomian global. Sementara itu, perekonomian Indonesia juga diperkirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi didukung oleh stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang lebih longgar. Sejalan dengan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tumbuh menguat didukung oleh komponen investasi dan net ekspor.

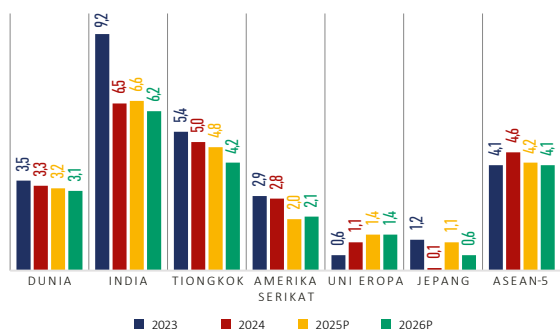
Inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Faktor yang mendukung stabilitas inflasi ini mencakup normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI 2025 DAN 2026

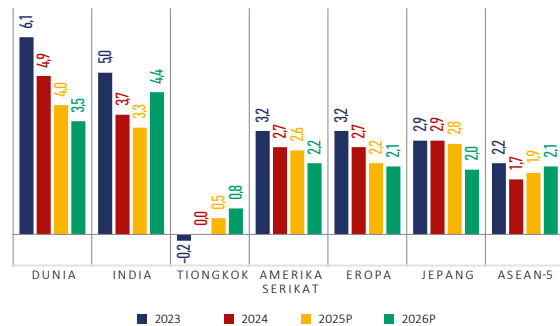
Perekonomian global diperkirakan melambat, meskipun tidak sedalam prakiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund* (IMF) pada Oktober 2025, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,2% (yoy), atau meningkat 0,2% dibandingkan prakiraan pada bulan Juli 2025 dan melambat dari tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,3% (yoy). Hal tersebut didukung dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi negara maju (*advanced economies*) khususnya AS dan Eropa, serta revisi atas proyeksi untuk negara *emerging market and developing economies* khususnya di wilayah Asia. Pertumbuhan ekonomi AS mengalami revisi atas menjadi 2,0% (yoy) seiring dengan negosiasi tarif resiprokal dengan sejumlah negara yang lebih rendah dibandingkan ketika pertama diumumkan pada April 2025. Adapun perekonomian Eropa juga mengalami revisi atas menjadi 1,2% (yoy) seiring dengan kebijakan fiskal yang lebih longgar ditandai dengan rasio *debt-to-GDP* yang meningkat. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2025 sebesar 4,3% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 4,6% (yoy) namun revisi atas dari proyeksi sebelumnya.

Tekanan inflasi global diperkirakan masih terus menurun, dari 4,9% (yoy) pada tahun 2024 menjadi 4,0% (yoy) pada tahun 2025. Penurunan ini terutama didorong oleh turunnya harga komoditas inti dan ekspektasi penurunan harga energi. Meskipun demikian, potensi berlanjutnya konflik geopolitik global tetap menjadi risiko yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih berlangsung diperkirakan akan membuka ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 berada pada level 1,9% (yoy) di tahun 2025, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2024.



Sumber : IMF World Economic Outlook, April 2025

Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)

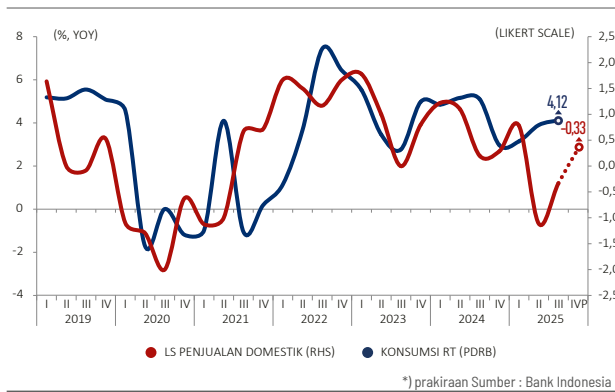


Sumber : IMF World Economic Outlook, April 2026

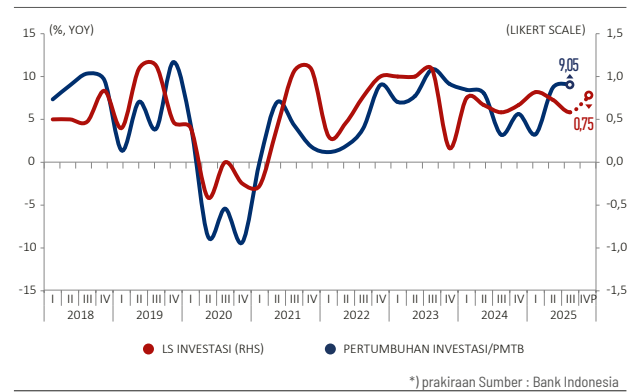
Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonominasional padatahun 2025 beradapada kisaran 4,7% - 5,1% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik didukung oleh stimulus fiskal melalui implementasi proyek prioritas dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah 2025 serta bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong kenaikan ekspektasi penghasilan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, sejalan dengan tambahan bantuan sosial pemerintah serta kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Investasi, khususnya nonbangunan, diperkirakan lebih tinggi tecermin dari indeks *Prompt Manufacturing Index* (PMI) yang tetap pada level ekspansif.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kepri tetap tumbuh didukung oleh net ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), seiring dengan berlanjutnya pertumbuhan industri pengolahan serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, kinerja domestik juga diperkirakan membaik, ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Penjualan Domestik sejalan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pekerja di wilayah Kepri. Adapun dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Pertambangan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik. **Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2025 di prakirakan tumbuh pada kisaran 6,5% - 7,3% (yoy).**



Grafik 7.3 Likert Scale Perkiraan Penjualan Ekspor



Grafik 7.4 Likert Scale Perkiraan Investasi

Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kebijakan Moneter Akomodatif	Kebijakan moneter yang lebih akomodatif seiring dengan tren inflasi yang melandai diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat.	▲
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan short term visa serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman.	▲
Investasi	Berakhirnya tahun politik diharapkan memberikan kepercayaan kepada investor sehingga tidak lagi bersikap <i>wait and see</i> , serta kepastian perizinan melalui diterbitkannya PP No. 25/2025 dan PP No. 28/2025.	▲
Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	▲
Persaingan Daerah Industri	Peresmian kerja sama Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) meningkatkan persaingan investasi dengan KEK yang ada di Kepri	▲
Transisi Pemerintahan AS	Transisi pemerintahan AS sebagai mitra dagang utama perlu dicermati, khususnya terkait dengan kebijakan perdagangan internasional.	▼
Risiko Geopolitik	Gejolak geopolitik yang masih berlanjut dapat memberikan disrupsi terhadap perekonomian global hingga domestik.	▼
Risiko Geopolitik	Gejolak geopolitik yang masih berlanjut dapat memberikan disrupsi terhadap perekonomian global hingga domestik.	▼

Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 6,4 s/d 7,2%, atau tetap berada pada level yang tinggi. Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2026 masih akan banyak ditopang oleh investasi dan konsumsi rumah tangga. Kepastian perizinan yang telah dioptimalkan melalui penerbitan sejumlah regulasi diharapkan dapat mempermudah aliran investasi yang masuk ke Kepri. Lebih lanjut, akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan juga bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri Pengolahan. LU Perdagangan Besar dan Eceran diharapkan mampu terus tumbuh seiring dengan transmisi penurunan suku bunga perbankan. Masih meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) secara global juga diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik tetap kuat.

7.2 PROSPEK INFLASI 2025 DAN 2026

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Tabel 7.2 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2026

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Berlanjutnya transmisi penurunan suku bunga	Transmisi penurunan suku bunga perbankan diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh kredit sehingga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga.	▲
Investasi	Kepastian regulasi didukung dengan semakin gencarnya program promosi investasi.	▲
Berlanjutnya tarif resiprokal	Implementasi tarif resiprokal AS dapat berdampak pada ekspor-impor Kepri mengingat AS merupakan salah satu mitra dagang utama.	▼
Konflik Geopolitik	Berlanjutnya konflik geopolitik di sejumlah negara dapat mengganggu rantai pasok global.	▼

Tabel 7.3 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
<i>Upside Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk. Potensi kenaikan harga pangan karena peningkatan permintaan. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut. Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat. Potensi terjadinya La Nina yang mendorong curah hujan lebih tinggi.
<i>Downside Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> Berlanjutnya normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga komoditas energi. Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan. Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi. Berlanjutnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
2. Kebijakan pembatasan impor pangan yang perlu diimbangi dengan penguatan ketersediaan pasokan domestik.
3. Potensi berlanjutnya kenaikan harga komoditas emas seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.
4. Kenaikan UMR yang dapat mendukung perbaikan konsumsi masyarakat.
5. Meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

Stabilitas inflasi Kepri diperkirakan masih tetap terjaga di rentang 2,5±1% (yoy) pada tahun 2026. Sejumlah risiko yang dapat memengaruhi inflasi Kepri pada tahun 2026 antara lain kondisi cuaca dan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah produsen yang dapat memengaruhi pasokan pangan di Kepri dan berlanjutnya ketidakpastian global yang berpengaruh pada komoditas inflasi inti. Di sisi lain, sinergi dan kolaborasi dalam TPID dengan pengendalian inflasi dalam *framework* 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif yang diwujudkan melalui upaya GNPIP diperkirakan dapat menahan inflasi yang akan terjaga stabil pada rentang sasaran.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

1. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui:
 - a. Penyediaan insentif dan penguatan regulasi, termasuk perluasan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
 - b. Meningkatkan promosi investasi dengan menjadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daya tarik utama, didukung oleh lokasi strategis dan kepastian iklim investasi pasca tahun politik.
 - c. Mendukung peningkatan keunggulan komparatif daya saing investasi di Kepri di tengah persaingan regional yang semakin ketat (termasuk dengan berdirinya Johor-Singapore *Special Economic Zone*) melalui penguatan insentif bagi investor dan perbaikan infrastruktur.
2. Optimalisasi potensi sektor pariwisata melalui:
 - a. Memperkuat aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain melalui penambahan event,

Tabel 7.4 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2026

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
<i>Upside Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi cuaca dan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah produsen yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan ke Kepri Inflasi inti yang meningkat sejalan dengan ketidakpastian kondisi geopolitik global
<i>Downside Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> Normalisasi harga energi global Upaya pengendalian inflasi pangan melalui sinergi TPID yang diwujudkan dengan pelaksanaan GNPIP dalam <i>framework</i> 4K

- peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta pengembangan *quality tourism*.
- b. Mendukung penerapan kebijakan *short term visa* guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
 - c. Mendorong normalisasi frekuensi penerbangan dan pembukaan rute baru di wilayah Kepri untuk memperkuat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus menjaga stabilitas inflasi pada komoditas angkutan udara.
 3. Mengoptimalkan realisasi belanja pemerintah, baik melalui APBD maupun APBN, untuk menciptakan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
 4. Mendorong proses hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
 5. Memperluas digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal, termasuk peningkatan akseptansi QRIS oleh *merchant* dan *user*, serta promosi QRIS *cross-border* untuk mendukung konsumsi masyarakat.
 6. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sehingga dapat mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah.
 7. Memperkuat program pemberdayaan UMKM melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, dan pendampingan agar mampu menghasilkan produk unggulan berorientasi ekspor.
 2. Mendorong peningkatan produksi pangan di tengah keterbatasan lahan subur, antara lain melalui budidaya cabai merah oleh koperasi dan kelompok tani serta pembangunan *greenhouse* untuk mengatasi kendala cuaca. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat dioptimalkan dalam pengembangan komoditas pangan strategis.
 3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar anggota TPID melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi masyarakat perlu dilakukan dengan penyebaran informasi terkait pasokan, kewajara harga, serta kampanye belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
 4. Meningkatkan sinergi antar instansi dalam TPID melalui penelarasan program pendukung GNPIP dan strategi pengendalian inflasi daerah, termasuk penerapan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
 5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya yang berasal dari luar daerah, dengan dukungan asosiasi distributor.
 6. Memperkuat koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam pelaksanaan program stabilisasi harga pangan strategis.

Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP melalui 7 (tujuh) program utama, yaitu: (1) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan strategis; (2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (4) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (5) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (6) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	2022				2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
MAKRO															
Laju Inflasi (yoy)*	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	2,09	2,01	1,32	2,70
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	115,17	122,59	121,07	122,34	122,64	124,07	124,85	128,95	109,16	110,36	107,94	110,31	111,68	109,83	113,19
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,72	107,03	106,50	107,10	109,05	109,92	110,68	111,24	105,34	106,15	106,23	106,32	106,59	106,59	107,42
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,49	101,81	102,39	103,04	103,89	104,11	104,52	104,59	102,89	103,00	104,93	105,23	104,55	105,93	106,02
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	108,04	109,30	109,77	109,94	110,89	111,22	110,62	110,70	102,11	101,79	101,79	101,60	101,85	101,76	101,61
IHK KESEHATAN	103,27	103,10	103,23	103,41	103,52	103,66	103,69	103,77	103,72	103,82	103,91	104,11	104,26	104,93	105,64
IHK TRANSPORTASI	101,79	106,04	117,08	119,05	114,25	116,10	116,87	120,09	110,79	111,56	111,86	112,86	112,69	112,95	111,12
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,05	99,15	99,03	99,03	99,18	99,17	99,25	99,30	100,06	100,03	100,03	99,97	99,96	99,91	99,94
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,33	107,17	107,46	107,52	107,73	107,82	108,27	108,31	101,25	101,28	101,45	102,08	101,99	101,83	101,99
IHK PENDIDIKAN	114,18	114,18	117,34	117,34	117,40	117,40	120,63	120,63	104,19	104,19	102,15	102,23	102,24	102,27	103,58
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/ RESTORAN	108,03	109,77	110,07	110,18	110,22	110,25	110,76	110,91	101,68	102,70	102,87	103,02	104,80	105,22	105,51
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	116,65	117,73	117,85	120,28	122,36	122,72	123,31	125,72	108,30	111,06	112,53	114,87	119,16	123,34	126,48
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	4,90	5,02	5,14	5,16	7,14	7,48
Ekspor Non Migas (Juta USD**)	3,38	3,92	4,28	3,82	4,13	3,56	3,65	3,66	3,62	3,88	4,15	4,47	5,01	5,23	5,11
Impor Non Migas (Juta USD**)	3,23	3,25	3,75	3,55	3,95	3,71	3,66	3,20	3,20	3,00	3,78	4,03	4,38	5,31	4,94
PERBANKAN															
Giro (Rp miliar)	20.975	22.098	23.498	25.467	25.220	24.908	27.355	29.153	30.605	32.530	33.876	34.257	32.041	35.284	38.505
Tabungan (Rp miliar)	29.538	30.479	30.451	31.850	32.820	32.626	32.832	34.340	35.705	37.881	38.225	38.865	40.734	41.022	43.333
Deposito (Rp miliar)	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571	17.086	16.305	15.888	16.433	17.040	17.950	18.373	19.443	19.835
Total DPK (Rp miliar)	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106	77.273	79.799	82.197	83.798	89.141	91.072	91.148	95.749	101.674
Total Asset (Rp miliar)	75.924	77.367	78.314	83.142	83.291	85.971	90.402	92.850	100.684	100.447	103.479	105.336	106.380	111.55	117.07
Total Kredit (Rp miliar)	59.354	61.920	63.127	64.861	65.810	67.327	70.132	71.507	71.717	73.688	74.336	79.322	84.564	85.910	89.653
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%	8,83%	8,83%	8,83%	8,80%	8,74%	8,59%	8,55%	8,59%	8,44%
Suku Bunga Dep 3 bin tertimbang kredit	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%	3,91%	4,30%	4,30%	4,24%	4,32%	4,49%	4,45%	4,66%	4,24%
LDR (%) - Lokasi Proyek	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	87,94%	83,39%	87,10%	92,78%	89,72%	88,18%
NPL (%)	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%	3,66%	3,78%	3,73%	3,28%	3,29%	2,90%	2,80%	2,90%	2,80%
SISTEM PEMBAYARAN															
Inflow (miliar Rp)	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561	1.080	1.200	1.239	1.309	944	526	884	1.250	502
Outflow (miliar Rp)	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117	2.198	2.962	1.780	3.195	2.726	3.725	3.179	1.964	2.719
Volume Kliring (lembar)	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535	67.249	82.833	61.532	69.283	69.262	82.216	63.052	60.493	65.973
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	3.278.058	3.225.906	3.614.866	4.167.192	3.366.996	3.374.095	3.731.188	3.987.954	3.240.296	3.095.976	3.538.216

Sumber: BPS dan BI
Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100
**) Data Sangat Sementara
***) data Perbankan dari Bank Umum

Tabel 2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Provinsi Kepulauan Riau
Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018 dan mulai Januari 2024 menggunakan Tahun Dasar 2022

No	KELOMPOK	Mar 2024		Jun 2024		Sep 2024		Des 2024		Mar 2025		Jun 2025		Sep 2025	
		Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	% mtm	Indeks	% mtm
UMUM		105,94	0,46	106,69	0,28	106,32	0,14	107,35	0,68	108,07	0,38	108,10	-0,12	109,19	0,64
I.	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	109,16	0,32	110,36	0,56	107,94	0,10	110,31	2,05	111,68	-0,21	109,83	-0,55	113,19	1,74
a.	MAKANAN	108,32	0,31	109,50	0,54	106,33	(0,05)	108,85	2,40	110,29	-0,31	107,83	-0,69	111,50	2,01
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	106,73	0,00	107,58	0,49	108,11	0,75	109,27	0,28	110,06	0,18	110,48	0,00	110,78	0,06
c.	MINUMAN BERALKOHOL	101,81	0,00	102,32	0,00	103,06	0,02	103,06	0,00	103,69	0,00	104,14	0,00	103,07	0,00
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	119,00	0,01	120,64	0,68	122,93	0,86	124,90	0,57	126,07	0,31	128,17	0,27	131,04	0,75
II.	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	105,34	0,05	106,15	(0,08)	106,23	0,00	106,32	-0,14	106,59	0,57	106,59	0,41	107,42	0,31
a.	PAKAIAN	104,57	0,01	106,01	0,04	106,07	0,01	106,15	-0,16	106,57	0,72	107,11	0,71	108,09	0,28
B.	ALAS KAKI	108,29	0,04	106,71	(0,54)	106,87	0,00	106,98	-0,07	106,69	0,00	104,61	-0,73	104,83	0,42
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	102,89	0,01	103,00	0,01	104,93	0,18	105,23	0,03	104,55	2,33	105,93	0,09	106,02	0,00
a.	SEWA RUMAH	105,26	0,00	105,51	0,00	106,28	0,36	106,56	0,00	107,66	0,00	108,23	0,21	108,36	0,00
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	102,13	0,01	102,30	0,12	102,57	0,03	103,43	0,02	103,45	0,00	103,54	0,04	103,62	0,06
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,57	-	101,57	0,00	105,55	0,09	105,78	0,08	103,05	6,11	105,91	0,00	105,99	0,00
IV.	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	102,11	(0,01)	101,79	0,00	101,79	0,08	101,60	-0,05	101,85	0,02	101,76	-0,12	101,61	-0,16
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	102,01	0,00	102,10	0,00	102,16	0,05	102,25	0,09	102,62	0,00	102,62	0,00	102,65	0,03
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	103,17	0,00	103,17	0,00	102,92	0,00	102,92	0,00	102,92	0,01	102,92	0,00	103,06	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	100,69	0,00	100,88	0,56	101,03	0,01	101,16	0,02	101,26	0,01	101,20	0,01	101,30	-0,02
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	99,25	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00	100,64	0,15	100,64	0,00	100,64	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	103,10	0,00	103,04	(0,09)	104,25	0,14	104,27	0,02	104,63	0,29	104,72	-0,02	104,86	0,00
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	102,76	(0,01)	101,95	(0,18)	101,82	0,11	101,41	-0,12	101,71	-0,01	101,56	-0,22	101,21	-0,31
V.	KESEHATAN	103,72	0,01	103,82	0,03	103,91	(0,01)	104,11	0,12	104,26	0,00	104,93	0,08	105,64	0,63
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	101,97	0,01	102,06	0,05	102,23	(0,02)	102,49	0,23	102,53	0,00	103,83	0,14	105,21	1,22
b.	JASA RAWAT JALAN	101,61	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00	102,16	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00	101,96	0,00
VI.	TRANSPORTASI	110,79	0,02	111,56	0,71	111,86	0,11	112,86	0,53	112,69	-0,14	112,95	-0,25	111,12	-0,96
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	102,75	0,01	102,94	0,14	104,60	0,02	104,81	0,05	105,39	0,00	105,88	0,00	105,74	0,34
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	113,65	0,01	113,71	0,01	113,73	(0,25)	113,33	0,04	113,68	-0,02	113,69	-0,11	113,89	0,01
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	111,25	(0,00)	114,25	2,94	113,55	0,61	118,19	1,68	116,07	-0,53	116,72	-0,80	108,47	-4,43
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	107,43	0,00	107,43	0,00	116,04	8,01	122,90	6,44	123,79	0,00	123,79	0,00	123,79	0,00
VII.	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	100,06	(0,00)	100,03	0,00	100,03	0,00	99,97	0,00	99,96	-0,03	99,91	0,00	99,94	0,02
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	99,96	(0,00)	99,85	0,00	99,85	0,00	99,57	-0,02	99,55	-0,12	99,31	0,00	99,34	0,00
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
c.	JASA KEUANGAN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,34	0,34
VIII	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	101,25	(0,01)	101,28	(0,01)	101,45	(0,06)	102,08	0,00	101,99	0,00	101,83	0,00	101,99	0,03
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	100,10	0,00	100,22	0,07	100,33	0,01	100,37	0,00	100,37	0,00	100,26	-0,11	100,17	0,07
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	109,62	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	101,96	(0,01)	101,75	(0,09)	102,07	(0,16)	103,60	-0,01	103,39	0,00	103,07	0,09	103,55	0,03
IX	PENDIDIKAN	104,19	0,00	104,19	0,00	102,15	0,85	102,23	0,00	102,24	0,00	102,27	0,03	103,58	1,15
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	103,27	0,00	103,27	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,43	0,00	104,67	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	101,59	0,00	101,59	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,53	0,00	89,80	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	108,44	0,00	108,44	0,00	111,10	2,45	111,10	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00	114,74	3,28
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	101,57	0,00	101,57	0,00	102,40	0,00	102,87	0,00	102,94	0,00	103,12	0,17	103,12	0,00
X	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01	105,51	0,21
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02	103,02	0,02	104,80	0,02	105,22	0,01	105,51	0,21
XI	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	108,30	0,06	111,06	0,13	112,53	0,07	114,87	0,11	119,16	1,16	123,34	0,51	126,48	2,02
a.	PERAWATAN PRIBADI	105,42	(0,00)	105,58	0,17	105,61	0,12	106,15	0,09	106,29	0,08	106,87	-0,07	107,68	0,07
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	115,53	0,06	124,65	0,06	129,45	(0,02)	135,60	-0,35	150,01	3,11	163,07	1,44	171,92	5,15
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	107,40	0,00	107,40	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	108,88	0,00	109,75	0,00
d.	JASA LAINNYA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	108,79	8,79	108,79	0,00	108,79	0,00	108,79	0,00

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2022				2023				2024				2025		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Batam	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,52%	0,12%	0,48%	0,45%	0,29%	0,18%	0,68%	0,11%	-0,06%	0,62%
2. Tanjungpinang	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,04%	0,29%	0,42%	0,17%	0,04%	0,16%	-0,05%	0,70%	1,40%	-0,13%	0,54%
3. Karimun									0,53%	0,30%	0,02%	0,64%	1,43%	-0,71%	0,99%
4. Kepulauan Riau	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%	0,16%	0,44%	0,46%	0,28%	0,14%	0,68%	0,38%	-0,12%	0,64%
5. Nasional	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%	0,19%	0,41%	0,52%	-0,08%	-0,12%	0,44%	1,65%	0,19%	0,21%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2024									2025								
	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep
ASET	97.499	97.690	100.447	101.001	101.656	103.479	105.054	105.646	105.336	106.916	109.630	106.380	108.171	107.696	111.552	113.299	114.075	117.071
DANA PIHAK KETIGA	82.197	84.010	83.798	86.701	87.575	89.141	90.745	90.467	91.072	93.135	94.947	91.148	92.681	92.165	95.749	97.432	98.033	101.674
a. Giro	30.605	31.543	30.484	32.555	32.770	33.876	34.262	34.009	34.257	35.969	36.836	32.041	33.574	33.064	35.284	35.423	36.091	38.505
b. Tabungan	35.705	36.399	36.858	37.951	37.773	38.225	38.805	38.930	38.865	39.451	40.133	40.734	40.540	39.493	41.022	42.091	41.560	43.333
c. Deposito	15.888	16.068	16.456	16.195	17.032	17.040	17.677	17.529	17.950	17.715	17.978	18.373	18.568	19.608	19.443	19.919	20.383	19.835
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653
Modal Kerja	23.506	23.625	24.143	20.329	20.169	20.254	20.185	20.875	22.687	23.312	22.718	22.748	23.648	22.972	23.158	22.840	23.465	23.591
Investasi	25.083	25.198	24.980	28.566	28.198	28.563	30.148	29.929	30.300	30.900	31.457	34.922	34.506	34.802	35.306	36.856	37.921	38.001
Konsumsi	24.028	24.257	24.566	24.905	25.220	25.519	25.893	26.097	26.335	26.436	26.698	26.895	26.964	27.231	27.446	27.721	27.905	28.062
b. Jenis Kredit	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653
UMKM	13.070	13.387	13.711	13.848	13.902	14.302	14.504	14.447	14.832	14.727	14.978	15.499	15.757	15.783	16.074	15.770	16.151	16.156
Non UMKM	59.547	59.692	59.977	59.952	59.685	60.034	61.722	62.454	64.490	65.922	65.895	69.066	69.362	69.222	69.836	71.647	73.139	73.497
c. Kolektibilitas	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336	76.226	76.901	79.322	80.649	80.873	84.564	85.118	85.005	85.910	87.417	89.291	89.653
Lancar	63.791	64.453	65.380	65.624	66.169	67.510	69.439	70.179	73.015	73.977	74.065	78.073	78.469	78.454	79.499	80.536	81.415	82.629
D.P.Khusus	6.117	5.953	5.892	5.718	4.977	4.377	4.306	4.355	4.010	4.328	4.427	4.125	4.251	4.145	3.920	4.375	5.341	4.517
Kurang Lancar	153	142	118	163	217	201	161	155	107	154	134	132	165	182	210	172	180	162
Diragukan	125	160	194	150	144	216	256	207	139	134	198	199	176	508	526	576	570	515
Macet	2.432	2.372	2.104	2.144	2.079	2.033	2.065	2.004	2.051	2.056	2.049	2.035	2.057	1.716	1.755	1.758	1.785	1.830
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,35%	86,99%	87,94%	85,12%	84,03%	83,39%	84,00%	85,00%	87,10%	86,59%	85,18%	92,78%	91,84%	92,23%	89,72%	89,72%	91,08%	88,18%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,73%	3,66%	3,28%	3,33%	3,32%	3,29%	3,26%	3,08%	2,90%	2,91%	2,94%	2,80%	2,82%	2,83%	2,90%	2,87%	2,84%	2,80%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN	2024										2025							
	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
ASET	22.069	20.758	21.516	21.799	21.535	22.594	24.080	23.989	24.362	24.507	25.787	22.135	22.408	21.071	22.473	21.789	22.178	22.542
DANA PIHAK KETIGA	21.564	20.541	21.398	22.114	22.112	23.210	23.715	23.297	23.554	24.402	25.189	21.528	21.669	20.348	21.731	20.827	21.368	22.081
a. Giro	8.502	7.202	7.932	8.696	8.472	9.513	9.931	9.447	9.738	10.506	11.313	7.230	7.912	5.989	7.013	6.096	6.417	6.964
b. Tabungan	9.975	10.287	10.379	10.378	10.292	10.355	10.429	10.542	10.638	10.624	10.584	10.892	10.810	10.722	11.109	10.993	10.890	11.061
c. Deposito	3.088	3.052	3.087	3.041	3.348	3.342	3.356	3.308	3.178	3.273	3.292	3.406	2.947	3.637	3.609	3.738	4.061	4.057
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574
Modal Kerja	3.805	3.787	3.764	3.793	3.864	3.922	4.115	4.806	4.810	4.837	4.181	4.467	4.571	4.521	4.391	4.554	4.330	4.328
Investasi	5.499	5.502	5.473	5.627	5.926	6.233	7.274	7.131	7.170	7.152	7.148	7.230	6.762	6.721	7.266	7.457	7.603	7.049
Konsumsi	8.206	8.266	8.348	8.445	8.487	8.576	8.658	8.707	8.760	8.777	8.837	8.872	8.877	8.916	8.968	9.063	9.142	9.196
b. Jenis Kredit	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574
UMKM	4.146	4.216	4.229	4.252	4.251	4.447	4.489	4.454	4.558	4.480	4.505	4.580	4.648	4.647	4.702	4.664	4.676	4.736
Non UMKM	13.365	13.340	13.355	13.614	14.026	14.284	15.557	16.191	16.182	16.286	15.661	15.989	15.561	15.511	15.923	16.410	16.399	15.838
c. Kolektibilitas	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731	20.047	20.644	20.740	20.766	20.166	20.569	20.209	20.158	20.624	21.075	21.075	20.574
Lancar	16.179	16.242	16.282	16.573	16.960	17.410	18.739	19.333	19.555	19.338	18.689	19.187	18.738	18.704	19.194	19.032	19.055	19.267
D.P.Khusus	655	645	615	604	586	600	591	602	494	720	762	671	711	689	667	1.295	1.258	548
Kurang Lancar	81	64	40	41	77	29	42	37	39	56	47	42	90	57	46	61	63	55
Diragukan	47	79	99	66	53	92	83	48	42	43	56	52	46	430	435	396	397	401
Macet	549	526	548	582	599	600	592	623	609	610	613	617	624	277	282	291	302	303
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	81,20%	85,47%	82,17%	80,79%	82,66%	80,70%	84,53%	88,61%	88,05%	85,10%	80,06%	95,55%	93,26%	99,07%	94,91%	101,19%	98,63%	93,17%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,86%	3,81%	3,91%	3,86%	4,00%	3,85%	3,58%	3,43%	3,33%	3,41%	3,55%	3,46%	3,76%	3,79%	3,70%	3,55%	3,62%	3,69%

Sumber: Bank Indonesia
**) meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.) Kota Batam

KETERANGAN	2024									2025								
	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
ASET	75.430	76.932	78.931	78.540	79.201	80.121	80.885	81.657	80.974	82.409	83.843	84.245	85.763	86.625	89.079	91.510	91.897	94.529
DANA PIHAK KETIGA	62.446	63.781	65.445	64.587	65.463	65.932	67.029	67.170	67.518	68.733	69.758	69.620	71.012	71.817	74.018	76.605	76.665	79.592
a. Giro	23.041	23.479	24.598	23.859	24.298	24.364	24.332	24.562	24.519	25.463	25.523	24.811	25.662	27.075	28.271	29.326	29.674	31.541
b. Tabungan	26.424	26.931	27.502	27.573	27.481	27.870	28.376	28.387	28.227	28.827	29.549	29.842	29.730	28.772	29.913	31.098	30.670	32.272
c. Deposito	12.981	13.372	13.346	13.155	13.684	13.698	14.322	14.221	14.772	14.442	14.686	14.967	15.620	15.970	15.834	16.181	16.321	15.779
KREDIT																		
a. Jenis Penggunaan	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079
Modal Kerja	19.701	19.837	20.379	16.535	16.306	16.332	16.070	16.069	17.877	18.475	18.537	18.281	19.077	18.451	18.767	18.286	19.135	19.262
Investasi	19.584	19.696	19.507	22.939	22.272	22.330	22.874	22.798	23.130	23.749	24.308	27.691	27.744	28.081	28.040	29.399	30.317	30.952
Konsumsi	15.822	15.990	16.218	16.460	16.733	16.943	17.235	17.390	17.575	17.659	17.861	18.023	18.087	18.314	18.478	18.658	18.763	18.866
b. Jenis Kredit	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079
UMKM	8.925	9.171	9.482	9.596	9.651	9.856	10.014	9.993	10.274	10.247	10.473	10.918	11.108	11.136	11.372	11.106	11.475	11.420
Non UMKM	46.182	46.352	46.622	46.338	45.659	45.749	46.165	46.263	48.308	49.636	50.234	53.077	53.801	53.711	53.914	55.236	56.740	57.659
c. Kolektibilitas	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605	56.179	56.256	58.582	59.882	60.706	63.995	64.909	64.847	65.286	66.342	68.215	69.079
Lancar	47.612	48.211	49.098	49.051	49.209	50.100	50.700	50.845	53.460	54.639	55.377	58.886	59.731	59.750	60.305	61.504	62.360	63.362
D.P.Khusus	5.461	5.307	5.277	5.115	4.391	3.777	3.715	3.752	3.516	3.608	3.666	3.454	3.540	3.456	3.253	3.080	4.083	3.969
Kurang Lancar	72	78	78	122	140	172	118	118	68	98	86	90	75	125	163	111	117	107
Diragukan	78	81	94	85	91	124	173	159	97	91	142	147	130	78	91	180	173	114
Macet	1.884	1.846	1.557	1.562	1.480	1.432	1.473	1.381	1.442	1.447	1.436	1.418	1.433	1.439	1.474	1.467	1.483	1.528
RATIO																		
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,25%	87,05%	85,73%	86,60%	84,49%	84,34%	83,81%	83,75%	86,77%	87,12%	87,02%	91,92%	91,41%	90,29%	88,20%	86,60%	88,98%	86,79%
b. Non Performing Loans (NPL)	3,69%	3,61%	3,08%	3,16%	3,09%	3,11%	3,14%	2,95%	2,74%	2,73%	2,74%	2,59%	2,52%	2,53%	2,65%	2,65%	2,60%	2,53%

Sumber: Bank Indonesia
Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS	2024								2025							
	I		II		III		IV		I		II		III			
	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari
A. WARKAT KLIRING																
1. WARKAT(Lbr)	61.532	992	69.283	1.117	69.262	1.117	82.216	1.326	63.052	1.017	60.493	976	65.973	1.064		
2. NOMINAL (Jt.Rp)	3.366.996	54.306	3.374.095	54.421	3.731.188	60.180	3.987.954	64.322	3.240.296	52.263	3.095.976	49.935	3.538.216	57.068		

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile food</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (<i>persistent</i>).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net-outflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebit maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/ subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
yoy (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

